



**INVESTASI DAN PENGARUHNYA TERHADAP
PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA
PERIODE 1984-1994**



PERPUSTAKAAN PUSAT UNIV. HASANUDDIN	
Tgl. terima	7 03 97
Anal dari	Sharon
Fanyaknya	1 copy
Harga	tidak
No. Inventaris	97 12 03 0.
No. Klas	

**O L E H
BERINGIN MEGA
NOMOR INDUK 92 01 115**

**FAKULTAS EKONOMI
JURUSAN STUDI PEMBANGUNAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN
UJUNG PANDANG**

©1997

INVESTASI DAN PENGARUHNYA TERHADAP
PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA
PERIODE 1984-1994

O l e h

BERINGIN MEGA

NOMOR POKOK 92 01 115

Skripsi Sarjana Lengkap Untuk Memenuhi Sebagian
Syarat Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi
Jurusan Studi Pembangunan
Pada Fakultas Ekonomi
Universitas Hasanuddin
Ujung Pandang

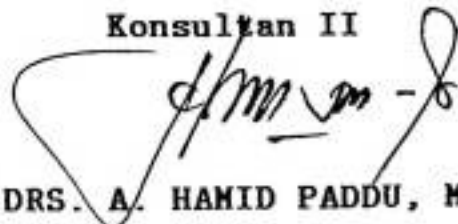
Disetujui Oleh

Konsultan I



(DRS. R. A. WATIMENA)

Konsultan II



(DRS. A. HAMID PADDU, MA.)



**DIPERSEMBAHKAN UNTUK
KEDUA ORANG TUA TERCINTA
AYAHANDA YASAK MAASAR St. MANGKUTO
DAN IBUNDA ROSNIAR RAMLI**

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt, karena dengan Rahmat dan KaruniaNya yang telah memberi kekuatan dan ketabahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari terdapat berbagai hambatan dan kesulitan hal ini disebabkan oleh keterbatasan kemampuan ilmiah dan pengalaman penulis. Namun melalui ketekunan dan kerja keras yang disertai doa kepadaNya serta bantuan dari berbagai pihak baik berupa bimbingan maupun saran, akhirnya penulisan skripsi ini dapat juga diselesaikan pada waktunya.

Skripsi yang berjudul "INVESTASI DAN PENGARUHNYA TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA PERIODE 1984-1994" diajukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat ujian akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Studi Pembangunan pad Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin.

Sebagai seorang penulis pemula yang masih memerlukan bimbingan dan saran maka penyempurnaan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak, yang nantinya sangat berguna untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang penulis geluti selama ini. Sehubungan dengan hal tersebut, maka sudah sewajarnya penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya

kepada semua pihak yang terlihat dalam memberi bantuan kepada penulis.

Ucapan terima kasih, cinta dan sayang yang tak akan terlupakan kepada kedua orang tua, Ayahanda Yasak Maasar St. Mangkuto dan Ibunda Rosniar Ramli yang telah mendidik dan memelihara penulis tanpa harap balas jasa. Semoga Allah melimpahkan Rahmat dan HidayahNya kepad mereka berdua. Amin.

Rasa terima kasih yang tak terhingga penulis haturkan kepada Kakanda Yalizal Pasli yang telah bersedia berkorban materi untuk membiayai kuliah penulis selama ini. Semoga Allah memberi jalan lurus kepada Kakanda tanpa cacat dan hina. A m i n.

Rasa hormat dan hutang budi penulis ungkapkan kepada pembimbing, Bapak Drs. R.A. Wattimena selaku Pembimbing I dan Bapak Drs. A. Hamid Paddu, MA selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya memberikan bimbingan yang tak kenal penat dan lelah sehingga skripsi ini dapat penulis rampungkan.

Penulis tak akan pernah melupakan jasa baik Rektor Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. H. Basri Hasanuddin, MA., Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin, Dr. H. Jabir Hamzah, MA., Ketua Jurusan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin, Drs. A. Kahar Akil, MS., Penasehat Akademik, Drs. Taslim Arifin, MA., para dosen yang tak sempat disebutkan satu persatu namanya, para staf

Akademik dan Administrasi atas segala bantuan serta pelayanan selama penulis menempuh pendidikan di Kampus tercinta ini.

Ucapan terima kasih juga penulis haturkan kepada Pimpinan Bank Indonesia Cabang Ujung Pandang beserta Staf yang telah melayani penulis selama melakukan pra penelitian, selanjutnya, selanjutnya ucapan terima kasih juga kepada Kepala Biro Pusat Statistik Ujung Pandang yang dengan senang hati memberikan data dan informasi yang berhubungan dengan topik penulisan, selama melakukan penelitian.

Rasa kasih dan sayang penulis curahkan kepada Adinda St. Nurhayati Bahar yang telah memberi semangat lahir dan batin serta mendampingi penulis baik dalam keadaan suka maupun duka semoga Tuhan mempersatukan kita untuk selamanya.

Rasa yang sama juga penulis curahkan kepada saudara-saudara di tanah Minang terutama Uni Sur "Suryawarni" beserta keluarga, Da Cik "Sukirmansyah" beserta keluarga, Uni Jaswita beserta keluarga dan adik uda saurang adinda Novarina. Semoga suatu saat nanti kita dapat berkumpul kembali dalam canda dan tawa.

Akhirnya kepada teman-teman baik di rantau urang Acok "Aripau" da garpa, Puang Andi "Bolong" Paridhuddin, Baderuddin "Lelaki ujung derita", Muammar "Mandra" Khaddafi, Zulkifli "greeting" Muthalib dan A. Akhmad Eka Putra thank atas bantuan komputernya, Bihardiansyah "Gemut", Rahmat



Gatot Adiputra, khususnya Untuk Zakaria AS yang telah berbaik hati mengetikkan semua naskah skripsi ini, serta teman-teman baik sekalian yang tak akan habis kertas jika dituliskan satu persatu namanya. Kebaikan dan kejelekan kalian semua membuat saya betah lama-lama di rantau urang. Semoga kita menjadi orang yang berguna bagi orang tua, nusa dan bangsa serta agama selamanya.

Harapan saya mudah-mudahan karya ini dapat diterima oleh semua pihak yang telah memberi dorongan dan bantuan, oleh karenanya kritik dan saran sangat penulis harapkan untuk menyempurnakan skripsi ini.

Billahittaufiq Walhidayah

Wassalamu alaikum Wr. Wb.

Ujung Pandang, Pebruari 1997

Penulis

DAFTAR ISI

	halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Pokok Permasalahan	9
1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
1.3.1. Tujuan Penelitian	10
1.3.2. Kegunaan Penelitian	10
1.4. Hipotesis	11
BAB II LANDASAN TEORITIK	12
2.1. Pendahuluan	12
2.2. Pengertian Investasi	14
2.3. Teori Investasi	17
2.3.1 Teori Klasik	17
2.3.2 Teori Neo Klasik	19
2.3.3 Teori Keynes	23
2.4. Fungsi Investasi	26

2.5. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Dan Menentukan Investasi	29
2.6. Tingkat Suku Bunga	38
2.6.1 Pengertian Tingkat Suku Bunga	38
2.6.2 Jenis dan Karakteristik Tingkat Tingkat Suku Bunga	40
2.6.3 Penentuan Tingkat Suku Bunga	45
2.7. Teori Tingkat Suku Bunga	46
2.7.1 Teori Bunga Klasik	47
2.7.2 Teori Bunga Neo Klasik	52
2.7.3 Teori Bunga Keynes	55
2.7.4 Teori Bunga Hicks	58
2.8. Tingkat Inflasi	60
2.8.1 Pengertian Inflasi	60
2.8.2 Faktor-Faktor Yang Menimbulkan Inflasi	61
2.9. Teori Inflasi	68
2.9.1 Teori Kuantitas Uang Sederhana ...	68
2.9.2 Teori Moneteris dan Strukturalis ..	70
2.9.3 Teori Inflasi Keynes	72
2.10. Teori Pertumbuhan Ekonomi	74
2.10.1 Teori Pertumbuhan Ahli Ekonomi Klasik	74
2.10.2 Teori Pertumbuhan Schumpeter	77
2.10.3 Teori Pertumbuhan Harrod-Domar ...	79

	2.10.4 Teori Pertumbuhan Neo Klasik	84
	2.10.5 Teori Pertumbuhan Nicholas Kaldor		87
BAB III	METODOLOGI	90
	3.1. Daerah Penelitian	90
	3.2. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data		90
	3.3. Kerangka Analisis	91
	3.4. Model Analisis	93
	3.5. Batasan-Batasan-Variabel	95
	3.6. Sistematika Pembahasan	96
BAB IV	INVESTASI DAN PENGARUHNYA TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA PERIODE 1984-1994	98
	4.1. Gambaran Umum Perkembangan Ekonomi Indonesia	98
	4.1.1 Perkembangan Investasi	104
	4.1.1.1 Penanaman Modal Dalam Negeri		108
	4.1.1.2 Penanaman Modal Asing	116
	4.1.2 Perkembangan Tingkat Suku Bunga	...	129
	4.1.3 Perkembangan Tingkat Inflasi	130
	4.1.4 Perkembangan Tingkat Pertumbuhan Ekonomi	137
	4.2. Hasil-Hasil Perhitungan Empirik	142
	4.2.1 Pengaruh Penanaman Modal Dalam Negeri tahun lalu, Penanaman Modal Asing tahun lalu, Tingkat Bunga dan Tingkat Inflasi Terhadap Tingkat Investasi		142

	4.2.2 Pengaruh Investasi Terhadap Tingkat Pertumbuhan Ekonomi	154
BAB V	PENUTUP	157
	5.1. Kesimpulan	157
	5.2. Saran	159
	DAFTAR PUTAKA	160
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	Perkembangan Persetujuan Penanaman Modal Dalam Negeri Di Indonesia Tahun 1984-1994.	109
Tabel 4.2	Rencana PMDN Yang Disetujui Pemerintah Menurut Lapangan Usaha / Sektor	111
Tabel 4.3	Penyebaran Rencana PMDN Yang Disetujui Pemerintah Menurut Dati I	112
Tabel 4.4	Perkembangan Penanaman Modal Asing Di Indonesia Tahun 1984-1994	117
Tabel 4.5	Rencana PMA Yang Disetujui Pemerintah Menurut Lapangan Usaha / Sektor	120
Tabel 4.6	Penyebaran Rencana PMA Yang Disetujui Pemerintah Menurut Dati I	121
Tabel 4.7	Rencana PMA Yang Disetujui Pemerintah Menurut Negara	122
Tabel 4.8	Perkembangan Tingkat Suku Bunga Kredit Di Indonesia tahun 1984-1994	132
Tabel 4.9	Perkembangan Tingkat Inflasi Dan Uang Beredar (M_1) Indonesia Tahun 1984-1994	134
Tabel 4.10	Perkembangan Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 1984-1994	139
Tabel 4.11	Hasil Perhitungan Regresi Model (1) Secara Keseluruhan Terhadap Tingkat Investasi ...	143
Tabel 4.12	Hasil Perhitungan Regresi Secara Parsial Terhadap Tingkat Investasi	145
Tabel 4.13	Hasil Perhitungan Regresi Model (2) Secara Keseluruhan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi .	152
Tabel 4.14	Hasil Perhitungan Regresi Secara Parsial Terhadap Tingkat Pertumbuhan Ekonomi	153



DAFTAR GAMBAR

	halaman
ambar 3.1 Produk Marginal Atas Barang Modal Sehubungan Dengan Tingkat Output dan Stok Barang Modal	20
ambar 3.2 Stok Barang Modal Yang Diinginkan Dalam Hubungannya Dengan Tingkat Output Dan Biaya Sewa Modal	20
ambar 3.3 Kurva Pendapatan, Induced dan Autonomous Investment	27
ambar 3.4 Kurva Investasi Dan Pendapatan Nasional .	28
ambar 3.5 Kurva Investasi Dengan Suku Bunga	32
ambar 3.6 Kurva MEC Dan Kurva MEI	37
ambar 3.7 Bunga Dan Deposito/Tabungan	41
ambar 3.8 Kurva LM, Bunga Dan Pendapatan Nasional .	43
ambar 3.9 Kurva IS Dan Suku Bunga	44
ambar 3.10 Keseimbangan Kurva IS = LM, Suku Bunga ..	45
ambar 3.11 Kurva Investasi Dan Tabungan	48
ambar 3.12 Kurva Tingkat Bunga Dan Perubahan Pendapatan	50
ambar 3.13 Penurunan Dan Peningkatan Pendapatan	51
ambar 3.14 Tingkat Bunga Menurut Keynes	57
ambar 3.15 Kurva IS - LM Dan Tingkat Bunga Hicks ...	59
ambar 3.16 Inflasi Tarikan Permintaan	64
ambar 3.17 Inflasi Desakan Biaya	66
ambar 3.18 Penduduk Optimal	77
ambar 4.19 Distribusi Regional Investasi	126
ambar 4.20 Porsi Investasi Asing Antara KBI Dan KTI .	127
ambar 4.21 Negara Asal Investasi	128

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebelum penulis masuk pada pokok penulisan, sebagai gambaran bahwa topik ini pernah dibahas oleh penulis-penulis sebelumnya seperti :

1. INVESTASI DAN PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA TAHUN 1975-1989, penulis TASBI (8601094)
2. PENGARUH INVESTASI DAN TINGKAT SUKU BUNGA TERHADAP PERKEMBANGAN PDB DI INDONESIA (PERIODE 1984-1993), penulis ISKANDAR (9101722)

Jadi memang terdapat pembahasan-pembahasan yang mirip seperti tingkat suku bunga dan pertumbuhan ekonomi, tetapi penulis-penulis sebelum ini belum memberi gambaran yang jelas tentang masing-masing variabel di atas. Itulah sebabnya saya tertarik untuk mengangkat topik ini kembali meskipun dalam bentuk dan variabel yang berbeda.

✓ Pada umumnya di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, kegiatan pembangunan dimulai melalui pendekatan industrialisasi. Berdasarkan pengalaman negara-negara maju yang lebih dahulu menerapkan strategi ini berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Industrialisasi diyakini adalah salah satu strategi yang ampuh untuk mempercepat proses trans-

formasi dan mengikis keterbelakangan. Berdasarkan hal tersebut, banyak negara berkembang menempatkan industri sebagai sektor unggulan dalam strategi pembangunan.

Bagi Indonesia strategi ini merupakan pilihan yang dirasakan paling tepat untuk memulai pembangunan ekonomi yang mengalami kejatuhan pada Orde Lama. Secara garis besar industrialisasi yang dilakukan Indonesia telah mengalami perubahan dari strategi substitusi impor kepada promosi ekspor.

Jatuhnya harga minyak pada tahun 1981, dari hampir US\$ 30 menjadi US\$ 9,25 per barrel ikut memperburuk keadaan ekonomi. Pada dekade tersebut (1980-1984) pertumbuhan ekonomi menurun menjadi rata-rata 4-5 % pertahun. Dalam kondisi ini, dimana sebelumnya penerimaan minyak memberi kontribusi lebih besar dari penerimaan domestik, mengharuskan pemerintah untuk mengambil langkah-langkah stabilisasi secara cepat untuk pemulihan stabilitas makro ekonomi. Pemerintah langsung mengadakan deregulasi dan debirokratisasi di sektor moneter yang kemudian disusul dengan sektor riil. Hal ini menyebabkan terjadinya perubahan strategi pembangunan, dimana Indonesia memasuki tahap industri pengolahan (manufacturing industries) yang menunjukkan bahwa sistem ekonomi lebih terbuka dan berorientasi pada ekspor non migas dalam mendorong perbaikan

ekonomi. Implikasinya adalah pasar internasional yang dapat dimanfaatkan peluangnya untuk memperbaiki kondisi ekonomi masyarakat luas terutama peranan swasta dalam melakukan investasi (PMDN dan FIIA).

• Ikutnya pihak swasta dalam perekonomian Indonesia akan memacu peningkatan pertumbuhan ekonomi, hal ini sejalan pemikiran dasar dari ekonomi pembangunan konvensional dimana pertumbuhan sektor swasta dalam menggerakkan modal fisik secara besar-besaran akan meningkatkan pendapatan dan tabungan yang pada gilirannya berdampak langsung terhadap kemampuan masyarakat melakukan investasi.¹

Investasi bagi suatu negara sangat diperlukan guna merealisasikan rencana-rencana pembangunan yang dapat mempertinggi kegiatan dan pertumbuhan ekonomi serta memperluas kesempatan kerja sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya investasi yang dilaksanakan itu menambah stok kapital yang ada dalam masyarakat dengan demikian stok kapital ini cenderung meningkat dari tahun ke tahun, jika pihak swasta dan pemerintah melakukan investasi yang dapat menambah stok kapital berarti mempertinggi kapasitas produktif

1. Didik J. Rachbini, Deregulasi dan Agenda Kebijakan Ekonomi, Jakarta, Infobank, 1974, disampaikan kembali dalam bentuk makalah pada SIMNAS HIMA ESP Unpad, Bandung, 1995.

perekonomian suatu negara. Dalam hal ini, investasi diartikan modal tahan lama guna memanfaatkan barang atau jasa dalam perekonomian selama jangka waktu tertentu.²

Walaupun jurang antara tabungan dan investasi menjadi masalah di Indonesia, namun hal tersebut tidak menutup pelaksanaan investasi. Kekurangan dana dalam negeri ditutup dengan sumber eksternal, apakah berupa bantuan luar negeri atau investasi asing, sehingga nantinya mampu menjembatani antara persediaan tabungan dalam negeri dengan kebutuhan investasi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi.

Oleh karena itu investasi merupakan salah satu penentu tercapainya keseimbangan pendapatan nasional, dimana keseimbangan tercapai pada saat investasi sama dengan tabungan ($I = S$). Jika salah satu faktor berubah maka akan terjadi perubahan pada pendapatan nasional, ini akan berlangsung terus sampai tercipta keseimbangan yang baru.

Dalam jangka panjang, tantangan utama yang dihadapi Indonesia adalah mengejar pertumbuhan yang tinggi, untuk menjadi negara industri diperlukan pertumbuhan rata-rata 7 % selama paling tidak 25

2. Abdul Rahman Panetto, Ekonomi Makro I, Lephass, Ujung Pandang, 1988, hal 80.

tahun.³ Untuk itu diperlukan investasi yang cukup besar, yang berasal dari kekuatan ekonomi dalam negeri dan investasi asing. Dalam deklarasi APEC di Bogor disebutkan bahwa perlakuan bagi investasi asing dan dalam negeri akan semakin mengecil dan akhirnya akan ditiadakan. Dalam konteks ini liberalisasi investasi dan perdagangan akan membuka kesempatan dari dalam dan luar negeri untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

Namun di sudut lain adanya guncangan-guncangan ekonomi seperti tingkat suku bunga yang tinggi, inflasi yang lebih dari satu digit serta adanya kebijakan pemerintah yang tidak menentu ikut mempengaruhi pelaksanaan investasi di Indonesia.

Berdasarkan pengalaman sebelumnya, investasi yang sudah disetujui masih bisa batal karena berbagai penyebab. Tingginya suku bunga pinjaman di dalam negeri, sudah pasti akan berpengaruh besar terhadap realisasi investasi khususnya PMDN. Karena itulah, seperti yang sudah diantisipasi oleh ketua BKPM Sanyoto Sastrowardoyo, pihaknya masih terus merasa was-was dengan situasi moneter sekarang, yang berpotensi membuat tekanan terhadap pengusaha lokal, untuk menunda bahkan

3. Marzuki Usman, *Industrialisasi Indonesia; Pasca GATT/AFTA/APEC*, Makalah pada Kongres Nasional V ISMEI di Banjarmasin, 1994.



membatalkan rencana investasinya (The Asian Wall Street Journal Weekly, 31/12/90). Sedangkan bagi investor asing (PMA), tingkat inflasi yang tinggi merupakan gangguan tersendiri. Perencanaan investasi membutuhkan angka-angka pasti atau setidaknya predictable, pada variabel harga. Kalau harga terus melonjak, investor akan mengalami kesulitan untuk memprediksi dan membuat perencanaan serta merasa tidak aman. Karena itulah stabilitas harga (dengan tingkat inflasi seminimal mungkin) adalah syarat mutlak bagi terciptanya iklim investasi yang kondusif di dalam negeri.⁴

Investasi yang tinggi tidak saja meningkatkan produksi, tetapi juga kesempatan kerja. Kemajuan yang dicapai dalam bidang teknologi juga dipandang sebagai akibat dari adanya investasi, apakah itu berupa PMDN atau PMA. Secara umum dapat dikatakan bahwa investasi sangat berperan menaikkan pendapatan nasional melalui proses multipliernya, sehingga dengan peningkatan pendapatan nasional ini jelas akan memacu pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Disamping itu, dengan adanya berbagai macam kebijakan pemerintah dewasa ini, yang terakhir PP No 20 tahun 1994, walaupun semakin relevan menarik investasi

4. A. Tony Prasetyantono, Agenda Ekonomi Indonesia, PT. Gramedia, Jakarta, 1995, hal 8-9.

khususnya investasi asing. Namun dengan masuknya investasi asing pada sektor publik seperti telekomunikasi, pembangkit listrik, pengadaan suplai air bersih, pelabuhan, jalan tol dan lain-lain bertentangan dengan UUD 1945 pasal 33 dimana setiap cabang produksi yang menyangkut hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Tetapi dengan dalih pembangunan semua itu bisa berubah. Disinilah dibutuhkan bagaimana kebijakan pemerintah yang konsisten dengan iklim perekonomian Indonesia, sehingga tidak ada lagi dalih "demi pembangunan".

Kondisi iklim investasi domestik dan penanaman modal asing di Indonesia, meskipun masih bersifat rencana secara kumulatif dari periode juli 1968 sampai dengan Desember 1994 tercatat 9009 proyek PMDN dengan nilai Rp 303.956,5 milyar, sedangkan proyek PMA sebanyak 3162 proyek dengan nilai US\$ 92.379,1 juta. Dari sekian jumlah dan nilai PMDN dan PMA, 65 % di antaranya merupakan proyek perindustrian (manufacturing) dan 67 % dari jumlah proyek PMDN dan 78 % dari jumlah proyek PMA berada di pulau Jawa dengan nilai sebesar Rp 196.266,2 milyar untuk PMDN dan US\$ 56.625,7 juta untuk PMA (BKPM;1995).

Bila kita lihat perkembangan inflasi di Indonesia, pada tahun 1984 sebesar 8,76 % dan menurun

dengan tajam pada tahun 1985 sebesar 4,31 %, kemudian naik kembali pada tahun berikutnya 8,83 %, sebagai akibat naiknya harga minyak di pasaran dunia. Penurunan tingkat inflasi terendah juga terjadi pada tahun 1992 sebesar 4,94 %. Hal ini terjadi karena adanya kebijakan uang ketat yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk menahan laju inflasi yang tinggi selama ini. Namun hal tersebut tidak berlangsung lama dan pada tahun berikutnya kembali mengalami kenaikan menjadi 9,77 % sebagai angka tertinggi.

Sedangkan tingkat suku bunga pinjaman yang berlaku pada tahun 1984-1994 rata-rata sebesar 19 %, cukup tinggi untuk suku bunga kredit investasi. Besarnya tingkat suku bunga pada tahun 1984 yaitu sebesar 23,2 % kemudian mengalami penurunan sebesar 22,6 % di tahun 1985. Dan pada tahun berikutnya 1986 tingkat suku bunga masih mengalami penurunan menjadi 21,4 %. Penurunan tingkat suku bunga ini terjadi sebagai reaksi pemerintah untuk mengatasi gejolak suku bunga akibat adanya deregulasi 1 Juni 1983 yang memberi kebebasan pada masing-masing bank untuk menetapkan suku bunga sendiri. Sedangkan penurunan terendah terjadi pada tahun 1993 sebesar 17,9 %.

Perkembangan laju pertumbuhan ekonomi Indonesia yang dinyatakan dalam persentase dari tahun 1984 sampai

tahun 1994 berlangsung pada tingkat yang cukup tinggi rata-rata sebesar 6 %, yang dihitung berdasarkan Produk Domestik Bruto atas dasar harga konstan. Pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 1985 sebesar 2,5 % sebagai akibat anjloknya harga minyak dipasaran internasional sehingga penerimaan di sektor migas mengalami penurunan pula. Dan pada tahun berikutnya pertumbuhan ekonomi di atas 5 % kecuali pada tahun 1987 yaitu sebesar 4,8 %.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka penulis tertarik untuk membahas masalah yang berjudul : "Investasi dan Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Periode 1984 - 1994".

1.2. Pokok Permasalahan

Berdasarkan apa yang telah dikemukakan di atas serta keterbatasan ilmu yang dimiliki penulis maka yang menjadi permasalahan dalam penulisan ini adalah :

1. Penanaman Modal Dalam Negeri tahun lalu mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pelaksanaan investasi di Indonesia
2. Penanaman Modal Asing tahun lalu mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pelaksanaan Investasi di Indonesia
3. Tingkat suku bunga tidak signifikan terhadap pelaksanaan investasi di Indonesia

4. Tingkat inflasi tidak signifikan terhadap pelaksanaan investasi di Indonesia
5. Investasi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.

3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

3.1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai sehubungan dengan penulisan skripsi ini adalah :

- a. Untuk mengetahui berapa besar pengaruh PMDN, PMA, suku bunga, tingkat inflasi terhadap pelaksanaan investasi di Indonesia selama tahun yang diamati.
- b. Untuk mengetahui berapa besar pengaruh investasi tersebut terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia selama tahun yang diamati.

3.2. Kegunaan Penelitian

Dengan tercapainya tujuan di atas, maka selanjutnya diharapkan :

- a. Untuk memberi gambaran mengenai pengaruh PMDN, PMA, tingkat suku bunga, dan tingkat inflasi terhadap pelaksanaan investasi di Indonesia dan peranan investasi terhadap pertumbuhan ekonomi selama tahun yang diamati.

- b. Dijadikan bahan pertimbangan baik untuk penulis sendiri maupun untuk orang lain yang memerlukan.

4. Hipotesis

Berdasarkan pokok permasalahan yang penulis kemukakan dan melihat tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan ini, maka penulis menarik hipotesis sebagai berikut, di duga :

1. Penanaman Modal Dalam Negeri tahun lalu mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pelaksanaan investasi di Indonesia
2. Penanaman Modal Asing tahun lalu mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pelaksanaan investasi di Indonesia
3. Tingkat suku bunga tidak signifikan terhadap pelaksanaan investasi di Indonesia
4. Tingkat Inflasi tidak signifikan terhadap pelaksanaan investasi di Indonesia
5. Investasi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.

BAB II LANDASAN TEORITIK

1. Pendahuluan

Proses pembangunan memerlukan modal, yang dalam bentuk umum disebut dana. Jika kita ingin mandiri maka dana sebaiknya digali dari potensi dalam negeri, baik dari rumah tangga masyarakat, sektor bisnis maupun dari pemerintah. Tapi masalahnya kebanyakan negara berkembang seperti Indonesia, masalah dana merupakan masalah mendasar. Maka salah satu cara mengatasinya adalah dengan pembentukan modal. Hal ini sejalan dengan pemikiran Nurkse yang mengatakan bahwa :

"Lingkaran setan kemiskinan di negara berkembang dapat digunting melalui pembentukan modal."⁵

Sedangkan kaum klasik berpendapat bahwa investasi atau pembentukan modal merupakan pengeluaran yang akan mempertinggi jumlah alat-alat modal dalam masyarakat dan apabila ini bertambah berarti produksi dan pendapatan nasional akan meningkat pula, dengan demikian perkembangan ekonomi akan terjadi.

Itulah sebabnya pembentukan atau pengumpulan modal dipandang sebagai salah satu faktor dan sekaligus

5. M.L. Jhingan, *The Economics of Development and Planning*, terjemahan D. Guritno, PT. Raja Grafindo Persada, 1994, hal 420.

faktor utama di dalam pembangunan ekonomi, yang nantinya diharapkan dapat mengurangi pengangguran, meningkatkan pendapatan dan standar hidup serta kemakmuran.

Tetapi dilain pihak, tingkat suku bunga dan inflasi yang tinggi menjadi kendala dalam pelaksanaan investasi di Indonesia. Seperti yang dikatakan Keynes bahwa tingkat suku bunga merupakan determinasi utama atas investasi. Oleh karena itu investasi dianggap sebagai fungsi menurun dari suku bunga, hal ini dapat dilihat pada fungsi permintaan investasi sebagai berikut :

$$I = f(i) \text{ } ^6$$

dimana : I = Investasi

i = tingkat suku bunga

f = fungsi

Berbeda dengan tingkat suku bunga, inflasi sangat berpengaruh pada perkiraan harga. Inflasi yang tinggi dan tidak menentu akan mengacaukan perkiraan investor untuk melaksanakan investasinya, karena perencanaan investasi membutuhkan angka-angka yang pasti atau setidaknya *predictable* pada variabel harga.

6. T.F. Denburg dan D.M. Mc Dougall, Ekonomi Makro, (Jakarta:Erlangga), Edisi keenam, 1985, hal 136.

Seperti A. Toni Prasetyantono dalam bukunya *Agenda Ekonomi Indonesia* :

".....bagi investor asing (PMA) tingkat inflasi yang tinggi merupakan gangguan tersendiri, kalau harga terus menerus melonjak-lonjak, investor akan mengalami kesulitan untuk memprediksi⁷ dan membuat perencanaan serta merasa tidak aman."

2.2. Pengertian Investasi

Dalam membahas pengertian investasi, kita tidak dapat terlepas dari suatu batasan-batasan yang dikemukakan oleh beberapa ahli. Dari beberapa pengertian yang dikemukakan para ahli tersebut, hanya berbeda penyajian saja, dalam perumusannya adalah sama. Secara garis besar yang dikatakan investasi atau penanaman adalah pengorbanan konsumsi masa kini untuk meningkatkan konsumsi di masa depan.⁸

Pengertian sederhana mengenai investasi dikemukakan oleh Budiono bahwa investasi adalah pengeluaran oleh sektor produsen untuk pembelian barang-barang dan jasa-jasa dengan maksud untuk menambah persediaan di gudang atau untuk perluasan pabrik.⁹

7. A. Tony Prasetyantono, *op.cit.*, hal 9.

8. Paul A. Samuelson dan William D. Norhaus, *Ekonomi I*, Edisi XII, jilid I, Jakarta, Erlangga, 1991, hal 143

9. Boediono, *Ekonomi Makro*, Yogyakarta, BPFE, 1982, hal 40.

Menurut Abdurrahman, investasi adalah :

"Penggunaan atau pemakaian sumber-sumber ekonomi untuk produksi barang-barang produsen atau barang konsumen. Dalam arti yang semata-mata bercorak keuangan, investasi mungkin berarti penempatan dana-dana kapital dalam suatu perusahaan selama jangka waktu yang relatif panjang, supaya memperoleh suatu hasil yang teratur dengan keamanan maksimum. Dalam analisa ekonomi sewaktu itu maka jumlah investasi yang berhubungan dengan tabungan dalam suatu periode tertentu telah diberikan peranan penting dalam penentuan jalannya business cycle."¹⁰

Sedangkan menurut Jhingan, investasi atau pembentukan modal adalah :

"Masyarakat tidak mempergunakan seluruh aktivitas produktif saat ini untuk kebutuhan dan keinginan konsumsi, tetapi menggunakan sebagian saja untuk pembuatan modal; perkakas dan alat-alat, mesin dan fasilitas angkutan, pabrik dan perlengkapannya, segala macam bentuk modal nyata yang dapat dengan cepat meningkatkan manfaat upaya produktif."¹¹

Selanjutnya Samuelson memberi batasan-batasan tentang investasi sebagai berikut :

"Investasi atau pembentukan modal merupakan penambahan gedung, mesin peralatan dan berbagai persediaan bagi suatu bangsa dalam tahun tertentu."¹²

Stoiner dan Douglas memberi batasan investasi

10. Abdurrahman, Ensiklopedia Ekonomi, Pembangunan dan Perdagangan, Jakarta, Pradnya Paramita, 1978, hal 570.

11. Jhingan, Op.cit. hal 420.

12. Paul A. Samuelson dan William D. Nourhaus, Op.cit. hal 143.

seperti di bawah ini :

"Investasi adalah keputusan yang penting dalam rangka usaha menciptakan lapangan kerja baik langsung maupun tidak langsung melalui efek multiplier."¹³

Dan menurut Sadono Sukirno, istilah investasi dapat diartikan :

"Investasi diartikan sebagai pengeluaran atau pembelanjaan penanaman modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang-barang dan jasa yang tertentu dalam perekonomian."¹⁴

Dari pengertian investasi di atas, nampak bahwa investasi mempunyai pengertian yang luas. Bagi pakar ekonomi investasi selalu berarti pembentukan modal riil yaitu penambahan barang-barang pada persediaan atau pembangunan pabrik baru atau peralatan baru.

Dalam prakteknya, dalam usaha untuk mencatat nilai penanaman modal yang dilakukan dalam suatu tahun tertentu yang digolongkan sebagai investasi meliputi pengeluaran atau pembelanjaan sebagai berikut :¹⁵

13. A.W.Stoiner dan C.H. Douglass, Teori Ekonomi 2, terjemahan, Aminuddin, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1984, hal 148.

14. Sadono Sukirno, Pengantar Teori Makroekonomi, Edisi ke 2, Jakarta, Rajawali Pers, 1994, hal 107.

15. ibid.

1. Pembelian berbagai jenis barang modal yaitu mesin-mesin dan peralatan produksi lainnya untuk mendirikan berbagai jenis industri dan perusahaan.
2. Perbelanjaan untuk membangun rumah tempat tinggal, bangunan kantor, bangunan pabrik dan bangunan lainnya.
3. Pertambahan nilai stok barang-barang yang belum terjual, bahan mentah dan barang yang masih dalam proses produksi pada akhir tahun perhitungan pendapatan nasional.

2.3. Teori Investasi

Masalah investasi adalah suatu masalah yang langsung berhubungan dengan besarnya pengharapan akan pendapatan dari barang modal di masa depan, pengharapan akan pendapatan merupakan faktor yang sangat penting untuk menentukan besarnya investasi. Berikut ini dibahas beberapa aliran teori mengenai investasi :

2.3.1. Teori Klasik

Menurut teori Klasik investasi merupakan suatu pengeluaran yang dimaksudkan untuk meningkatkan kesanggupan masyarakat dalam menambah produksi, jadi investasi merupakan pengeluaran yang akan memper-tinggi jumlah alat-alat produksi dalam masyarakat dimana pada akhirnya akan menambah pendapatan

nasional, sehingga pertumbuhan ekonomi dapat tercipta.

Investasi juga sebagai sarana atau motivator dalam pembangunan ekonomi khususnya dalam upaya memperluas penggunaan tenaga kerja dan meningkatkan output.

Sama seperti ahli ekonomi modern, kaum klasik menganggap akumulasi kapital sebagai suatu syarat mutlak bagi pembangunan ekonomi. Maka masalah pembangunan ekonomi terutama tergantung pada kemampuan masyarakat untuk menabung lebih banyak dan menginvestasikannya dalam suatu negara. Jadi tingkat investasi ditentukan oleh tingkat tabungan dan tabungan diinvestasikan sepenuhnya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Adam Smith :

"Bagian yang ditabung setiap tahun oleh seseorang segera digunakan sebagai kapital."¹⁶

Sebaliknya hampir semua tabungan ditumbuhkan dari investasi kapital atau dari penyewaan tanah, sehingga hanya kaum pemilik modal dan tanah yang mampu menabung. Golongan pekerja dipandang tidak mampu menabung.

* 16. Ambar Tadang, Ekonomi Pembangunan, Problem Dasar dan Teori Pembangunan, Surabaya, Bina Ilmu, 1984, hal 83.

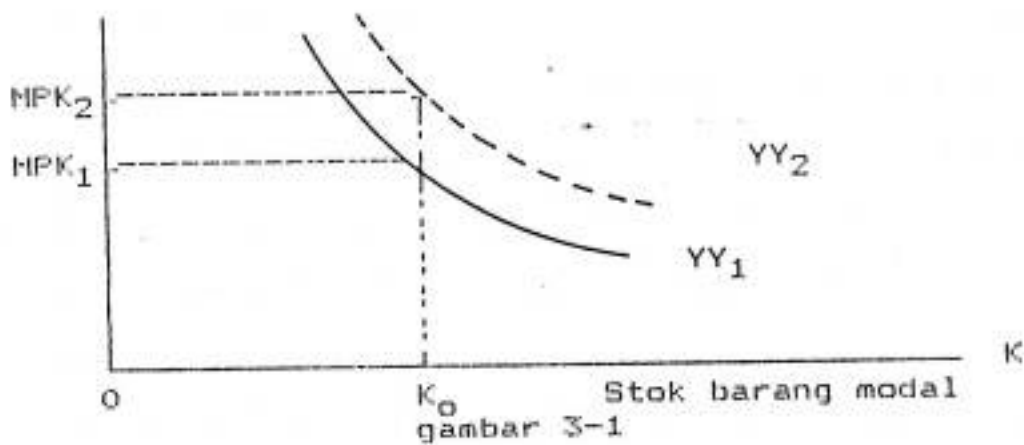
5.2. Teori Neo Klasik

Teori Neo Klasik tentang investasi pada pokoknya berdasarkan pada teori produktivitas marginal (marginal productivity) dari faktor produksi modal. Menurut teori ini besarnya modal yang akan diinvestasikan dalam proses produksi ditentukan oleh produktivitas marginalnya dibandingkan dengan tingkat harga.

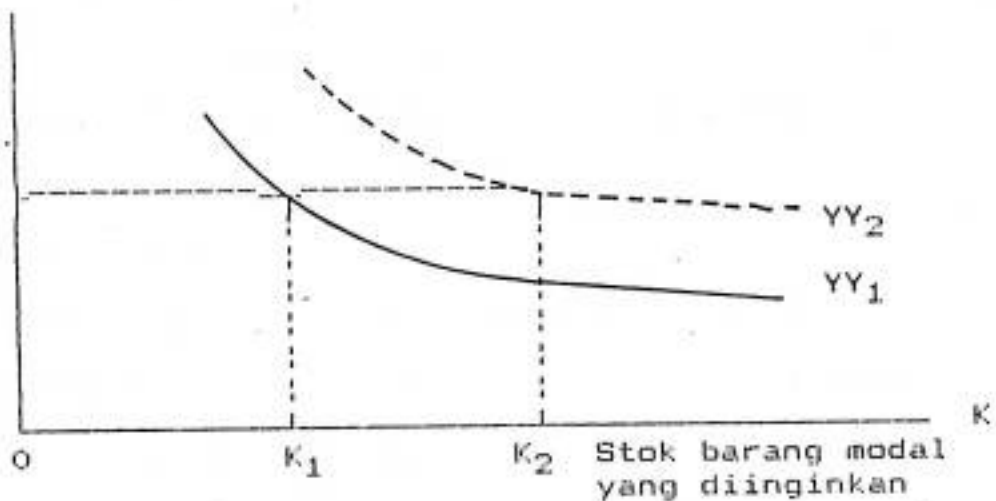
Yang dimaksud dengan produktivitas marginal adalah tambahan hasil (output) yang diperoleh dengan menggunakan satu unit modal tambahan dalam proses produksi. Investasi akan terus dilakukan apabila produktivitas investasi masih lebih tinggi dibandingkan tingkat bunga yang akan diterima, bila seandainya modal itu dipinjamkan dan tidak diinvestasikan.

Untuk memahami produktivitas marginal modal, perusahaan dapat menggantikan modal dengan tenaga kerja dalam memproduksi output. Berbagai kombinasi yang berbeda dari modal dan tenaga kerja dapat digunakan untuk memproduksi tingkat output tertentu. Jika tenaga kerja relatif murah perusahaan akan menggunakan tenaga kerja yang relatif lebih besar, dan jika modal relatif murah, perusahaan akan menggunakan modal yang relatif lebih besar.

Analisa produktivitas marjinal secara grafik dapat dijelaskan sebagai berikut :



Produk marjinal atas barang modal sehubungan dengan tingkat output dan stok barang modal.



gambar 3-2

Stok barang modal yang diinginkan dalam hubungannya dengan tingkat output dan biaya sewa modal.

Penjelasan lebih lanjut :

Ketika perusahaan mengkombinasikan semakin banyak modal dengan tenaga kerja yang relatif sedikit dalam memproduksi sejumlah output tertentu, produk

marjinal modal menurun. Hubungan ini diperlihatkan pada skedul yang condong menurun pada gambar 3-1. Skedul tersebut memperlihatkan bagaimana produk marjinal menurun ketika modal yang lebih banyak digunakan dalam memproduksi tingkat output tertentu. Skedul YY_1 digunakan untuk tingkat output Y_1 . Skedul YY_2 digunakan untuk tingkat output yang lebih tinggi Y_2 . Produk marjinal modal dengan sejumlah barang modal tertentu, misalkan K_0 adalah lebih tinggi pada skedul YY_2 dari pada YY_1 . Hal ini disebabkan karena lebih banyak tenaga kerja yang digunakan dalam kombinasi dengan jumlah modal tertentu K_0 untuk memproduksi tingkat output Y_2 daripada untuk memproduksi Y_1 .

Gambar 3-1 memperlihatkan produk marjinal modal dalam hubungan dengan tingkat output dan jumlah modal yang digunakan untuk memproduksi output tersebut. Gambar 3-2 merupakan diagram yang sama yang memperlihatkan jumlah barang modal yang diinginkan jika dihubungkan dengan biaya sewa modal dan tingkat output. Dengan tingkat output tertentu, misalkan Y_1 perusahaan ingin menggunakan modal lebih banyak jika biaya sewa modal semakin rendah karena dengan biaya sewa modal yang rendah, ia mampu menggunakan modal meskipun produktivitas marjinalnya sangat rendah.



Jika biaya sewa modal tinggi, perusahaan akan menggunakan modal hanya jika produktivitas marginalnya tinggi, yang berarti perusahaan tidak ingin menggunakan modal yang sangat besar melainkan akan mensubstitusikannya dengan tenaga kerja. Dalam memproduksi tingkat output yang lebih tinggi misalnya Y_2 , perusahaan itu akan menggunakan modal dan tenaga kerja yang lebih besar, dengan biaya sewa modal yang telah tertentu. Karena itu, pada tingkat output yang lebih tinggi, stok barang modal yang diinginkan akan lebih tinggi.

Teori Neo Klasik dapat disederhanakan sebagai berikut :

Suatu investasi akan dijalankan bila pendapatan dari investsi lebih besar dari tingkat bunga dan investasi dalam suatu barang modal adalah menguntungkan jika biaya sewa plus bunga lebih kecil daripada hasil pendapatan yang diharapkan dari investasi tersebut. Dengan demikian ada tiga unsur penting yang harus diperhitungkan dalam penentuan investasi, yaitu: tingkat biaya barang modal, tingkat bunga dan tingginya hasil pendapatan yang diterima. Jika salah satu dari tiga faktor tersebut berubah, akan mengakibatkan berubahnya perhitungan profitabilitas. Oleh karena itu kebijaksanaan moneter dan fiskal mempunyai

pengaruh yang besar terhadap investasi melalui jumlah barang modal yang diinginkan, walaupun dampak jangka pendek kemungkinan besar menjadi kecil. Pengaruh jangka panjang adalah jauh lebih besar.

3. Teori Keynes

Masalah investasi, baik penentuan jumlah maupun kesempatan untuk melakukan investasi oleh Keynes didasarkan atas konsep Marginal Efficiency of Investment (MEI), yaitu investasi akan dilakukan apabila MEI masih lebih tinggi daripada tingkat bunga. Jelasnya investasi ditentukan oleh faktor-faktor lain diluar tingkat suku bunga. Menurut kurva MEI ini antara lain disebabkan oleh dua hal yaitu :

1. Bahwa semakin banyak jumlah investasi yang terlaksanakan dalam masyarakat, makin rendahnya efisiensi marginal investasi tersebut. Hal ini disebabkan semakin ketatnya persaingan para investor, sehingga kurva MEI menurun.
2. Bahwa semakin banyak investasi yang dilakukan maka ongkos dari barang modal menjadi lebih tinggi.

Berbeda dengan pandangan Klasik yang menyatakan bahwa tingkat tabungan maupun tingkat investasi sepenuhnya ditentukan oleh tingkat bunga, dan perubahan dalam tingkat bunga akan menyebabkan tabungan yang tercipta pada tingkat penggunaan tenaga kerja

pernuh akan selalu sama dengan investasi yang dilakukan oleh para pengusaha.

Menurut Keynes, besarnya tabungan yang dilakukan oleh rumah tangga bukan tergantung kepada tinggi rendahnya tingkat bunga, tetapi tergantung kepada besar kecilnya pendapatan rumah tangga. Makin besar pendapatan yang diterima oleh rumah tangga, makin besar pula tabungan yang akan dilakukannya. Apabila jumlah pendapatan rumah tangga itu tidak mengalami kenaikan atau penurunan, perubahan yang besar dalam tingkat bunga, tidak akan menimbulkan pengaruh yang berarti kepada jumlah tabungan yang akan dilakukan oleh rumah tangga.

Ini berarti menurut pendapat Keynes, jumlah pendapatan yang diterima rumah tangga dan bukan tingkat bunga yang menjadi penentu utama dari jumlah tabungan yang dilakukan oleh rumah tangga. Keynes juga tidak yakin bahwa jumlah investasi yang dilakukan para pengusaha sepenuhnya ditentukan oleh tingkat suku bunga. Keynes tetap mengakui bahwa tingkat bunga memegang peranan yang cukup menentukan di dalam mempertimbangkan investasi tapi ada faktor lain diluar tingkat suku bunga seperti keadaan ekonomi masa kini, ramalan perkembangannya di masa depan dan luasnya perkembangan teknologi yang berlaku. Apabila

tingkat kegiatan ekonomi pada masa kini meningkat dan di masa depan diramalkan perekonomian tumbuh dengan cepat, maka walaupun tingkat bunga tinggi, para pengusaha akan melakukan banyak investasi.

Sebaliknya walaupun tingkat bunga rendah, investasi tidak akan banyak dilakukan apabila barang-barang modal yang terdapat dalam perekonomian digunakan pada tingkat yang jauh lebih rendah dari kemampuan yang maksimal.

Menurut pendapat Keynes, pada umumnya investasi yang dilakukan oleh para pengusaha adalah lebih kecil dari jumlah tabungan yang dilakukan rumah tangga pada waktu dicapai penggunaan tenaga kerja penuh oleh karenanya permintaan agregat dalam perekonomian adalah lebih rendah dari produksi barang-barang dan jasa-jasa pada tingkat penggunaan tenaga kerja penuh, kekurangan dalam permintaan agregat ini akan menimbulkan pengangguran dalam perekonomian.

Dari teori-teori investasi yang telah dijelaskan di atas, maka teori yang relevan dengan penulisan ini adalah teori Klasik dan teori Keynes. Dalam teori Klasik investasi dilakukan untuk mempertinggi kemampuan masyarakat dalam memproduksi. Dengan meningkatnya produksi, akumulasi modal terbentuk yang nantinya menaikkan tabungan dalam masyarakat dalam

melakukan investasi.

Sedangkan dalam teori Keynes, investasi yang dilakukan lebih ditentukan oleh konsep MEI. Artinya investasi akan dilaksanakan jika keuntungan yang diharapkan lebih tinggi dari tingkat bunga. Dalam teori Keynes juga dikatakan bahwa masih ada variabel-variabel lain yang menentukan investasi, disamping tingkat bunga. Dalam penulisan ini, variabel-variabel lain tersebut adalah investasi domestik dan investasi asing tahun lalu serta kenaikan harga atau tingkat inflasi.

I. Fungsi Investasi

Kurva yang menunjukkan hubungan antara tingkat investasi dengan tingkat pendapatan nasional dinamakan fungsi investasi. Bentuk fungsi investasi dapat dibedakan menjadi dua yaitu :

1. Fungsi investasi yang sejajar dengan sumbu datar
2. Fungsi investasi yang naik ke kanan atas (jika pendapatan nasional meningkat).

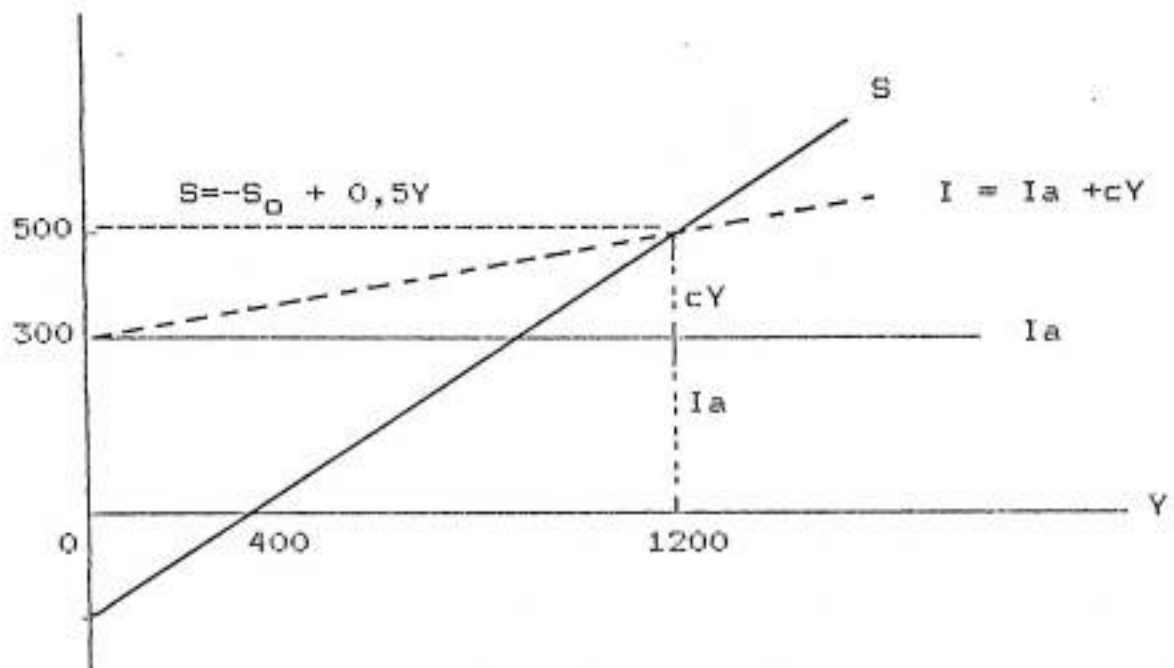
Fungsi investasi yang sejajar dengan sumbu datar dinamakan investasi otonomi (autonomous investment) dan fungsi investasi yang naik ke kanan atas dinamakan investasi terpengaruh (induced investment).

Sedangkan pengertian masing-masing investasi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Investasi otonomi (autonomous investment) adalah investasi yang baru timbul karena hal-hal yang tidak tergantung pada perubahan tingkat suku bunga, tingkat konsumsi, pendapatan nasional. Investasi ini biasanya dilakukan oleh pemerintah misalnya untuk pertahanan nasional, pembangunan infrastruktur.
2. Investasi terpengaruh (induced investment) yaitu investasi yang bertambah karena pertambahan dalam pengeluaran konsumsi atau semakin meningkatnya pendapatan mengakibatkan konsumsi juga meningkat yang akhirnya meningkatkan permintaan efektif masyarakat. Peningkatan permintaan efektif inilah nanti yang menyebabkan investasi meningkat.

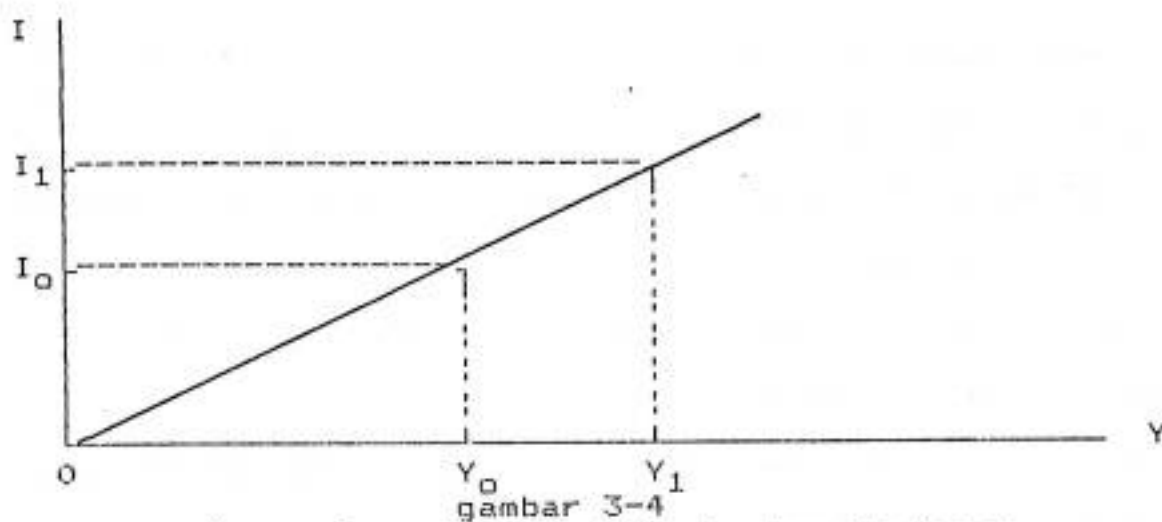
Sebagai gambaran perbedaan keadaan tersebut maka dapat ditunjukkan dengan gambar 3-3 sebagai berikut :¹⁷

17. Iskandar, Pengaruh Investasi dan Tingkat Suku Bunga Terhadap Perkembangan PDB di Indonesia, (Ujung Pandang, Skripsi tidak dipublikasikan), 1995, hal 37.



gambar 3-3
Kurva Pendapatan, Induced dan Autonomous Investment

Dalam kurva terlihat bahwa autonomous investmet (I_a) tidak terpengaruh oleh perkembangan tingkat pendapatan (Y) sehingga garisnya agak datar pada tingkat investasi 300. Dilain pihak induced invesment (I_d) mengalami kenaikan mengikuti perkembangan pendapatan. Ini membuktikan bahwa terdapat hubungan yang cukup kuat antara investasi akan mencapai tingkat yang lebih besar jika jumlah pendapatan nasional bertambah, sebaliknya investasi menurun jika pendapatan nasional turun. Jadi hubungan antara investasi dengan pendapatn nasional adalah positif, seperti yang ditunjukkan pada gambar 3-4 :



Kurva Investasi dan Pendapatan Nasional

Dalam gambar nampak bahwa naiknya pendapatan nasional dimana tingkat suku bunga tetap akan meningkat jumlah volume investasi. Investasi yang mula-mula dilakukan sebesar I_0 pada saat pendapatan nasional Y_0 , selanjutnya karena pendapatan nasional bertambah sebesar Y_1 mengakibatkan volume investasi juga meningkat sebesar I_1 .

2.5. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Dan Menentukan Investasi.

✓ Bagi seorang pengusaha atau investor keputusan untuk melakukan investasi tergantung pada tingkat keuntungan yang diharapkan dari investasi yang ditanamkan. Menurut Samuelson¹⁸ investasi yang dilakukan oleh perusahaan ditentukan oleh hasil penjualan, biaya dan harapan.

18. Samuelson, op.cit, hal 173.

Hasil penjualan (revenue). Suatu kegiatan investasi akan memberikan tambahan hasil penjualan bagi perusahaan bila perusahaan tersebut mampu menjual lebih banyak produk atau memproduksinya secara murah.

Sedangkan biaya investasi sangat berhubungan dengan biaya pinjaman. Biaya pinjaman inilah nanti yang akan dikenakan dengan suku bunga pinjaman (interest rate). Suku bunga pinjaman merupakan harga yang harus dibayar untuk pinjaman selama beberapa periode. Pada saat suku bunga turun, biaya investasi pun turun dan perusahaan-perusahaan akan membeli lebih banyak mesin, peralatan dan sebagainya. Jadi dapat dikatakan bahwa suku bunga merupakan unsur pokok dalam perekonomian karena unsur ini menentukan biaya investasi, sehingga menjadi faktor penentu penting atas investasi dan permintaan agregat.

Unsur penting lainnya yang berpengaruh dari segi biaya dalam keputusan investasi adalah pajak (dalam hal ini pajak penghasilan). Tinggi rendahnya pajak penghasilan digunakan oleh pemerintah untuk menghambat atau mendorong investasi di sektor swasta. Pada saat yang sama pemerintah juga merangsang investasi dengan apa yang disebut fasilitas pajak, masa bebas pajak ataupun subsidi. Fasilitas ini pernah diterapkan di Indonesia untuk merangsang penanaman modal asing.



✓ Sedangkan menurut Sadono Sukirno, faktor-faktor yang mempengaruhi dan menentukan investasi yang akan dilakukan adalah :¹⁹

1. Tingkat keuntungan investasi yang diramalkan akan diperoleh
2. Tingkat bunga
3. Ramalan mengenai keadaan ekonomi di masa depan
4. Kemajuan teknologi
5. Tingkat pendapatan nasional dan perubahannya
6. Keuntungan yang diperoleh perusahaan.

Berdasarkan teori kompensional klasik, investasi pada pokoknya berdasarkan pada teori produktivitas marginal dari faktor produksi modal. Menurut teori ini, besarnya modal yang diinvestasikan ditentukan oleh produktivitas marginalnya dibandingkan dengan tingkat bunga, sehingga investasi akan terus dilakukan bila produktivitas marginal dari investasi lebih tinggi dari pada tingkat bunga yang diterima bila seandainya modal itu didepositokan dan tidak diinvestasikan.

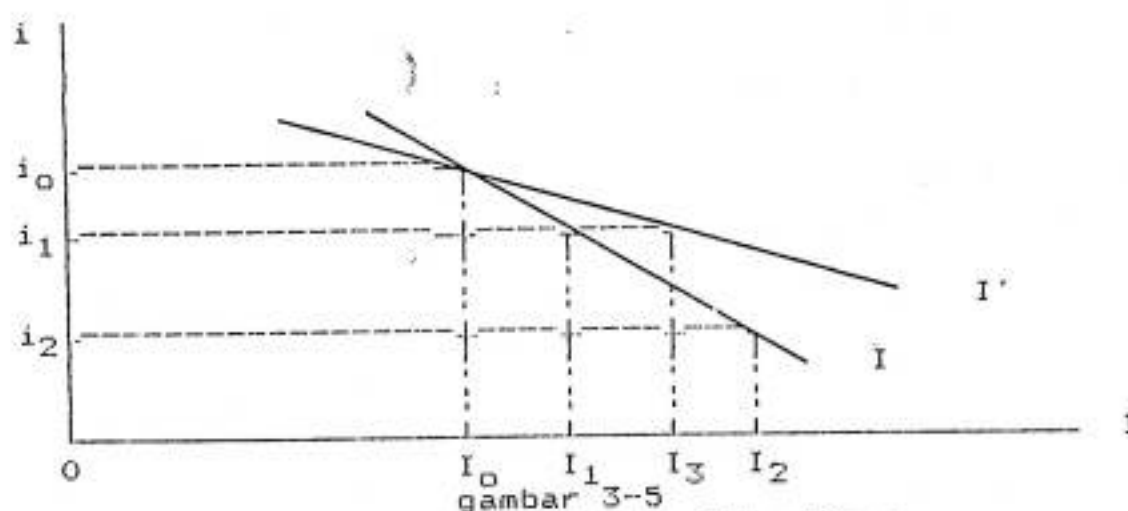
Selanjutnya dalam teori Keynes masalah investasi baik penentuan maupun kesempatan untuk melakukan investasi didasarkan pada perbandingan besarnya keuntungan

19. Sadono Sukirno, op.cit, hal 109.

dengan biaya yang akan dikeluarkan dari penggunaan dana modal.²⁰

Jadi suatu investasi akan dilakukan oleh seorang pengusaha atau investor pada keadaan marginal efisiensi dari investasi tersebut masih lebih besar dari biaya modal berupa tingkat bunga yang harus dibayar. Dengan demikian keputusan untuk melakukan investasi dipengaruhi oleh dua faktor utama yaitu tingkat suku bunga yang akan mempengaruhi biaya barang-barang modal dan keuntungan yang diharapkan dari investasi tersebut.

Secara umum hubungan antara investasi dengan tingkat suku bunga dapat dijelaskan dengan gambar 3-5 sebagai berikut :



Kurva Investasi dengan Suku Bunga

Dari gambar di atas dapat dilihat, mula-mula

20. Sobri, Ekonomi Makro I, BPFE UII, Yogyakarta, 1990, hal 143.

tingkat bunga sebesar i_0 dengan kurva I dan I' . Jumlah investasi yang akan dilakukan oleh para investor sebesar I_0 . Jika keinginan para investor untuk menanamkan modalnya pada berbagai tingkat suku bunga seperti ditunjukkan kurva I , maka turunnya tingkat bunga dari i_0 menjadi i_1 , agar para pengusaha dapat memperoleh keuntungan. Kemudian investasi juga bertambah dari I_0 menjadi I_1 namun demikian besarnya perubahan investasi sebagai akibat perubahan tingkat bunga bukan saja tergantung pada tingkat bunga itu sendiri, tetapi juga oleh kecondongan fungsi investasi. Semakin datar fungsi investasi semakin besar jumlah perubahan pada investasi seperti pada fungsi I' dimana berubahnya i_0 menjadi i_1 mengakibatkan perubahan pada I_0 menjadi I_3 .

Dalam laporan Bank Indonesia kerjasama dengan Fakultas Ekonomi Universitas Gajah Mada²¹, dikatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi keuntungan dari investasi dapat digolongkan atas dua yaitu faktor obyektif dan faktor subyektif.

√ Faktor-faktor obyektif yang mempengaruhi keuntungan yang diharapkan dari investasi adalah

21. Bank Indonesia Cab. Yogyakarta, Peluang Investasi di Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Rangka Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah, (kerjasama dengan PPE FE UGM), 1994, hal 18.

teknologi, harga relatif dari faktor produksi dan permintaan barang-barang yang akan datang. Jika para pembuat keputusan mengetahui faktor-faktor ini dengan pasti maka fungsi investasinya dapat ditentukan dengan mudah.

Dalam keadaan seimbang, faktor obyektif tersebut harus dapat ditentukan, karena tidak akan menyebabkan para pengusaha akan bertindak secara paradoksial tanpa pernah belajar dari pengalaman pahit (faktor subyektif). Dengan demikian kesamaan antara penghargaan subyektif dan kondisi obyektif dibatasi oleh ketidak- sempurnaan pengetahuan, resiko dan ketidak-tentuan yang selalu terdapat pada proses investasi. Karena itu tindakan yang didasarkan pada pengharapan atas faktor-faktor obyektif tersebut harus dipadu dengan ketidak- mampuan dalam menggunakan informasi secara sempurna sehingga perkiraan yang lebih baik dapat dihasilkan.

Selanjutnya terbatasnya sumber-sumber, baik tabungan yang tersedia untuk investasi maupun kemampuan untuk mengadakan investasi mengharuskan investor mengadakan pilihan diantara proyek-proyek.

Ahli-ahli ekonomi memberikan kriteria dan sasaran investasi khususnya bagi negara sedang berkembang sebagai berikut :

1. Investasi harus diarahkan pada penggunaan yang

- paling produktif sehingga rasio modal output kecil.
2. Investasi harus dilakukan pada proyek-proyek yang akan memanfaatkan tenaga kerja secara maksimum
 3. Proyek investasi harus diseleksi sehingga menghasilkan barang yang memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dan meningkatkan eksternal secara luas
 4. Proyek investasi adalah proyek yang dirancang paling banyak menggunakan bahan baku dalam negeri dan berbagai bahan penolong lainnya, proyek investasi tersebut harus diseleksi sehingga dapat memperbaiki distribusi pendapatan riil masyarakat
 5. Investasi harus diarahkan pada industri yang menghemat devisa, mengurangi beban neraca pembayaran dan memaksimalkan rasio barang modal terhadap investasi, karena sektor ekonomi saling berkaitan satu sama lain, maka investasi perlu diarahkan ke berbagai sektor sehingga sektor-sektor tersebut dapat berjalan secara serasi dan seimbang.

Disamping kriteria yang telah disebutkan di atas agar investasi yang akan dilaksanakan memperoleh keuntungan, maka hal ini dapat dianalisa dengan menggunakan kurva marginal efficiency of capital (MEC) dan kurva marginal efficiency of investment (MEI). Pengertian marginal efficiency of capital (MEC) dan marginal efficiency of investment (MEI) merupakan dua

konsep yang oleh beberapa ahli berusaha untuk membedakannya, tetapi ada pula teks yang tidak melakukan perbedaan antara kedua konsep tersebut. Menurut Soediyono bahwa teks yang tidak membedakan antara marginal efficiency of capital (MEC) dengan marginal efficiency of investment (MEI) adalah pada buku-buku dasar dengan maksud untuk menyesuaikan berat ringannya materi yang dibahas dalam teks tersebut.²²

Pada konsep MEC menunjukkan hubungan antara tingkat suku bunga dengan tingkat investasi dalam perekonomian tanpa memperhitungkan adanya perubahan harga-harga barang modal. Sedangkan pada konsep MEI menunjukkan hubungan antara tingkat suku bunga dengan tingkat investasi dalam perekonomian dimana harga-harga barang modal turut diperhitungkan. Marginal efisiensi investasi dapat diartikan sebagai pendapatan suatu barang modal yang akan diterima di kemudian hari selama barang tersebut masih beroperasi, kemudian selisih hasil penjualan dengan biaya yang dikeluarkan harus lebih besar.

Pertimbangan bagi seorang investor untuk melakukan investasi tergantung pada perbandingan antara kurva

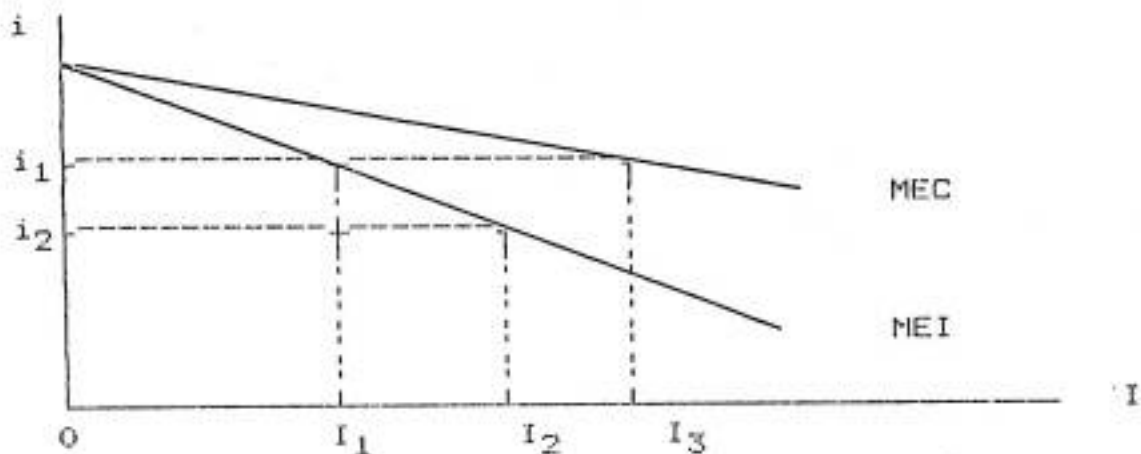
22. Soediyono R., *Ekonomi Makro (Analisa IS-LM dan Lintasan Penawaran Agregat)*, edisi ke-3, penerbit Liberty, Jakarta, 1985, hal 185.

MEI dengan tingkat bunga yang berlaku di pasar, sebagaimana yang ditunjukkan oleh kurva MEI dan kurva MEC.²³ Dengan kurva MEC dapat ditunjukkan bahwa jika terjadi perubahan dalam tingkat bunga, akan mengakibatkan perubahan dalam investasi yang ditanamkan. Oleh karena itu kurva MEC adalah negatif artinya bahwa investasi merupakan fungsi yang semakin menurun dari tingkat bunga.

Kenyataan menunjukkan jika terdapat perubahan pada tingkat suku bunga akan mengakibatkan perubahan pada tingkat barang modal. Hal ini terjadi karena dengan adanya penurunan tingkat bunga banyak pengusaha yang menginginkan untuk menanamkan modalnya melalui pembelian alat produksi yang baru, sehingga permintaan terhadap barang-barang modal naik yang akhirnya harga barang-barang itu juga naik. Inilah yang dimaksud dengan kenaikan harga sebagai akibat adanya permintaan yang kuat terhadap suatu produk, dimana pada akhirnya menambah biaya-biaya barang modal. Keadaan semacam ini akan membatasi tingkat investasi bagi para investor. Jika dianalisa kurva MEC dan MEI tersebut nampak bahwa mula-mula tingkat bunga sebesar i_0 menjadi i_1 rencana perusahaan untuk mengadakan investasi sebesar I_0 pada

23. T. F. Denburg, op.cit, hal 146.

skedul MEC, namun karena adanya kenaikan harga pada barang-barang modal sehingga tingkat investasi yang ditanamkan para pengusaha secara agregat tidak mengikuti kurva MEC. Kenyataan seperti inilah yang dicoba diperhitungkan oleh kurva MEI (gambar 3-6).



gambar 3-6

Kurva MEC dan Kurva MEI

Jadi kurva MEI lah yang mencerminkan skedul permintaan akan investasi yang relevan untuk seluruh perekonomian dengan slope negatif. Olehnya itu tingkat investasi dianggap sebagai fungsi menurun dari suku bunga dan dengan alasan inilah sehingga para ahli ekonomi menulis fungsi permintaan investasi sebagai fungsi dari suku bunga.

2.6. Tingkat Suku Bunga

2.6.1. Pengertian Tingkat Suku Bunga

Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang suku

bunga alangkah baiknya terlebih dahulu kita memahami apa yang dimaksud dengan suku bunga itu sendiri.

Menurut Samuelson, suku bunga adalah harga yang harus dibayar bank atau peminjam lainnya untuk memanfaatkan uang selama jangka waktu tertentu.²⁴

Syamsuddin Jafar dalam bukunya "Ekonomi Moneter" memberi pengertian sebagai berikut :

"Tingkat bunga adalah bunga atas penggunaan uang per unit waktu atau sewa atas penggunaan uang biasanya dinyatakan dalam persen (%) dalam waktu tertentu misalnya 1 bulan, 3 bulan dan 1 tahun."²⁵

Sedangkan Komaruddin memberi batasan sebagai berikut :

"Suku bunga itu adalah harga yang menyeimbangkan hasrat untuk menahan kekayaan dalam bentuk uang kas dalam jumlah yang tersedia."²⁶

Selanjutnya dikatakan bahwa :

"Tingkat bunga adalah balas jasa untuk pengorbanan konsumsi atas pendapatan yang dicapai pada masa sekarang."²⁷

24. Paul A. Samuelson dan William D. Norhaus, Ekonomi terjemahan A.G. Khalid, Edisi XII, Jilid 2, Jakarta, Erlangga 1986, hal 332.

25. Syamsuddin Jafar, Ekonomi Moneter, Teori Dasar Kebijakan, Analisa dan Kriteria, Yogyakarta, Kota Kembang, 1993, hal 95.

26. Komaruddin, Uang di negara Sedang Berkembang, Jakarta, Bumi Aksara, 1991, hal 309.

27. Winardi, Kamus Ekonomi, Inggris-Indonesia, dikutip dari buku Sloan dan Zurcher, Bandung, Alumni, 1984, hal 268.

Dan juga dikatakan bahwa :

"Bunga yang merupakan pendapatan yang diperoleh tetapi masih belum diterima atau dibayarkan."²⁸

Berdasarkan pada definisi yang telah dikemukakan para ahli di atas maka dapat disimpulkan bahwa bunga itu merupakan balas jasa yang diterima kemudian atas pengorbanan yang dilakukan atau dengan kata lain tingkat bunga adalah harga dari penggunaan uang atau dapat pula dipandang sebagai sewa atas penggunaan uang dalam jangka waktu tertentu.

2.6.2. Jenis dan Karakteristik Tingkat Suku Bunga

Menurut Samuelson, tingkat suku bunga dapat dibedakan atas dua yaitu :²⁹

1. Tingkat suku bunga nominal, yaitu tingkat suku bunga yang sudah memperhitungkan laju inflasi, contoh tingkat suku bunga yang berlaku 10 %, laju inflasi 8 % maka tingkat suku bunga nominal adalah $10\% + 8\% = 18\%$.
2. Tingkat suku bunga riil, yaitu tingkat suku bunga dikurangi tingkat inflasi, contoh tingkat suku bunga nominal 18%, tingkat inflasi 8% maka tingkat

28. K.H.Munansa, Kamus Istilah Ekonomi dan Pasar Modal, Jakarta, Arikha Media Cipta, 1995, hal 187.

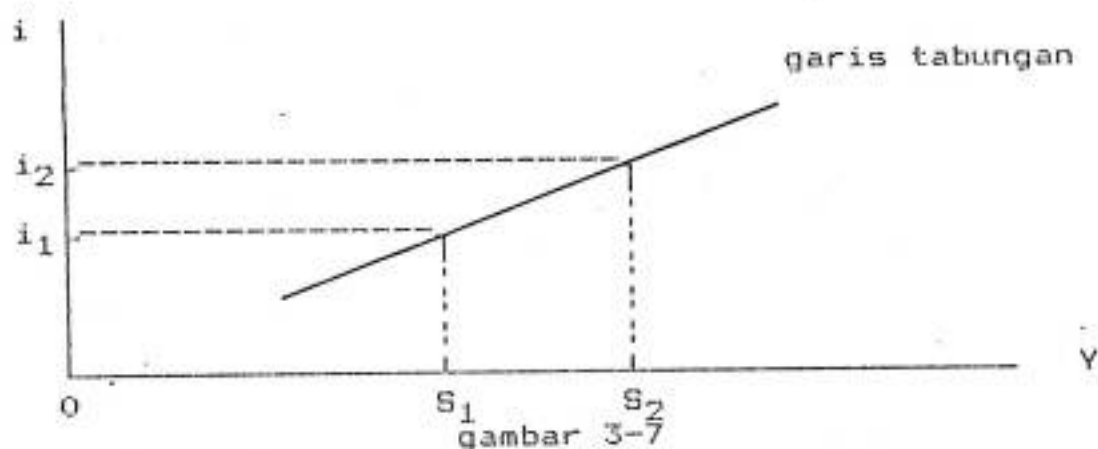
29. Samuelson, op.cit, hal 343.

suku bunga riil adalah $18\% - 8\% = 10\%$.

Sedangkan karakteristik tingkat suku bunga antara lain dapat dilihat pada :³⁰

a. Suku bunga dan deposito/tabungan

Dalam keadaan tingkat suku bunga tinggi, maka individu cenderung menabung atau mendeposikan uangnya di bank begitu pula sebaliknya.



Bunga dan Deposito/Tabungan

Dari gambar di atas dapat dilihat pada saat tingkat suku bunga i_1 maka tingkat tabungan/deposito sebesar S_1 , begitu tingkat bunga naik ke i_2 jumlah tabungan/deposito juga naik menjadi S_2 sehingga untuk kurva yang terjadi naik dari kiri ke kanan atas.

Dalam teori Keynes secara sederhana dirumuskan bahwa tabungan/deposito merupakan fungsi dari

30. Iskandar, op.cit, hal 47.

pendapatan (Y), dengan bentuk persamaan sebagai berikut :

$S = Y - C$, artinya tabungan merupakan bagian pendapatan yang tidak dikonsumsi. Namun dalam keadaan empiris tingkat tabungan sangat ditentukan oleh tingkat suku bunga dan pendapatan.

Jadi persamaanya dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$S = f (i, Y)$$

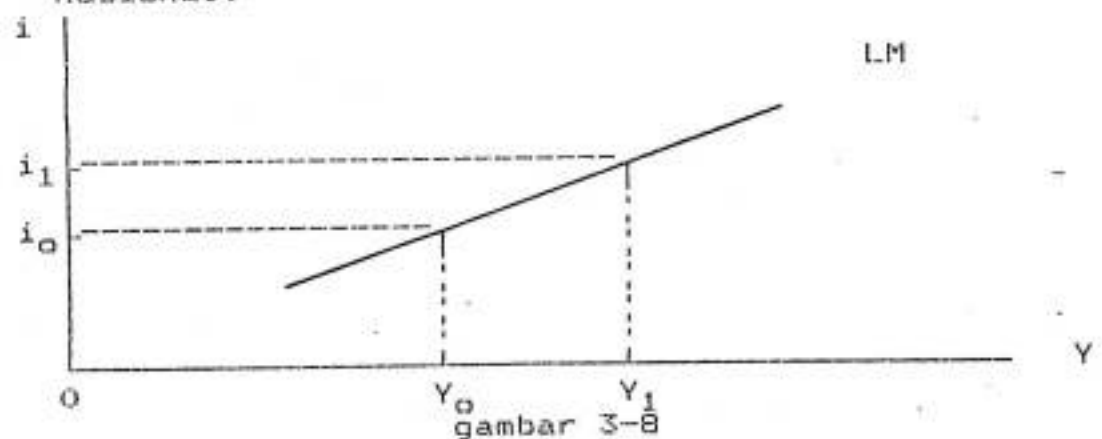
maksudnya besar kecil tabungan ditentukan oleh tinggi rendahnya tingkat suku bunga dan besar kecilnya pendapatan, jadi semakin tinggi tingkat suku bunga masyarakat cenderung menabungkan uangnya di bank begitu juga sebaliknya, bila tingkat suku bunga rendah masyarakat lebih senang memegang uangnya dalam bentuk tunai daripada menyimpannya di bank.

b. Suku Bunga dan Pasar Uang

Pada umumnya terdapat dua sisi perlakuan tingkat suku bunga yaitu tingkat bunga yang dihasilkan dari keseimbangan antara permintaan dan penawaran dana investasi dan tingkat bunga yang dihasilkan antara permintaan dan penawaran yang sebagai aktiva yang liquid, yang menurut Keynes dan para pengikutnya, sifat uang liquid dapat

berspekulasi di pasar uang guna memperoleh keuntungan. Dengan motif ini individu bersedia membayar suku bunga yang terjadi di pasar uang. Hal ini dapat dilihat pada kurva LM yang menggambarkan keseimbangan yang berlaku pada berbagai tingkat pendapatan nasional.

Menurut teori Keynes tingkat bunga ditentukan oleh permintaan dan penawaran uang dan salah satu faktor yang menentukan permintaan uang adalah pendapatan nasional yaitu semakin tinggi pendapatan nasional semakin tinggi permintaan uang untuk transaksi dan berjaga-jaga yaitu keseimbangan diantara permintaan dan penawaran uang sangat erat hubungannya dengan pendapatan nasional.



Kurva LM, Bunga dan Pendapatan Nasional

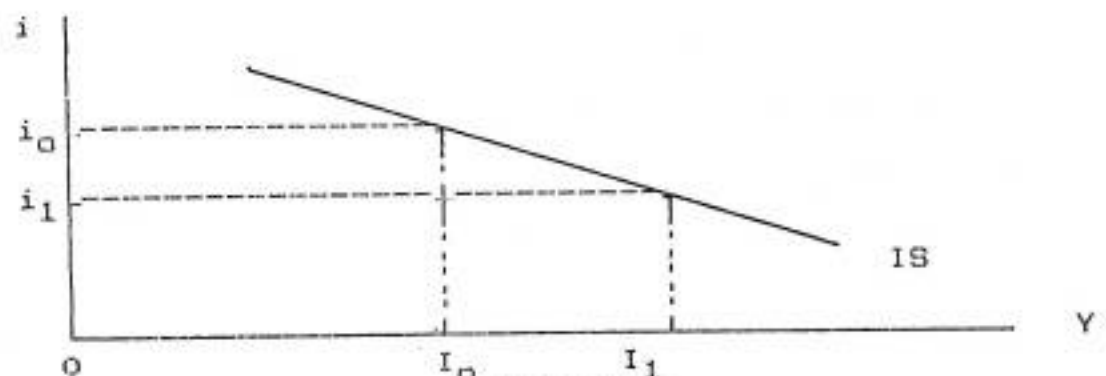
Dari gambar dapat dilihat akibat dari kenaikan dalam pengeluaran agregat, pendapatan

nasional bertambah dari Y_0 ke Y_1 , pertambahan pendapatan nasional tersebut mengakibatkan permintaan atas uang naik sebagai akibat kenaikan permintaan dalam bentuk transaksi.

c. Suku Bunga dan Pasar Barang (IS)

Bagi perusahaan kegiatan melakukan investasi ditentukan oleh beberapa hal diantaranya tingkat pengembalian modal dan tingkat bunga.

Semakin rendah tingkat suku bunga semakin banyak investasi dan keadaan ini akan meningkatkan keseimbangan perekonomian dan pendapatan nasional, ini berarti semakin rendah tingkat suku bunga semakin tinggi pendapatan nasional, seperti yang terlihat pada kurva IS :

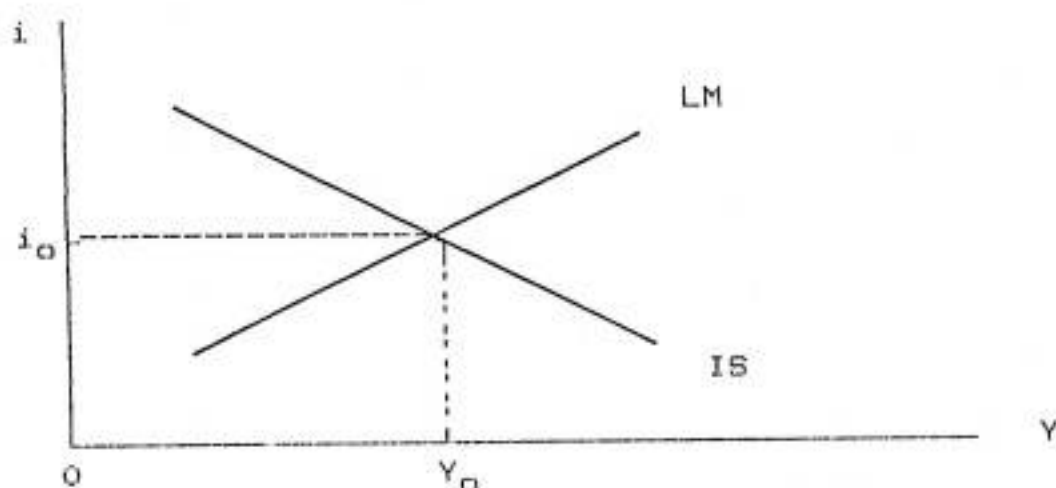


gambar 3-9
Kurva IS dan Suku Bunga

d. Keseimbangan Umum Tingkat Bunga, Pasar Barang dan Pasar Uang

Tingkat keseimbangan perekonomian secara umum

tercapai bila tingkat bunga memenuhi keseimbangan di pasar barang atau dana investasi dan terjadinya keseimbangan di pasar uang sebagai asset/aktiva liquid.



gambar 3-10

Keseimbangan Umum $IS=LM$, Suku Bunga

Dari gambar di atas, keseimbangan tingkat bunga terjadi saat sektor moneter dan sektor riil mencapai agregat ekuilibrium. Ini berarti keseimbangan terjadi pada perpotongan kurva IS dengan kurva LM seperti yang ditunjukkan gambar 3-10.

2.6.3. Penentuan Tingkat Suku Bunga

Menurut para ahli-ahli ekonomi tingkat bunga ditentukan oleh (1) Penawaran tabungan oleh rumah tangga dan (2) permintaan dana tabungan penanaman modal (investor). Pandangan ini telah menjadi salah satu alasan kepada keyakinan ahli-ahli ekonomi klasik

bahwa tingkat penggunaan tenaga kerja penuh selalu dicapai dalam perekonomian. Sedangkan menurut Keynes tingkat bunga ditentukan oleh permintaan dan penawaran uang.

Sedangkan di negara sedang berkembang menurut Komaruddin³¹, dalam pasar tak terorganisir tingkat bunga ditentukan oleh sejumlah variabel, baik variabel ekonomis maupun variabel institusional.

Penentuan tingkat bunga di negara sedang berkembang seperti yang dikemukakan Ghatak dilihat dari pihak penawaran dengan asumsi bahwa informasi mengenai tingkah laku permintaan amat sedikit. Dari pihak penawaran demikian tingkat bunga ditentukan oleh premi resiko, biaya administrasi, biaya alternatif dan tingkat kekuatan monopoli pelepas uang.

2.7. Teori Tingkat Suku Bunga

Sebenarnya analisa tentang suku bunga ini banyak diperbincangkan dan selalu merupakan perdebatan yang panjang. Yang menarik bagi ahli ekonomi diantaranya masalah tingkat bunga bagi jalannya proses kehidupan ekonomi. Akan tetapi selanjutnya Haberler membenarkan bahwa teori bunga telah lama merupakan suatu bagian yang lemah dalam ilmu pengetahuan ekonomi, uraian dan

31. Komaruddin, op.cit, hal 406.

penentuan dari tingkat bunga masih tetap menumbuhkan lebih banyak perbedaan paham diantara ahli-ahli ekonomi daripada setiap cabang teori ekonomi umum lainnya.³²

Perbedaan paham ini telah menumbuhkan aliran yang cukup banyak pula. Meskipun teori tingkat suku bunga itu banyak sekali tetapi dalam tulisan ini hanya akan dibahas teori-teori yang dianggap penting yaitu teori Klasik, Teori Neo Klasik, Teori Keynes dan teori yang dikemukakan oleh Hicks.

2.7.1. Teori Bunga Klasik

Menurut pendapat kaum teoritis Klasik tingkat bunga itu ditentukan oleh suatu persilangan antara kurva permintaan investasi dan kurva tabungan.

Dari analisa ini tidak dapat kita temukan pemecahan yang mungkin karena kita masih harus mengetahui bahwa kedudukan kurva tabungan masih bervariasi dengan tingkat pendapatan riil. Tabungan adalah fungsi pendapatan, bila pendapatan naik kurva tabungan akan bergeser ke kanan dan sebaliknya bila pendapatan turun.

Jadi dapat kita ambil kesimpulan bahwa kita tidak dapat mengetahui tingkat bunga yang terjadi,

32. Komaruddin, Analisa Moneter dan Management Keuangan Bandung, Alumni, 1975, hal 158.

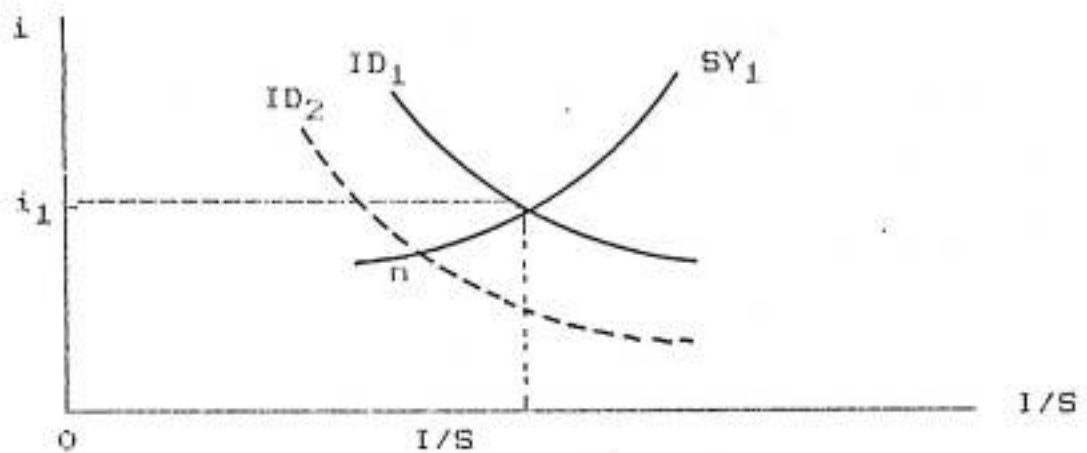
kecuali kita telah mengetahui tingkat pendapatan. Selanjutnya kita tidak mungkin mengetahui tingkat pendapatan sebelum kita mengetahui tingkat bunga. Jika terjadi penurunan dalam tingkat bunga berarti memperbesar volume investasi dan dengan demikian akan menaikkan pendapatan riil melalui proses multiplier.

John Maynard Keynes menolak teori bunga Klasik dengan dasar pendirian bahwa teori bunga tersebut tidak ada faktor yang menentukan, tetapi lebih ditentukan oleh faktor pendapatan.

Teori Klasik mengenai tingkat bunga ini hanya berlaku dalam hal-hal khusus saja dan tidak berlaku dalam keadaan umum. Teori Klasik berlaku dalam keadaan tingkat kesempatan kerja penuh yang tetap dan tingkat pendapatan yang tetap.

Dengan mengabaikan perubahan-perubahan dalam tingkat pendapatan, kaum klasik berjalan menuju ke arah kesalahan pandangan mengenai tingkat bunga sebagai faktor yang membawa suatu persamaan antara investasi dan tabungan.

Soal ini dapat kita lihat pada gambar 3-11, yang menunjukkan hubungan antara tingkat bunga pada sumbu y (vertikal) dan sumbu x (horizontal) tabungan dan investasi.



gambar 3-11
Kurva Investasi dan Tabungan

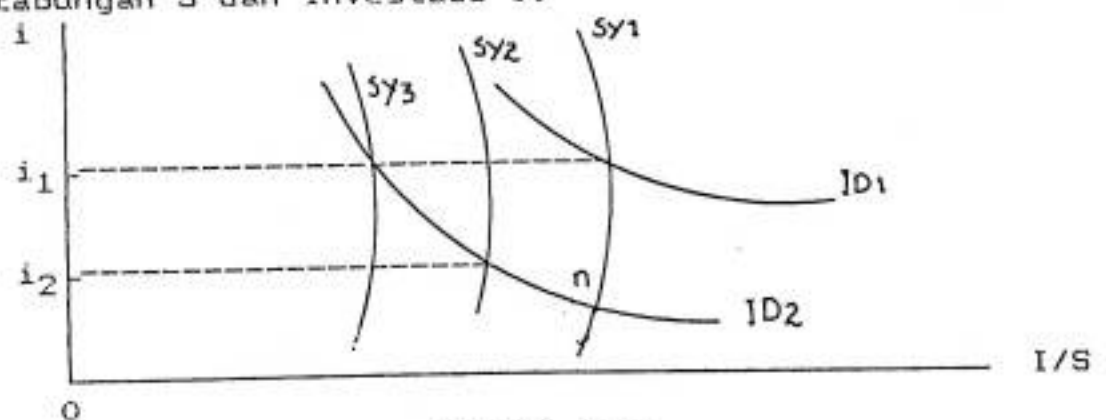
Tingkat bunga yang akan terjadi ditentukan oleh persilangan antara kurva penawaran tabungan SY_1 , dan kurva permintaan investasi ID_1 . Kurva permintaan akan investasi adalah kurva yang biasa disebut efisiensi batas dari kapital (MEC) dari teori Keynes.

Garis penawaran tabungan SY_1 melukiskan jumlah tabungan pada tingkat pendapatan Y_1 . Tingkat pendapatan ini menurut kaum Klasik menunjukkan tingkat pendapatan pada kesempatan kerja penuh.

Kekeliruan kaum Klasik dimulai pada pendapatan bahwa permintaan investasi ID dapat berubah tanpa mempengaruhi tingkat pendapatan. Sedangkan menurut pendapat Keynes bahwa turunnya kurva efisiensi batas daripada kapital juga akan mempengaruhi investasi untuk turun. Seterusnya penurunan dalam investasi akan mempengaruhi pendapatan Y , dan turunnya pendapatan akan menyebabkan tabungan juga turun.

Menurut kaum Klasik kurva permintaan investasi dapat bergeser yang menyebabkan kurva tabungan juga bergeser sehingga kita tidak dapat menentukan tingkat bunga yang akan terjadi dan kita juga tidak dapat menentukan bagaimana tabungan dan investasi itu akan terjadi.

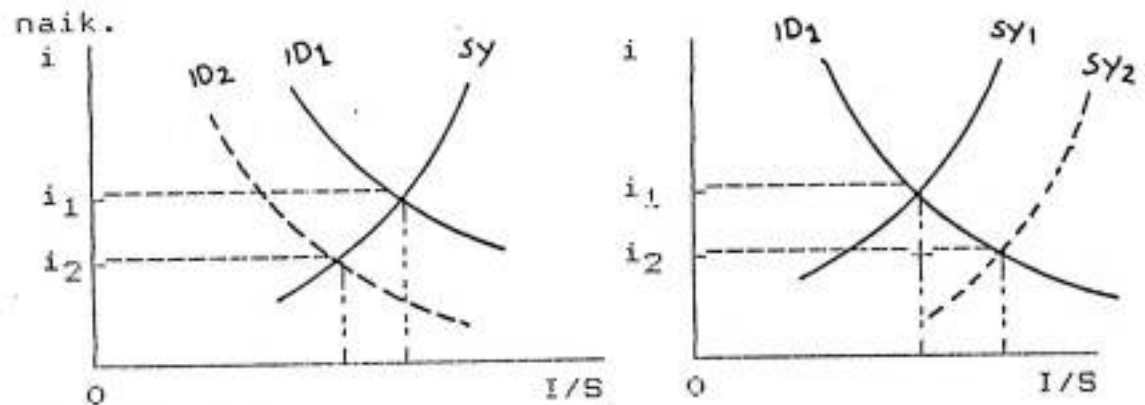
Pada gambar 3-12, dilukiskan jika tingkat bunga yang baru i_2 kurva tabungan yang bersangkutan SY_2 . Jumlah tabungan dan investasi ditentukan pada sumbu horizontal di bawah titik silang antara kurva permintaan investasi ID_2 dan penawaran tabungan pada suatu tingkat pendapatan SY_2 . Bila tingkat bunga tetap dalam kedudukannya tidak berubah pada titik i , karena preferensi likuiditas dan jumlah uang untuk motif spekulasi tidak berubah, maka kurva tabungan dari pendapatan yang bersangkutan SY_2' , dan titik pertemuan dengan kurva ID_2 akan menunjukkan jumlah tabungan S dan Investasi I .



gambar 3-12
Kurva Tingkat Bunga dan Perubahan Pendapatan

Titik n menunjukkan titik penyelesaian yang diberikan oleh teori Klasik. Kaum Klasik berpendapat bahwa pendapatan dan tabungan dari pendapatn itu tidak berubah jika tingkat investasi berubah. Dengan dasar ini kaum Klasik memandang tingkat suku bunga merupakan faktor penyeimbang yang menyamakan jumlah investasi dan tabungan, secara otomatis dengan mekanismenya sendiri.

Jika permintaan investasi turun maka suku bunga juga turun sehingga mengurangi penawaran tabungan, sebaliknya jika masyarakat menabung lebih banyak maka tingkat bunga turun sampai pada titik dimana investasi naik untuk menyesuaikan pada tabungan yang sudah naik.



gambar 3-13

Penurunan Investasi dan Peningkatan Pendapatan

Kenaikan dalam hasrat untuk menabung atau penurunan dalam permintaan untuk konsumsi diharapkan dikompensasi oleh kenaikan investasi dengan mekanisme tingkat suku bunga tersebut. Dan ini merupakan suatu

terjemahan lain bahwa tidak akan terjadi perubahan pendapatan secara keseluruhan atau kesempatan kerja secara keseluruhan apabila permintaan untuk konsumsi turun atau kenaikan dalam tabungan.

Tapi hendaknya kita menyadari bahwa penurunan dalam permintaan untuk barang-barang konsumsi malahan akan mengurangi permintaan bagi investasi daripada menaikkannya. Malah dari keterangan statistik terlihat bahwa konsumsi dan investasi bergerak bersamaan dan tidak memperlihatkan arah yang berlawanan, kecuali dalam keadaan perang dan sumber-sumber ekonomis mempunyai sifat kaku. Disinilah terdapat kelemahan pokok dari teori Klasik tetapi walaupun demikian sumbangan Klasik tidak boleh dilupakan begitu saja dari dunia ekonomi.

2.7.2. Teori Neo Klasik

Neo Klasik mengakui bahwa tingkat bunga dan tingkat pendapatan menentukan tingkat tabungan, tetapi kaum neo klasik juga mengatakan dalam keadaan teknik dan tingkat penduduk tertentu, tingkat bunga juga menentukan tingkat investasi.

Para investor untuk mencapai laba tertinggi harus terus menerus menambah barang-barang kapitalnya selama produktivitas penerimaan marginal yang didiskontir dari penambahan kesatuan barang kapital yang



terakhir masih lebih besar atau sama dengan biayanya. Pendapat kaum Neo Klasik berlaku dalam keadaan seperti :

1. Adanya perbaikan teknologi dengan tingkat penduduk yang tertentu pula dan
2. Adanya penambahan penduduk (tenaga kerja) dengan tingkat teknologi tertentu.

Kaum Neo Klasik dengan pengakuan bahwa terdapat kemungkinan bagi tenaga kerja untuk digantikan oleh kapital, mereka berusaha untuk meninggalkan dugaan klasik yang mengatakan bahwa produksi yang berdasarkan teknologi tertentu diperlukan perbandingan, yang tetap antara faktor modal dan tenaga kerja. Dengan demikian akumulasi modal bisa terjadi tanpa keharusan menambah jumlah tenaga kerja. Yang dimaksud dengan itu adalah suatu proses "capital deepening" yaitu proses penambahan jumlah modal untuk setiap satuan tenaga kerja.

Dengan perumpamaan adanya penambahan penduduk yaitu tenaga kerja pada suatu tingkat teknologi tertentu kaum Neo Klasik menganggap bahwa dengan penambahan penawaran tenaga kerja akan menyebabkan makin luasnya lapangan kerja, karena penawaran tenaga kerja yang bertambah akan menurunkan tingkat upah nominal.

Hal ini dapat dimengerti jika kita melihat anggapan Neo Klasik bahwa permintaan untuk keseluruhan adalah konstan walaupun tingkat upah nominal turun, karena itu produsen akan mengerjakan lebih banyak lagi para pekerja untuk menaikkan hasil-hasil produksi mereka dan laba.

Alat-alat kapital akan lebih banyak digunakan dan hal itu akan menaikkan produktivitas batasnya dan karenanya akan menaikkan permintaan terhadap barang-barang investasi. Tingkat bunga akan naik, tingkat investasi akan naik jika tabungan masih elastis terhadap kenaikan tingkat bunga. Proses penumpukan modal akan menuju pada suatu titik stasioner.

Perbaikan teknologi dengan suatu jumlah penduduk tertentu menyebabkan investasi naik sehingga permintaan terhadap barang-barang investasi naik pula. Tingkat bunga akan naik dan tingkat tabungan pun bertambah. Dengan demikian harga relatif bertambah yang disebabkan terbatasnya persediaan faktor yang dapat menghasilkan barang serupa.

Tingkat bunga dan harga relatif dari barang modal yang lebih tinggi merupakan suatu cara untuk mengatur pembagian dan pembatasan investasi yang hanya dapat ditunjukkan kepada hal-hal yang dapat menghasilkan lebih tinggi, walaupun proyek-proyek

hampir mendekati penyelesaian, tingkat bunga dan harga relatif dari barang-barang modal akan turun sehingga keuntungan dapat diperoleh. Tingkat bunga akan turun sampai pada suatu titik dimana masyarakat enggan untuk menabung dan akhirnya akumulasi modal berhenti sehingga kehidupan ekonomi sampai pada suatu titik stasioner.

Uraian di atas berdasarkan pada kesempatan kerja penuh dan anggapan bahwa persediaan uang tetap. Dan ahli ekonomi Neo Klasik terlalu memberi penekanan terhadap peranan tingkat bunga sebagai determinan investasi. Berbeda dengan ahli ekonomi modern yang cenderung meminimisasikan kepekaan investasi terhadap turun naiknya tingkat bunga, terutama tingkat bunga yang rendah.

7.3. Teori Bunga Keynes

Menurut Keynes bahwa bunga adalah semata-mata gejala moneter, oleh karena bunga merupakan pembayaran atas pinjaman.³³ Sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa kesempatan kerja tergantung kepada investasi sedangkan investasi dipengaruhi oleh marginal efisiensi kapital dan tingkat bunga. Bunga

33. Manullang, *Ekonomi Moneter*, Ghalia Indonesia, 1983, hal 105.

sebagai salah satu gejala moneter dimana tinggi rendahnya ditentukan oleh permintaan dan penawaran uang. Jadi menurut Keynes bunga ditentukan oleh permintaan dan penawaran uang. Permintaan uang lebih dengan "liquidity preference", dimana didasarkan pada motif yaitu motif transaksi, motif berjaga-jaga dan motif berspekulasi.

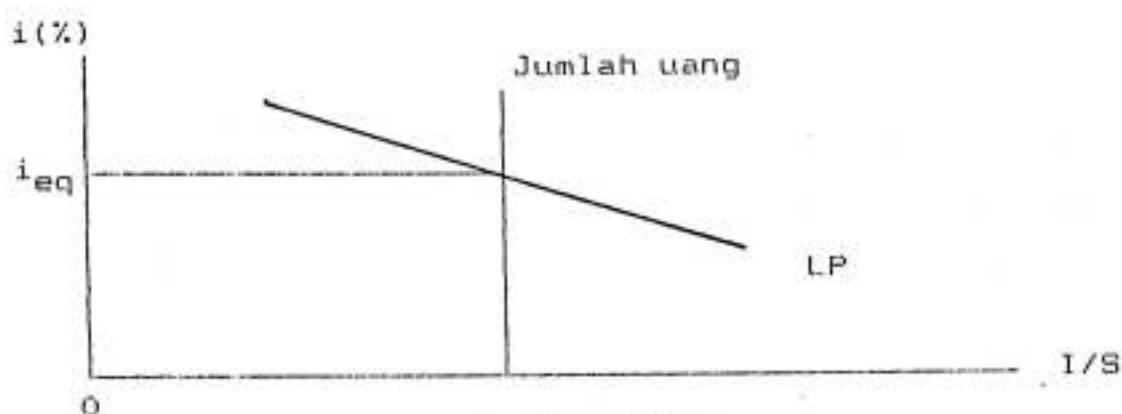
Keynes menekankan adanya hubungan langsung antara persediaan membayar tingkat bunga sebagai harga dari dana yang dipinjamkan dengan permintaan uang untuk tujuan spekulasi. Bila tingkat bunga rendah permintaan akan uang meningkat, sedangkan jika tingkat bunga tinggi maka permintaan akan uang turun. Seseorang ingin berspekulasi di pasar uang, maka mereka harus mempunyai uang tunai agar dapat memperoleh keuntungan. Dengan keuntungan ini orang bersedia membayar dengan harga tertentu bunga dalam memegang uang, dan keuntungan timbul karena ada ketidakpastian mengenai perkembangan tingkat bunga di masa akan datang dan harga surat berharga.

Keynes mengatakan bahwa hubungan antara tingkat bunga dengan permintaan uang adalah negatif

yang akan dijelaskan sebagai berikut :³⁴

1. Masyarakat mempunyai keyakinan adanya suatu tingkat bunga yang normal. Apabila tingkat bunga turun dibawah bunga normal maka orang percaya bahwa tingkat bunga akan kembali ke tingkat normal. Jika mereka memegang surat berharga pada waktu tingkat bunga naik, maka mereka akan menderita kerugian karena harga surat berharga akan turun. Untuk menghindari kerugian ini adalah dengan cara mengurangi surat berharga yang dipegang dan menggantinya dengan uang kontan yang dipegang pada waktu tingkat bunga naik. Hubungan demikian inilah yang dimaksud dengan motif spekulasi.
2. Dihubungkan dengan ongkos memegang uang kas, maka makin tinggi tingkat bunga ongkos memegang uang semakin besar, sehingga keinginan untuk memegang uang kas menurun. Sebaliknya jika tingkat bunga turun berarti ongkos memegang uang kas juga semakin rendah sehingga permintaan uang kas meningkat.

34. Nopirin, *Ekonomi Moneter*, Yogyakarta, BPFU-UGM, 1988, hal 73.



gambar 3-14
Tingkat Bunga Menurut Keynes

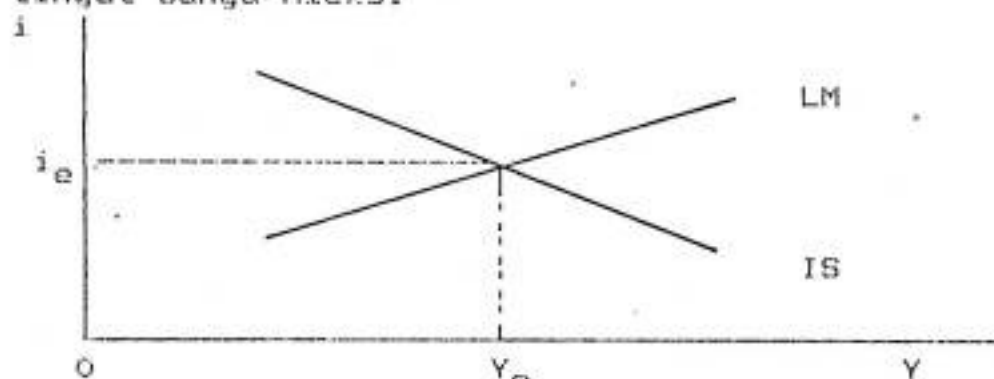
Tingkat bunga menurut Keynes, jika jumlah uang beredar tetap maka permintaan akan uang menentukan tingkat bunga. Dari gambar di atas keseimbangan terjadi pada saat jumlah uang diminta sama dengan yang ditawarkan. Bila tingkat bunga berada dibawah i_{eq} , masyarakat menginginkan uang kas yang lebih banyak melalui penjualan surat berharga yang mereka miliki.

7.4. Teori Bunga Hicks

Hicks mengemukakan teorinya bahwa tingkat bunga berada dalam keseimbangan pada suatu perekonomian bila tingkat bunga itu memenuhi keseimbangan sektor moneter dan sektor riil. Pandangan ini merupakan gabungan dari pendapat Klasik dengan pandangan Keynesian, dimana kaum Klasik mengatakan bahwa bunga timbul karena uang adalah produktif artinya bahwa bila seseorang memiliki dana maka mereka dapat menambah alat produksinya agar keuntungan yang diperoleh

meningkat. Jadi uang dapat meningkatkan produktivitas sehingga orang ingin membayar bunga. Sedangkan menurut Keynes bahwa uang produktif dengan metode spekulasi di pasar uang dengan kemungkinan memperoleh keuntungan dan keuntungan inilah sehingga orang ingin membayar bunga.

Alat analisis yang dipergunakan oleh Hicks dalam menjelaskan teorinya adalah kurva IS-LM seperti gambar 3-15 berikut yang menunjukkan keseimbangan tingkat bunga Hicks.



gambar 3-15
Kurva IS-LM dan Tingkat Bunga Hicks

Kurva IS menunjukkan tingkat bunga keseimbangan di sektor riil pada setiap pendapatan (Y). Sedangkan kurva LM menunjukkan tingkat bunga keseimbangan yang terjadi di pasar uang (sektor moneter) pada tingkat pendapatan nasional. Jadi pada gambar 3-15 nampak bahwa keseimbangan tingkat bunga tercipta pada saat perpotongan antara kurva IS-LM.

.8. Tingkat Inflasi

.8.1. Pengertian Inflasi

Ada cukup banyak definisi tentang inflasi, tetapi sampai sekarang belum diperoleh suatu definisi yang baku yang disetujui oleh seluruh ahli ekonomi. Berikut ini dikemukakan beberapa definisi tentang inflasi yang ada.

Definisi inflasi yang sering digunakan pada tahun awal setelah perang dunia II, yang diutarakan A.P. Lerner yang dikutip dari buku Hernanto Gunawan menyatakan bahwa :

"Inflasi adalah keadaan dimana terjadi kelebihan permintaan terhadap barang-barang dalam perekonomian secara keseluruhan."³⁵

Sedangkan menurut Samuelson, yang dimaksud dengan tingkat inflasi adalah :

"Kenaikan persentase tahunan dalam tingkat harga umum yang diukur berdasarkan indeks harga konsumen atau indeks harga lainnya."³⁶

Selanjutnya Syamsuddin Jafar mendefinisikan inflasi sebagai berikut :

"Inflasi merupakan suatu keadaan dimana terjadi peningkatan harga secara umum atau keadaan dimana terjadi penurunan dalam nilai uang."³⁷

35. Anton Hernanto Gunawan, Anggaran Pemerintah dan Inflasi di Indonesia, Jakarta, Graemedia, 1991, hal 1.

36. Samuelson, Ekonomi, Jilid I, op.cit, hal 523.

37. Syamsuddin Jafar, op.cit, hal 62.

Dari pengertian yang telah dikemukakan di atas yang dimaksud dengan inflasi adalah kenaikan harga secara umum yang dialami suatu negara dalam suatu tahun tertentu.

Biasanya inflasi digunakan untuk mengukur baik buruknya keadaan ekonomi dalam suatu negara. Perekonomian yang mengalami perkembangan yang pesat, inflasi yang rendah tingkatnya dinamakan inflasi merayap yang berkisar antara 2 sampai 4 persen. Sedangkan inflasi yang agak serius tingkatnya berkisar antara 5 sampai 10 persen atau sedikit lebih tinggi. Pada waktu peperangan atau ketidak stabilan politik, inflasi dapat mencapai tingkat yang sangat tinggi, yang bisa mencapai ratusan atau ribuan persen.

8.2. Faktor-Faktor Yang Menimbulkan Inflasi

Berdasarkan pada faktor-faktor yang menimbulkan inflasi dapat dibedakan atas dua jenis yaitu inflasi tarikan permintaan dan inflasi desakan biaya.³⁸

Inflasi tarikan permintaan terjadi apabila sektor perusahaan tidak mampu dengan cepat melayani permintaan masyarakat. Masalah kekurangan barang akan

38. Sadono Sukirno, Op.cit, hal 303.

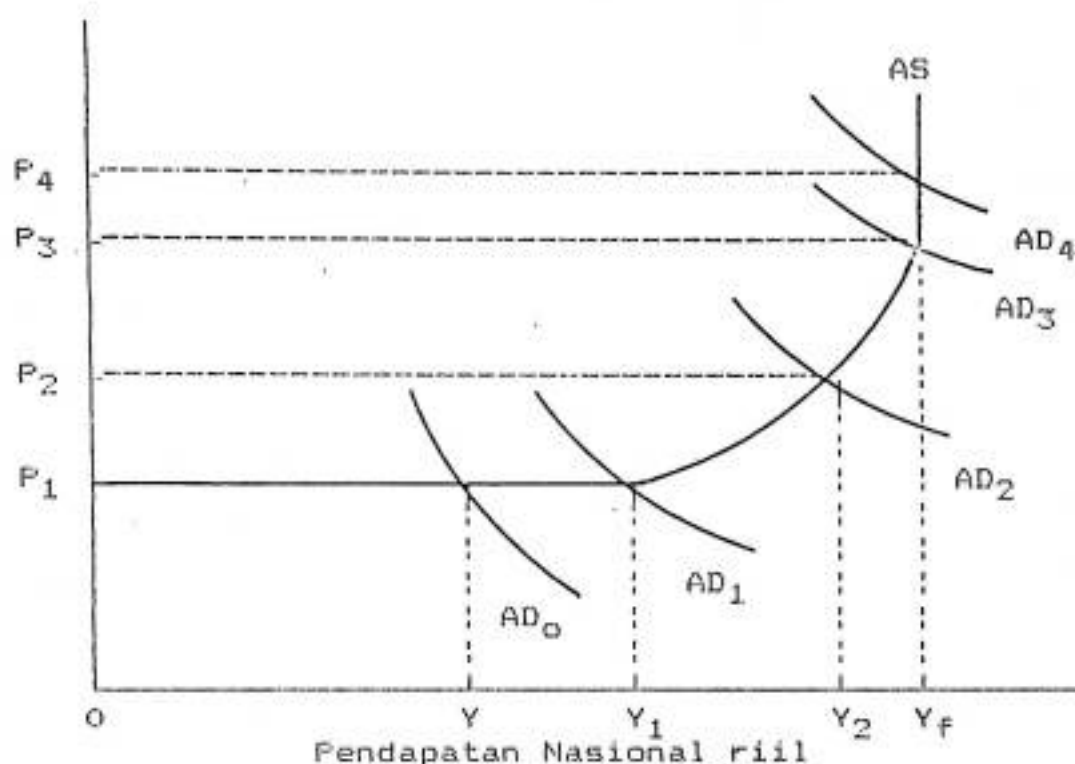
berlaku dan mendorong kenaikan harga. Inflasi jenis ini berlaku pada ketika perekonomian mencapai tingkat penggunaan tenaga kerja penuh dan pertumbuhan ekonomi berjalan dengan pesat. Dalam periode seperti ini permintaan masyarakat bertambah dengan pesat dan perusahaan pada umumnya beroperasi pada kapasitas yang maksimal. Kelebihan permintaan akan menimbulkan kenaikan harga.

Inflasi tarikan permintaan ini dapat dijelaskan dengan gambar 3-16. Kurva AS adalah kurva penawaran agregat yang berbentuk horizontal sampai pendapatan nasional Y_1 , menaik ke atas di antara pendapatan nasional Y_1 dan Y_f dan vertikal pada Y_f . Bentuk kurva AS yang sedemikian berarti : (1) sehingga pendapatan nasional Y_1 penawaran barang dalam perekonomian dapat di tambah tanpa meningkatnya harga, yaitu tetap sebanyak P_1 ; (2) di antara pendapatan nasional Y_1 dan Y_f penawaran hanya dapat ditambah pada harga yang lebih tinggi; dan (3) pada pendapatan nasional Y_f perekonomian tidak mampu lagi menambah penawaran barang.

Kurva AD_0 hingga AD_4 adalah kurva permintaan agregat, yang berbentuk menurun dari kiri atas ke kanan bawah. Bentuk kurva AD yang seperti ini berarti semakin rendah tingkat harga semakin banyak per-

belanjaan masyarakat. Keseimbangan pendapatan nasional dicapai apabila $AD=AS$. Berdasarkan syarat keseimbangan ini, pendapatan nasional adalah Y_0 apabila permintaan agregat AD_0 . Tingkat harga adalah P_1 . Pertumbuhan ekonomi akan menambah pendapatan masyarakat, dan pertambahan ini akan memindahkan permintaan agregat dari AD_0 ke AD_1 . Pendapatan nasional pada keseimbangan adalah Y_1 tingkat harga masih tetap P_1 karena perusahaan belum beroperasi pada kapasitas yang maksimal dan permintaan dapat dengan mudah dipenuhi.

Apabila pertumbuhan ekonomi selanjutnya meningkatkan lagi permintaan agregat yaitu menjadi AD_2 . Perusahaan-perusahaan telah mencapai kapasitas penuh dan sukar menaikkan produksi. Ini mendorong mereka untuk menaikkan harga. Pada pendapatan Y_2 harga telah naik menjadi P_2 . Pertambahan permintaan agregat selanjutnya yaitu menjadi AD_3 dan AD_4 akan menimbulkan kenaikan harga yang lebih cepat. Permintaan Agregat AD_3 mengakibatkan perekonomian mencapai tingkat penggunaan tenaga kerja penuh. Kenaikan permintaan agregat menjadi AD_4 tidak menambah pendapatan nasional yaitu tetap sebesar Y_f , tetapi harga meningkat dengan lebih cepat dan menjadi P_4 .



Gambar 3-16
Inflasi Tarikan Permintaan

Disamping dalam masa pertumbuhan yang pesat dan tingkat kegiatan ekonomi yang tinggi, inflasi tarikan permintaan dapat pula terjadi dalam masa perang atau ketidakstabilan politik. Dalam masa ini biasanya pemerintah membelanja jauh melebihi pendapatannya yang didapat dari pajak atau sumber lain. Oleh sebab itu pemerintah harus mencetak uang dan meminjam dari bank-bank umum dan lembaga keuangan lainnya. Pengeluaran pemerintah yang berlebih tersebut akan meningkatkan permintaan agregat dengan cepat. Apabila perusahaan-perusahaan tidak dapat melayani pertambahan permintaan tersebut inflasi tarikan permintaan

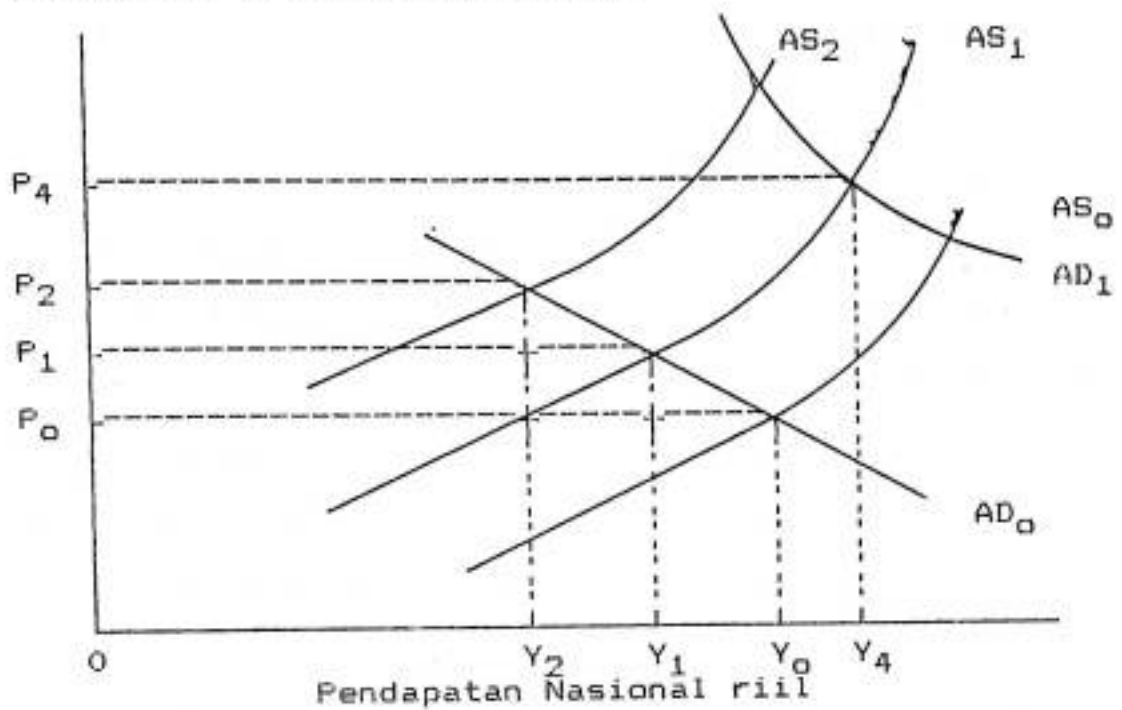


akan terjadi.

Sedangkan inflasi desakan biaya adalah masalah kenaikan harga dalam perekonomian yang diakibatkan oleh kenaikan biaya produksi. Pertambahan biaya produksi akan mendorong perusahaan-perusahaan menaikkan harga, walaupun mereka harus mengambil resiko akan menghadapi pengurangan dalam permintaan barang-barang yang diproduksinya. Inflasi desakan biaya ini dapat dijelaskan dengan menggunakan gambaran 3-17 sebagai berikut :

Kurva Ad_0 dan AS_0 masing-masing adalah kurva permintaan agregat dan kurva penawaran agregat yang pada mulanya wujud dalam perekonomian. Perekonomian mencapai keseimbangan pada pendapatan nasional Y_0 dan tingkat harga adalah P_0 . Selanjutnya dimisalkan dalam perekonomian berlaku kenaikan biaya produksi diberbagai perusahaan dan mendorong mereka untuk menaikkan harga barang yang mereka produksi. Tindakan ini akan memindahkan kurva penawaran agregat dari AS_0 menjadi AS_1 . Dengan demikian perekonomian negara akan mencapai keadaan keseimbangan yang baru yaitu pada pendapatan nasional Y_1 dan tingkat harga P_1 . Tingkat keseimbangan ini menunjukkan bahwa tingkat harga meningkat sebagai akibat kenaikan biaya produksi tetapi pendapatan nasional merosot. Pengurangan

pendapatan nasional akan mengurangi tingkat penggunaan tenaga kerja penuh.



Gambar 3-17
Inflasi Desakan Biaya

Apabila biaya produksi mengalami kenaikan lagi, penawaran agregat akan berpindah lagi ke atas yaitu menjadi AS_2 . Perubahan ini akan menaikkan lagi tingkat harga yaitu menjadi P_2 tetapi menurunkan produksi dalam nasional menjadi Y_2 . Dengan demikian kenaikan biaya produksi dalam perekonomian akan menimbulkan dua akibat buruk; inflasi berlaku dan tingkat produksi nasional maupun kesempatan kerja akan merosot. Peristiwa seperti ini dinamakan stagflasi yaitu stagnasi dalam perekonomian yang dibarengi oleh inflasi. Masalah seperti ini pernah

dialami oleh perekonomian dunia tahun 1970-an. Pada tahun 1973 harga minyak yang diekspor negara arab mengalami kenaikan sebanyak tiga kali lipat. Negara industri seperti negara-negara Eropah dan Amerika Serikat adalah pengimpor minyak terbesar. Kenaikan harga minyak menaikkan biaya produksi berbagai industri dan mendorong berlakunya inflasi desakan biaya yang serius yang diikuti pula oleh kemerosotan pendapatan nasional dan kesempatan kerja. Pada waktu itu kemerosotan kegiatan ekonomi dan masalah pengangguran adalah masalah paling buruk yang pernah dialami negara-negara industri sejak Perang Dunia Kedua.

Sering kali inflasi desakan biaya akan diikuti oleh kenaikan dalam permintaan agregat. Kenaikan harga-harga yang bersumber dari kenaikan biaya produksi biasanya akan mendorong para pekerja untuk menuntut kenaikan gaji untuk mengimbangi kenaikan biaya hidup. Kenaikan gaji yang berlaku akan menambah permintaan agregat. Kenaikan ini akan menimbulkan dua akibat: harga akan naik dan pendapatan nasional akan berkembang. Keadaan ini dapat dilihat dalam gambar 3-18. Perpindahan penawaran agregat dari AS_0 menjadi AS_1 dan seterusnya menjadi AS_2 , mendorong para pekerja menuntut kenaikan upah. Pendapatan yang bertambah akan menaikkan permintaan agregat dan

secara grafis ia digambarkan oleh perpindahan dari AD_0 menjadi AD_1 . Dengan demikian keseimbangan dicapai dalam perekonomian pada pendapatan nasional Y_4 dan tingkat harga P_4 . Keadaan ini menunjukkan tingkat harga lebih meningkat lagi, akan tetapi pendapatan nasional yang dicapai pada tingkat yang lebih tinggi dari yang awal (Y_0). Pendapatan nasional yang lebih tinggi akan mengurangi pengangguran.

Kerap kali inflasi desakan biaya berlaku ketika perekonomian hampir atau telah mencapai tingkat penggunaan tenaga kerja penuh, yaitu ketika perekonomian menghadapi masalah kekurangan pekerja. Kenaikan harga barang bersumber dari salah satu atau gabungan dari tiga faktor berikut : (1) para pekerja dalam perusahaan menuntut kenaikan upah, (2) harga bahan mentah yang digunakan perusahaan bertambah tinggi, dan (3) dalam perekonomian yang sedang mengalami perkembangan pesat pengusaha berusaha menaikkan margin keuntungan.

• Teori Inflasi

• 1. Teori Kuantitas Uang Sederhana

Secara sederhana, sebab terjadinya inflasi dapat diterangkan dengan menggunakan persamaan pertukaran menurut Irving Fisher yaitu $MV = PT$, dimana MV mencerminkan total pengeluaran uang untuk

barang dan jasa dan PT mencerminkan total penerimaan uang hasil penjualan barang dan jasa, dimana M jumlah uang beredar, V kecepatan peredaran uang dalam suatu periode, P tingkat harga rata-rata dan T jumlah transaksi yang terjadi selama periode tertentu.

Jumlah uang beredar dalam teori kuantitas sederhana, dianggap dapat diatur atau ditentukan oleh pemerintah melalui kebijaksanaannya, jadi dianggap sebagai variabel eksogen. Dalam kenyataannya atau menurut teori lain yang lebih kompleks, jumlah uang beredar ini tidak sepenuhnya dikontrol oleh pemerintah atau bank sentral, karena pengaruh peran sektor swasta dan sektor luar negeri di dalam perekonomian sehingga dianggap sebagai variabel endogen.

Asumsi yang paling penting dalam teori kuantitas uang ini adalah bahwa kecepatan peredaran uang tak bergantung yang berarti bahwa perubahan kecepatan peredaran uang tidak dipengaruhi oleh jumlah uang beredar. Fisher mengasumsikan besarnya transaksi permintaan uang ini konstan, tak terlalu bergejolak dari tahun ke tahun. Hal ini disebabkan oleh sifat dari faktor yang menentukan besarnya kecepatan peredaran uang yaitu mekanisme pembayaran upah atau gaji dan kebiasaan pola pengeluaran masyarakat yang relatif stabil atau tak berubah.

Sebenarnya disamping faktor di atas ada faktor lain yang mempengaruhi yaitu harapan atau perkiraan masyarakat serta institusi keuangan. Tingkat harga dalam teori ini dianggap sebagai residual yaitu merupakan variabel yang ditentukan oleh interaksi ketiga variabel lainnya. Teori ini mengasumsikan adanya fleksibilitas harga untuk bergerak naik turun, walaupun kenyataan memungkinkan adanya pasar tidak sempurna dalam bentuk kontrol harga oleh pemerintah atau hal lainnya.

2.9.2. Teori Moneteris dan Strukturalis

Golongan moneteris berpendapat bahwa inflasi sepenuhnya merupakan gejala moneter dan kontrolnya adalah melalui pengawasan atas jumlah uang beredar, sedangkan untuk menanggulangnya menurut golongan moneteris bahwa inflasi tak hanya berdasarkan kebijaksanaan moneter saja melainkan juga menggunakan kebijaksanaan fiskal. Oleh karena itu golongan moneteris disebut golongan fiskalis.³⁹

Sedangkan golongan strukturalis berpendapat bahwa adanya ciri struktural tertentu di dalam perekonomian negara berkembang dalam bentuk bottleneck struktural yaitu tidak elastisnya penawaran harga

39. Anton Hermanto Gunawan, op.cit, hal 11.

makanan, kekurangan devisa untuk mengimpor dari luar negeri dan kurangnya sumber-sumber keuangan dalam negeri, yang menyebabkan terjadinya inflasi. Cara mengatasi timbulnya inflasi adalah dengan menghilangkan bottleneck struktural tersebut.⁴⁰

Lebih lanjut golongan moneteris berpendapat inflasi dapat memberikan suasana yang tak sehat bagi pembangunan ekonomi, bahkan menjadi penghambat yang nyata sehingga untuk mencapai pembangunan ekonomi yang berhasil maka inflasi terlebih dahulu harus dilenyapkan.

Ekspansi moneter yang menyebabkan terjadinya inflasi harus dibatasi melalui kebijaksanaan fiskal dan moneter yang ketat sehingga terjadi kontraksi moneter yang berarti terjadinya pengurangan eksese demand. Dan kebijaksanaan fiskal dan moneter yang tepat justru akan dapat mengurangi ketegangan struktural yang ada. Di pihak lain golongan strukturalis berpendapat bahwa inflasi itu inheren dengan pembangunan dan memang diperlukan upaya untuk meniadakannya. Akan tetapi kalau usaha stabilisasi tersebut justru menyebabkan terhambatnya pembangunan.

40. Dudgeley G. Lucket, uang dan Bank, Jakarta, Erlangga 1983, hal 433.

maka mereka lebih setuju tetap membiarkan terjadinya inflasi, jadi bukan ekspansi moneter yang merupakan penyebab utama inflasi melainkan ketegangan struktural dalam masyarakat. Ekspansi moneter memang lebih mendukung cepatnya inflasi tetapi ekspansi moneter itu dihasilkan oleh struktur perekonomian yang ada. Dikatakan lebih lanjut bahwa program stabilisasi moneter tak akan menghilangkan inflasi tetapi justru menyebabkan terjadinya strategi dalam pembangunan sehingga mengatasi inflasi justru perlu membangun ekonomi yang akan mengubah struktur.⁴¹

9.3. Teori Inflasi Keynes

Menurut teori Keynes inflasi terjadi karena suatu masyarakat ingin hidup di luar batas kemampuan ekonominya. Proses inflasi menurut pandangan ini tidak lain adalah proses perebutan bagian rejeki di antara kelompok-kelompok sosial yang menginginkan bagaian yang lebih besar daripada yang bisa disediakan masyarakat.

Proses perebutan ini akhirnya diterjemahkan menjadi keadaan dimana permintaan masyarakat akan barang-barang selalu melebihi jumlah barang yang

41. A. Wardana, Inflasi dan Ketegangan-Ketegangan Struktural, hand out course PPN, FE-UI, Mei 1975 dikutip dari Anton Hermanto Gunawan.

tersedia (inflationary gap), hal ini timbul golongan masyarakat tersebut berhasil menterjemahkan aspirasi mereka menjadi permintaan efektif akan barang-barang. Dengan perkataan lain mereka berhasil memperoleh dana untuk mengubah aspirasi menjadi rencana pembelian barang-barang yang didukung dengan dana yang ada.

Golongan masyarakat seperti ini mungkin adalah pemerintah sendiri yang berusaha memperoleh bagian yang lebih besar dari output masyarakat dengan jalan menjalankan defisit anggaran belanja yang dibiayai dengan mencetak uang baru. Golongan tersebut mungkin juga pengusaha swasta yang ingin melakukan investasi baru dan memperoleh dana pembiayaannya dari kredit bank. Golongan tersebut bisa pul serikat buruh yang berusaha memperoleh kenaikan gaji yang melebihi kenaikan produktivitas buruh.

Bila jumlah permintaan efektif dari jumlah golongan tersebut pada tingkat harga berlaku melebihi jumlah maksimum dari barang-barang yang bisa dihasilkan masyarakat maka inflationary gap akan timbul, karena permintaan total melebihi jumlah yang tersedia, maka harga akan naik. Kenaikan harga inilah yang dikatakan dengan inflasi.

2.10. Teori Pertumbuhan Ekonomi

Teori pertumbuhan ekonomi merupakan suatu teori yang menjelaskan mengenai faktor-faktor apa yang menentukan output dalam jangka panjang dan bagaimana faktor tersebut berinteraksi antara yang satu dengan yang lainnya. Sehingga terjadi proses pertumbuhan.

Di dalam ilmu ekonomi terdapat banyak teori tentang pertumbuhan namun dari teori tersebut ada teori yang lengkap dan baku sifatnya. Hal ini disebabkan teori-teori yang dibangun oleh para ahli ekonomi banyak dipengaruhi oleh keadaan pada waktu mereka masih hidup, seperti ideologi yang mereka anut.

Beberapa pemikiran dari ahli ekonomi tentang pertumbuhan yang akan dibahas dalam penulisan ini adalah teori Klasik, Teori Schumpeter, Teori Harrod-Domar, teori Neo Klasik serta teori Nicholas Kaldor.

3.10.1. Teori Pertumbuhan Ahli Ekonomi Klasik⁴²

Menurut pandangan ahli-ahli Klasik ada empat faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yaitu jumlah penduduk, jumlah stok barang modal, luas tanah dan kekayaan alam serta tingkat teknologi yang digunakan. Walaupun banyak faktor yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi, ahli ekonomi Klasik lebih

42. Sadono Sukirno, op.cit, hal 430-432.

memfokuskan perhatian kepada pengaruh pertumbuhan penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi.

Dalam teori pertumbuhan mereka misalkan luas tanah dan kekayaan alam adalah tetap jumlahnya dan tingkat teknologi tidak mengalami perubahan. Selanjutnya berdasarkan ini dianalisa bagaimana pengaruh pertumbuhan penduduk kepada tingkat produksi dan pendapatan.

Menurut pandangan ahli-ahli ekonomi Klasik, hukum hasil lebih yang semakin berkurang akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, ini berarti pertumbuhan ekonomi tidak akan terus menerus berlangsung. Pada permulaannya, apabila penduduk sedikit dan kekayaan alam relatif banyak, tingkat pengembalian modal dan investasi yang dibuat adalah tinggi maka para pengusaha akan memperoleh keuntungan yang besar dan pertumbuhan ekonomi akan terwujud. Keadaan ini tidak akan terus menerus berlangsung apabila penduduk sudah terlalu banyak, pertumbuhannya akan menurunkan kegiatan ekonomi karena produktivitas marginal penduduk telah menjadi negatif maka kemakmuran masyarakat akan menurun kembali. Perekonomian akan mencapai tingkat perkembangan yang sangat rendah, apabila keadaan ini dicapai, ekonomi dikatakan telah mencapai keadaan tidak berkembang. Pada

keadaan ini pendapatan pekerja hanya mencapai tingkat cukup hidup (subsistensi).

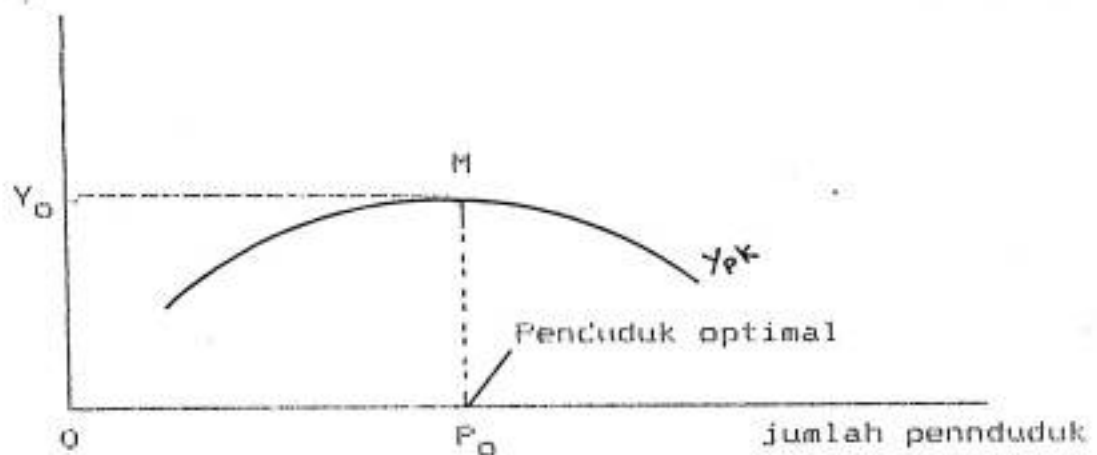
Menurut pandangan ahli ekonomi Klasik setiap masyarakat tidak akan mampu menghalangi terjadinya keadaan tidak berkembang tersebut, masyarakat hanya mampu mengundurkan terjadinya keadaan tersebut.

Berdasarkan kepada teori pertumbuhan Klasik yang baru diterangkan, dikemukakan suatu teori yang menjelaskan perkaitan diantara pendapatan per kapita dan jumlah penduduk. Teori dinamakan teori penduduk optimal. Pandangan yang terkandung dalam teori dijelaskan sebagai berikut:

• Apabila terdapat kekurangan penduduk, produksi marjinal adalah lebih tinggi daripada pendapatan perkapita, maka penambahan penduduk akan menaikkan pendapatan per kapita. Akan tetapi apabila penduduk sudah semakin banyak hukum hasil lebih yang semakin berkurang akan mempengaruhi fungsi produksi yaitu produksi marjinal, akan mulai mengalami penurunan. Oleh karenanya pendapatan nasional dan pendapatan per kapita menjadi semakin lambat pertumbuhannya.

Penduduk yang bertambah terus akan menyebabkan pada suatu jumlah penduduk yang tertentu produksi marjinal telah sama dengan pendapatan per

kapita. Pada keadaan ini pendapatan per kapita mencapai nilai maksimal. Jumlah penduduk pada waktu itu dinamakan penduduk optimal. Secara gambar teori penduduk optimal dapat ditunjukkan dalam gambar 3-18.



Gambar 3-18
Penduduk Optimal

Kurva Y_{pk} menunjukkan pendapatan per kapita pada berbagai jumlah penduduk, dan M adalah puncak kurva tersebut. Maka penduduk optimal adalah jumlah penduduk sebanyak P_o dan pendapatan perkapita yang paling maksimal adalah Y_o .

2.10.2. Teori Pertumbuhan Schumpeter

Teori pertumbuhan Schumpeter menekankan tentang pentingnya peranan pengusaha di dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi. Dalam teori itu ditunjukkan bahwa para pengusaha merupakan golongan yang akan terus menerus membuat pembaharuan atau

inovasi dalam kegiatan ekonomi.

Inovasi tersebut meliputi memperkenalkan barang-barang baru, mempertinggi efisiensi dalam memproduksi suatu barang, memperluas pasar suatu barang ke pasaran-pasaran baru, mengembangkan sumber bahan mentah yang baru dan mengadakan perubahan-perubahan dalam organisasi perusahaan dengan tujuan mempertinggi efisiensinya.

Di dalam mengemukakan teori perkembangannya Schumpeter memulai analisisnya dengan memisalkan bahwa perekonomian sedang dalam keadaan tidak berkembang. Tetapi keadaan ini tidak berlangsung lama. Pada keadaan tersebut berlaku segolongan pengusaha menyadari tentang berbagai kemungkinan untuk mengadakan inovasi yang menguntungkan. Didorong oleh keinginan memperoleh keuntungan dari mengadakan pembaharuan tersebut, mereka akan meminjam modal dan melakukan penanaman modal. Investasi yang baru ini akan meninggikan kegiatan ekonomi negara. Maka pendapatan masyarakat akan bertambah dan tingkat konsumsi menjadi bertambah tinggi. Kenaikan tersebut akan mendorong perusahaan-perusahaan lain untuk menghasilkan lebih banyak barang-barang dan melakukan penanaman modal baru.

Maka menurut Schumpeter, investasi boleh

dibedakan dalam dua golongan, penanaman modal otonomi dan penanaman modal terpengaruh. Penanaman modal otonomi adalah penanaman modal yang ditumbulkan oleh kegiatan ekonomi yang timbul sebagai akibat kegiatan investasi.

Menurut Schumpeter makin tinggi tingkat kemajuan sesuatu perekonomian makin terbatas kemungkinan mengadakan inovasi. Maka pertumbuhan ekonomi akan menjadi bertambah lambat jalannya. Pada akhirnya akan tercapai keadaan tidak berkembang atau *stationary state*. Akan tetapi berbeda dengan pandangan Klasik, dalam pandangan Schumpeter tingkat pembangunan yang tinggi (menurut pandangan Klasik tingkat tersebut dicapai pada waktu perekonomian telah berada kembali di tingkat pendapatan cukup hidup yaitu pada tingkat pendapatan yang sangat rendah).

2.10.3. Teori Pertumbuhan Harrod-Domar⁴³

Teori pertumbuhan yang dibangun oleh Harrod-Domar didasarkan pada pengalaman negara maju. Kedua ahli ekonomi ini pada hakekatnya berusaha untuk menunjukkan syarat yang diperlukan untuk pertumbuhan yang mantap, kemudian mereka sepakat untuk memberi

43. Jhingan, *op.cit*, hal 291.

peran kunci pada "investasi" dalam proses pertumbuhan ekonomi, karena dengan investasi akan dapat memberikan keuntungan ganda yaitu pertama investasi dapat menciptakan pendapatan dan yang kedua dapat memperbesar kapasitas produksi perekonomian. Yang pertama dapat disebut sebagai dampak permintaan dan yang kedua sebagai dampak penawaran dari investasi.

Asumsi-asumsi yang digunakan oleh Harrod-Domar dalam mencapai pertumbuhan yang mantap adalah:

1. barang modal telah mencapai kapasitas penuh
2. tabungan adalah proporsional dengan pendapatan nasional
3. rasio modal-produksi (capital output ratio) tetap dan
4. perekonomian terdiri dari dua sektor.

Dalam analisa teori Harrod-Domar menunjukkan bahwa, walaupun pada suatu tahun tertentu (misalnya tahun 1994) barang-barang modal sudah mencapai kapasitas penuh, pengeluaran agregat dalam tahun 1994 - yaitu $EA = C + I$ (pengeluaran agregat terdiri dari konsumsi dan investasi)- akan menyebabkan kapasitas barang modal menjadi semakin tinggi pada tahun berikutnya (1995). Dengan perkataan lain, investasi yang berlaku dalam tahun 1994 akan menambah kapasitas barang modal tahun 1995.

Dari penambahan kapasitas barang modal tersebut analisa Harrod-Domar mengemukakan:

"Apakah syarat yang perlu dipenuhi agar kapasitas barang modal yang bertambah itu akan sepenuhnya digunakan, artinya apakah syaratnya agar pada tahun berikutnya (1995) barang modal mencapai penuh kembali."

Dua hal yang perlu diketahui untuk memecahkan persoalan ini adalah :

1. Berapa besarnya penambahan barang modal pada tahun 1995 ? Karena teori menganggap rasio modal-produksi tetap, teori tersebut menyatakan penambahan kapasitas barang modal tergantung pada dua faktor yaitu rasio modal produksi itu sendiri (misalkan ia bernilai COR) dan investasi yang dilakukan pada tahun 1994 (misalkan ia bernilai I), penambahan kapasitas barang modal (Δc) dapat dinyatakan dalam persamaan :

$$\Delta c = \frac{I}{COR}$$

2. Keadaan yang bagaimanakah yang akan mengakibatkan penambahan pendapatan nasional (ΔY) sama dengan penambahan kapasitas barang modal (Δc) ?

Teori Harrod-Domar adalah perluasan dari analisis Keynes. Dengan demikian teori itu berpendapat bahwa kapasitas penuh pada tingkat berikut akan tercapai apabila pengeluaran agregat bertambah

dengan cukup besar sehingga tercapai keadaan $\Delta c = \Delta Y$.

Teori Keynes telah menerangkan apabila ada pertambahan pengeluaran agregat (misalkan I) maka pendapatan nasional bertambah sesuai dengan besarnya multiplier. Pertambahan pendapatan tersebut dihitung dengan persamaan

$$\Delta Y = \frac{1}{MPS} \Delta I$$

persamaan sekarang

$$i) \quad \Delta c = \frac{I}{COR}$$

$$ii) \quad \Delta Y = \frac{1}{MPS} \Delta I$$

$$iii) \quad \Delta c = \Delta Y$$

Dengan demikian

$$\frac{I}{COR} = \frac{1}{MPS} \Delta I \text{ atau}$$

$$\frac{\Delta I}{I} = \frac{MPS}{COR}$$

Persamaan di atas berarti tingkat kenaikan investasi ($\Delta I/I$) adalah sama dengan MPS/COR . Jika

$COR = 4$ dan $MPS = 0,20$ maka :

$$\frac{\Delta I}{I} = \frac{0,20}{4} = 0,05$$



perhitungan di atas menunjukkan investasi tahun berikutnya (1995) harus bertambah sebanyak 5 % dibandingkan tahun sebelumnya.

Dengan menggunakan pemisahan dari analisis teori Harrod-Domar dapat diterangkan tingkat pertumbuhan yang akan dicapai suatu negara yang terus menerus mencapai kapasitas penuh dalam menggunakan barang-barang modalnya. Pemisahan bahwa tabungan adalah proporsional dengan pendapatan nasional dapat diringkas menjadi persamaan :

$$S = MPS \times Y$$

Dalam perekonomian dua sektor keseimbangan dicapai apabila $S = I$.

Maka pada keseimbangan berlaku keadaan

$$I = MPS \times Y \text{ atau}$$

$$Y = \frac{I}{MPS}$$

dengan demikian tingkat pertumbuhan ekonomi dapat ditentukan dengan persamaan :

$$\frac{\Delta Y}{Y} = \frac{\frac{I}{MPS} \Delta I}{\frac{I}{MPS}}$$
$$\frac{\Delta Y}{Y} = \frac{\Delta I}{I}$$



persamaan di atas berarti pertumbuhan ekonomi sama tingkatnya dengan penambahan investasi. Dalam persamaan

$$\frac{\Delta Y}{Y} = \frac{MPS}{COR}$$

Dalam contoh dimana $MPS = 0,20$ dan $COR = 4$, tingkat pertumbuhan ekonomi adalah

$$0,20/4 = 5 \%$$

Dari penjabaran rumus yang telah dikemukakan Harrod-Domar di atas dapat dijelaskan bahwa investasi bagi pertumbuhan ekonomi adalah suatu hal yang mutlak dilakukan baik di negara maju maupun di negara berkembang seperti di Indonesia. Itulah sebabnya Harrod-Domar membangun teorinya mengenai pertumbuhan ekonomi dengan menekankan peranan yang lebih besar pada investasi.

2.10.4. Teori Pertumbuhan Neo Klasik

Menurut analisa Neo Klasik bahwa permintaan masyarakat tidak menentukan laju pertumbuhan ekonomi tapi pertumbuhan ekonomi tergantung kepada penawaran faktor-faktor produksi dan tingkat kemajuan teknologi.

Berdasarkan teori ini, yang dikembangkan oleh Abramavits dan Solow yang menyatakan dalam persamaan

$$Y = f(\Delta K, \Delta L, \Delta T)$$

dimana

Y = tingkat pertumbuhan ekonomi

ΔK = tingkat pertambahan barang modal

ΔL = tingkat pertambahan tenaga kerja

ΔT = tingkat pertambahan teknologi

Analisis Solow selanjutnya membentuk formula matematika untuk persamaan itu dan seterusnya membuat pembuktian secara matematika untuk menunjukkan kesimpulan sebagai berikut :

$$g = m \Delta K + b \Delta L + \Delta T$$

dimana

g = tingkat atau prosentase pertumbuhan ekonomi

m = produktivitas modal marginal

b = produktivitas tenaga kerja

Persamaan ini menyatakan tingkat pertumbuhan ekonomi tergantung kepada (1) Pertambahan modal dan produktivitas marginal, (2) Pertambahan tenaga kerja dan produktivitas tenaga kerja marginal dan (3) Perkembangan teknologi.

Contoh dari penggunaan rumus di atas adalah, misal $m = 0,25$ (artinya setiap 1000 rupiah pertambahan modal menghasilkan 250 rupiah pertambahan pendapatan nasional), $b = 0,75$ (artinya setiap tambahan tenaga kerja menghasilkan 75 % dari tingkat produksi pertambahan tenaga kerja) dan perkembangan produk-

tivitas sebagai akibat perkembangan teknologi adalah 5 %. Pertambahan barang modal dan tenaga kerja masing-masing 10 % dan 2 %. Dengan demikian tingkat pertumbuhan ekonomi adalah :

$$g = 0,25 (10) + 0,75 (2) + 5$$

$$g = 9 \%$$

angka di atas menunjukkan pertumbuhan ekonomi mencapai 9 % dan penyebabnya adalah 5 % diciptakan oleh perkembangan teknologi, 2,5 % disebabkan oleh pertambahan barang modal dan 7,5 % oleh pertambahan tenaga kerja.

Sumbangan terpenting dari teori pertumbuhan Neo Klasik bukanlah dalam menunjukkan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, tetapi kemungkinan menggunakan teori tersebut untuk mengadakan penyelidikan empiris untuk menentukan peranan sebenarnya dari berbagai faktor dalam menciptakan pertumbuhan. Dalam penyelidikan Abramovits dan Solow menunjukkan pertumbuhan ekonomi Amerika terutama disebabkan oleh perkembangan teknologi; di antara 80 hingga 90 persen dari pertumbuhan ekonomi Amerika di antara pertengahan abad kesembilan belas dan kedua puluh disebabkan oleh perkembangan teknologi.

Setelah itu beberapa ahli ekonomi lain melakukan penyelidikan yang sama sifatnya. Salah

satu studi yang terkenal adalah yang dilakukan oleh Denison, yang menganalisa faktor yang mengakibatkan perkembangan di negara maju di antara tahun 1950-1962. Kesimpulan studi tersebut adalah : pertambahan barang-barang modal hanya menciptakan 25 persen dari pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat, 18 % dari pertumbuhan ekonomi di Eropa Barat dan 21 % dari pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Inggris.

2.10.5. Teori Pertumbuhan Nicholas Kaldor⁴⁴

Dalam perkembangan pemikiran Kaldor mengenai masalah pertumbuhan ekonomi, perhatiannya ditujukan pada masalah konkrit yang berjalan dalam masa panjang, sekitar 50 tahun atau lebih.

Pandangan Kaldor tentang proses pertumbuhan ekonomi jangka panjang diarahkan pada pertumbuhan sektoral yang mencakup sektor produksi komoditi primer dan sektor sekunder (industri dan konstruksi). Sedangkan kegiatan di sektor tersier (jasa-jasa) oleh Kaldor dianggap sebagai fungsi dari perkembangan industri. Kaldor juga memandang pertumbuhan ekonomi dari sudut spasial atau regional.

44. Sumitro Djojohadikusumo, Perkembangan Pemikiran Ekonomi; Dasar Teori Ekonomi, Pertumbuhan dan Ekonomi Pembangunan, Jakarta, LP3ES, 1994, hal 49.

Menurut Kaldor peningkatan produktivitas tenaga kerja secara terus menerus memerlukan investasi yang berkenaan dengan mekanisme teknik produksi, yang berarti bertambahnya modal per tenaga kerja. Pertumbuhan industri dalam jangka panjang ditandai oleh meningkatnya hasil produksi per tenaga kerja (labour productivity), maupun meningkatnya modal per tenaga kerja (capitas labour ratio). Akan tetapi perubahan pada capital output ratio (nisbah modal terhadap hasil produksi) tidak begitu menonjol, menurut Kaldor investasi pada akhirnya bukan menjadi sebab bagi pertumbuhan produksi, melainkan sebaliknya pertumbuhanlah yang memungkinkan pergerakan investasi.

Perhatian Kaldor juga ditujukan kepada pola pertumbuhan industri ditinjau dari sudut lokasi spasial atau regional. Pola produksi primer oleh Kaldor menunjukkan pada timbulnya perbedaan pola dan laju pertumbuhan yang terjadi diantara berbagai kawasan dalam batas wilayah satu negara maupun secara regional dan internasional. Perbedaan yang dimaksud tidak makin berkurang malah cenderung menjadi besar sehingga menimbulkan ketimpangan kumulatif pada pertumbuhan ekonomi diantara berbagai pusat kegiatan baik sebagai fenomena daerah antar

daerah dalam wilayah negara maupun sebagai ketimpangan regional atau internasional. Hal ini menurut Kaldor bersangkutan paut dengan apa yang disebut sebagai "cumulative causation", sebab musabab yang cenderung mengandung dampak kumulatif luas bagi pola pertumbuhan ekonomi di antara kawasan-kawasan kegiatan dalam satu negara maupun di antara kelompok-kelompok negara.

BAB III METODOLOGI

3.1. Daerah Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang perumusan masalah pokok dan model analisis maka wilayah yang akan diteliti adalah Negara Indonesia.

3.2. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

Dalam penulisan ini prosedur pengumpulan data sebagai berikut :

a. Penelitian Pustaka

Penelitian Pustaka adalah penelitian yang dilakukan di perpustakaan dengan tujuan untuk mendapatkan keterangan-keterangan data yang bersifat teori, dari buku-buku, majalah-majalah, makalah-makalah, koran-koran yang ada hubungannya dengan pembahasan skripsi ini.

b. Penelitian Lapangan

Penelitian yang dilakukan guna melengkapi data-data yang diperoleh berupa data sekunder seperti bahan dokumentasi (laporan dan sebagainya) dari instansi-instansi dan dinas-dinas yang ada hubungannya dengan penulisan.

Selanjutnya data yang digunakan dalam penulisan ini adalah data yang bersifat kuantitatif dan kualitatif, yang meliputi :

a. Data Kuantitatif

Data ini berupa data time series dari tahun 1984 sampai tahun 1994, terdiri dari data investasi berupa investasi dalam negeri (PMDN), investasi asing (PMA), tingkat suku bunga kredit investasi, tingkat inflasi, dan pertumbuhan ekonomi.

b. Data Kualitatif

Data ini diperoleh dari hasil studi kepustakaan dan berbagai artikel yang berguna bagi analisa pembahasan masalah penulisan ini.

3.3. Kerangka Analisis

Untuk menganalisa pengaruh PMDN dan PMA tahun lalu, tingkat bunga, tingkat inflasi serta pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia selama tahun 1984-1994, maka langkah-langkah yang dilakukan penulis adalah :

- Langkah I : Mengidentifikasi data tiap tahun dari masing-masing variabel, kemudian disusun dalam bentuk regresi linear berganda.
- Langkah II : Mengestimasi nilai parameter-parameter dari model persamaan yang telah disusun berdasarkan metode Ordinary Least Square.

Langkah III : Mencari nilai-nilai :

- a. Korelasi (R) untuk mencari keeratan dan arah hubungan antara variabel terikat dan variabel bebas.
- b. Determinasi (R^2) untuk melihat besarnya proporsi nilai variabel terikat yang ditentukan oleh nilai variabel bebas.
- c. Melakukan uji t untuk mengetahui tingkat keyakinan dari masing-masing koefisien regresi terhadap variabel terikat. Apabila nilai t hitung lebih besar dari nilai T tabel berarti H_0 ditolak dan H_1 diterima dan sebaliknya dengan tingkat signifikansi 5 %.
- d. Melakukan pengujian secara simultan diantara hubungan variabel-variabel bebas terhadap variabel terikat dengan menggunakan uji F . Apabila nilai F hitung lebih besar dari nilai F tabel berarti H_0 ditolak dan H_1 diterima dan sebaliknya dengan tingkat signifikansi 5 %.

5.4. Model Analisis

Untuk mengetahui pengaruh PMDN, PMA, tingkat suku bunga, tingkat inflasi terhadap pelaksanaan investasi di Indonesia selama tahun 1984-1994, maka model yang digunakan dalam penulisan ini adalah :

$$I_t = f (PMDN_{t-1}, PMA_{t-1}, i_t, \pi_t) \dots\dots\dots (1)$$

a. Secara teoritis diprediksikan ada beberapa variabel yang mempengaruhi investasi seperti yang ditunjukkan oleh model di atas, dimana hubungan variabel tersebut adalah :

$$\frac{\delta I_t}{\delta PMDN_{t-1}} < 0, \quad \frac{\delta I_t}{\delta PMA_{t-1}} < 0, \quad \frac{\delta I_t}{\delta i_t} < 0, \quad \frac{\delta I_t}{\delta \pi_t} < 0$$

Dari fungsi di atas dapat dibuat persamaan sbb:

$$I_t = a_0 + a_1 PMDN_{t-1} + a_2 PMA_{t-1} - a_3 i_t - a_4 \pi_t + e \dots (2)$$

dimana :

I_t = Investasi pada tahun t

$PMDN_{t-1}$ = Penanaman Modal Dalam Negeri tahun lalu

PMA_{t-1} = Penanaman Modal Asing tahun lalu

i_t = Tingkat suku bunga kredit tahun t

π_t = Tingkat Inflasi tahun t

a_0 = Konstanta

a_1, a_2, a_3, a_4 = Parameter-parameter yang ditaksir

e = Error term

Oleh karena data yang digunakan perubahannya sangat tidak beraturan, maka supaya nilai koefisien-koefisien dalam model tersebut menunjukkan nilai elastisitas terhadap investasi, maka rumus di atas ditulis dalam bentuk ln regresi yaitu :

$$\ln I_t = a_0 + a_1 \ln \text{PMDN}_{t-1} + a_2 \ln \text{PMA}_{t-1} - a_3 \ln i_t - a_4 \ln \pi_t + e \dots\dots\dots (3)$$

Model di atas digunakan oleh penulis untuk membuktikan hipotesis yang telah diajukan.

Diharapkan hubungan antara Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing tahun lalu mempunyai hubungan positif dengan investasi tahun sekarang yang berarti investasi (PMDN,PMA) tahun lalu berbanding lurus dengan investasi tahun sekarang. Diharapkan juga tingkat suku bunga kredit dan tingkat inflasi berhubungan negatif dengan pelaksanaan investasi yang berarti hubungan yang bertolak belakang antara tingkat suku bunga kredit dan inflasi dengan investasi yang dilaksanakan.

Untuk mengetahui pengaruh investasi terhadap pertumbuhan ekonomi maka model yang digunakan adalah :

$$G_t = f (\text{PMDN}_{t-1} , \text{PMA}_{t-1}) \dots\dots\dots (4)$$

b. Secara teoritis diprediksikan ada beberapa variabel yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi seperti yang ditunjukkan oleh model di atas, dimana hubungan

variabel tersebut adalah :

$$\frac{\delta G_t}{\delta \text{PMDN}_{t-1}} < 0, \quad \frac{\delta G_t}{\delta \text{PMA}_{t-1}} < 0$$

dari fungsi di atas dapat dibuat persamaan sebagai berikut :

$$G_t = \beta_0 + \beta_1 \text{PMDN}_{t-1} + \beta_2 \text{PMA}_{t-1} + e \dots\dots\dots (5)$$

dimana :

- G_t = Pertumbuhan ekonomi pada tahun t
- PMDN_{t-1} = Penanaman Modal Dalam Negeri tahun lalu
- PMA_{t-1} = Penanaman Modal Asing tahun lalu
- β_0 = Konstanta
- β_1, β_2 = Parameter-parameter yang ditaksir
- e = Error term

Karena data yang akan digunakan perubahannya sangat tidak beraturan, maka supaya nilai koefisien-koefisien dalam model tersebut menunjukkan nilai elastisitas terhadap pertumbuhan ekonomi, maka rumus di atas ditulis dalam bentuk ln regresi, yaitu :

$$\ln G_t = \beta_0 + \beta_1 \ln \text{PMDN}_{t-1} + \beta_2 \ln \text{PMA}_{t-1} + e \dots (6)$$

Sama pada model (1), model (4) juga digunakan oleh penulis untuk membuktikan hipotesis yang telah diajukan. Diharapkan hubungan antara Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing tahun lalu mempunyai hubungan positif dengan pertumbuhan ekonomi,

artinya peningkatan dalam investasi (PMDN, PMA) juga mengakibatkan naiknya pertumbuhan ekonomi.

5. Batasan-Batasan Variabel

Investasi adalah Penanaman Modal Dalam Negeri dan (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) yang bersifat penanaman modal langsung.

Tingkat suku bunga nominal adalah tingkat Suku bunga yang sudah disesuaikan dengan tingkat inflasi yang diambil dari tingkat suku bunga kredit investasi.

Inflasi adalah kenaikan harga secara umum yang diambil dari indeks harga konsumen (IHK).

Pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan dari Produk Domestik Bruto yang dihitung berdasarkan harga konstan.

5.6. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- BAB I : Merupakan bab pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian serta hipotesis.
- BAB II : Bahasan teori yang berhubungan dengan investasi dan pertumbuhan ekonomi, berupa pengertian investasi, teori investasi, faktor yang mempengaruhi investasi, teori tingkat suku bunga, teori inflasi serta teori pertumbuhan

ekonomi.

BAB III : Metodologi penelitian yang meliputi daerah penelitian, prosedur pengumpulan data dan pengolahan data, kerangka analisis, model analisis, pembatasan variabel dan sistematika pembahasan.

BAB IV : Merupakan pembahasan hasil pengujian empiris.

BAB V : Merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB IV
INVESTASI DAN PENGARUHNYA TERHADAP PERTUMBUHAN
EKONOMI INDONESIA PERIODE 1984-1994

4.1. Gambaran Umum Perkembangan Ekonomi Indonesia

Perjalanan pembangunan ekonomi Indonesia selama PJPT I (Pembangunan Jangka Panjang Tahap I) 1969/70 - 1993/94, telah memperlihatkan hasil yang mengembirakan. Hal ini tampak dari semakin meningkatnya peranan perdagangan Internasional dalam kegiatan perekonomian Indonesia, sehingga perkembangan ekonomi dunia khususnya dari kelompok negara maju, telah sangat berpengaruh pada perkembangan ekonomi kita.

Perkembangan perekonomian dunia telah berlangsung sejak tahun 1970-an. Salah satu perubahan struktural perekonomian dunia adalah ditinggalkannya sistem nilai tukar tetap pada awal tahun 1970-an, yang berkembang menjadi sistem nilai tukar mengambang yang kita kenal sekarang ini. Selain itu, pada pasar komoditi terjadi kenaikan yang tajam pada harga minyak bumi serta fluktuasi komoditi lain. Semua ini berpengaruh pada perekonomian bangsa-bangsa termasuk Indonesia. Selain implikasinya, perekonomian nasional sangat tergantung pada minyak bumi. Namun pada tahun 1980-an harga minyak bumi mengalami penurunan tajam, yang membawa dampak yang tidak menguntungkan pada perekonomian Indonesia. Keadaan ini diperburuk oleh gejolak nilai tukar mata

uang utama dunia yang menyebabkan peningkatan utang luar negeri Indonesia.

Adanya gejolak tersebut telah mendorong pemerintah untuk melakukan langkah-langkah kebijakan penyesuaian, dengan senantiasa mendorong kondisi perekonomian nasional agar selaras dengan perubahan yang terjadi, mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan, serta memanfaatkan daya saing perekonomian nasional terhadap semakin meningkatnya ketidakpastian dan persaingan dalam perekonomian. Langkah-langkah penyesuaian tersebut meliputi aspek makro mikro maupun sektoral.

Di sektor finansial, langkah penyesuaian dimulai dengan kebijakan 1 Juni 1983, yang memberikan kebebasan kepada perbankan untuk menetapkan kebijakan suku bunga dan perkreditannya. Kebijakan ini selanjutnya diikuti oleh serangkaian kebijakan lainnya, yaitu reformasi struktural kelembagaan pada Oktober 1988, reformasi sistem perkreditan pada Januari 1990, penetapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan bank pada Pebruari 1991, serta perbaikan aspek hukum perbankan pada Maret 1992, disamping itu beberapa penyesuaian juga dilakukan untuk meningkatkan efisiensi pasar modal.

Sejalan dengan langkah tersebut, kebijakan deregulasi juga ditempuh di sektor riil, baik yang menyangkut perdagangan maupun produksi dan investasi.

Di bidang perdagangan langkah-langkah diarahkan untuk mendukung strategi yang berorientasi ke luar, antara lain dengan mengurangi hambatan tarif dan non tarif dalam ekspor impor dan perdagangan dalam negeri. Sementara upaya di bidang investasi diarahkan untuk mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif.

Sejalan dengan perkembangan-perkembangan tersebut perekonomian Indonesia tumbuh secara mengesankan yaitu rata-rata di atas 6 persen per tahun dalam PJPT I. Jumlah orang miskin pun merosot tajam dari sekitar 60 juta jiwa atau 40 persen dari jumlah penduduk tahun 1970 menjadi 25,9 juta jiwa atau 14 persen pada tahun 1993. Sedangkan pendapatan per kapita Indonesia juga mengalami peningkatan. Pada tahun 1960 baru mencapai US\$ 77 menjadi US\$ 570 pada tahun 1992. Dan pada akhir REPELITA VI pendapatan per kapita diharapkan sudah bisa mencapai US\$ 1000 bahkan akhir PJPT II diperkirakan bisa mencapai US\$ 2600.

Struktur perekonomian juga telah bergeser ke arah yang lebih seimbang, dengan sektor industri yang semakin kuat dan didukung oleh sektor pertanian yang semakin tangguh. Bila periode sebelumnya sumbangan sektor pertanian dalam Produk Domestik Bruto lebih 50 persen maka pada tahun 1993 telah turun menjadi 18 persen. Rendahnya pertumbuhan sektor pertanian yang

rata-rata 3,6 persen dan tingginya pertumbuhan sektro industri yang mencapai 12,4 persen per tahun telah mempercepat terjadinya pergeseran.

Meskipun kontribusi sektor pertanian terhadap PDB cenderung menurun, namun secara absolut produksi pertanian secara keseluruhan meningkat. Dicanangkan program intensifikasi dan ekstensifikasi khususnya tanaman padi telah berhasil membawa bangsa Indonesia ke posisi swasembada beras sejak tahun 1984. Produksi perkebunan yang menyolok kenaikannya selama periode 1968-1994 adalah kakao dan kelapa sawit. Produksi kakao naik lebih 200 kali lipat dan kelapa sawit 22 kali lipat.

Meningkatnya pertumbuhan dan peranan sektor industri sangat erat kaitannya dengan kebijakan pemerintah di dalam menciptakan iklim usaha yang semakin kondusif. Jumlah perusahaan industri yang berskala besar dan sedang selama 20 tahun terakhir (1975-1994) naik rata-rata 4,2 persen pertahun dan jumlahnya diperkirakan lebih dari 19000 perusahaan pada tahun 1994.

Disamping sektor pertanian dan industri, sektor Pertambangan juga menaikkan peranan yang penting dalam perekonomian nasional. Secara garis besar sektor ini dibagi dua yakni pertambangan minyak dan gas (migas)

jan pertambangan non-migas. Pada PELITA II dan III yang lalu lebih dari separuh devisa ekspor dan penerimaan dalam negeri berasal dari migas. Dalam kurun waktu 15 tahun terakhir (1980-1994) produksi migas yang terdiri dari minyak tanah mentah, kondensat dan gas bumi terus meningkat. Di antara yang mencatat kenaikan tertinggi adalah gas bumi yakni rata-rata hampir 26 persen per tahun. Hasil pertambangan non-migas yang tinggi kenaikan produktivitasnya adalah batu bara, dengan kenaikan sebesar 45 persen pertahun. Peranan batu bara belakangan ini semakin penting karena direncanakan untuk digunakan sebagai alternatif dalam upaya menghemat minyak bumi yang semakin tipis persediaanya.

Sebagai negara yang menganut sistem perekonomian terbuka kegiatan ekspor dan impor sangat berperan dalam menunjang pembangunan ekonomi. Sejak PELITA I neraca perdagangan Indonesia selalu mengalami surplus kecuali beberapa tahun tertentu. Hal ini berhubungan sekali dengan ekspor migas yang selalu meningkat, sampai PELITA IV penerimaan dari migas naik dari 50 persen menjadi 76 persen namun sejak turunnya harga minyak bumi peranannya terus menurun hingga tahun 1994 tinggal 24 persen. Sebaliknya peranan ekspor non-migas meningkat hingga mencapai 76 persen pada tahun 1994.

Meningkatnya pertumbuhan ekspor telah diikuti

pula oleh pertumbuhan impor. Hal ini tidak dapat dihindari karena untuk memenuhi permintaan bahan baku dan barang modal untuk produksi dalam negeri yang sebagian besar masih didatangkan dari luar negeri. Menjelang dimulai PELITA I tahun 1968 impor barang modal dan bahan baku tercatat masing-masing 26,5 persen dan 36,3 persen selebihnya 37,2 persen adalah impor barang konsumsi. Pada tahun 1994 impor bahan baku dan barang modal meningkat lebih 95 persen. Sedangkan barang konsumsi semakin kecil yaitu kurang 5 persen. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan promosi ekspor telah membuah hasil seperti yang diharapkan.

Sedangkan kalau dilihat laju pertumbuhan ekonomi cenderung mengalami kenaikan walaupun pada beberapa tahun tertentu mengalami penurunan. Kecenderungan pertumbuhan ekonomi yang meningkat selama ini berkat keberhasilan pemerintah mengendalikan laju inflasi yang diukur dari perubahan indeks harga konsumen (IHK). Untuk 10 tahun terakhir ini tingkat inflasi nasional dapat dipertahankan pada tingkat 1 digit, bahkan tahun 1992 ditekan sampai dibawah 5 persen walaupun pada tahun berikutnya naik kembali secara tajam.

Disamping laju inflasi yang dapat dikendalikan, tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi juga ditentukan oleh tingkat investasi yang memadai. Dalam tahap awal

ELITA I tingkat investasi rata-rata pertahun 15 persen dari produk nasional, sedangkan dalam tahap PELITA V rata-rata investasi pertahun sudah mencapai 23 persen dari produk nasional. Hal ini sejalan dengan semakin baiknya kondisi perekonomian nasional, yang juga didukung oleh membaiknya keadaan eksternal negara-negara industri yang menjadi mitra dagang Indonesia seperti Amerika Serikat, beberapa negara Eropah Barat dan Jepang. Kondisi perekonomian nasional yang mantap ini menjadi landasan yang kuat untuk perkembangan tahun selanjutnya.

Perkembangan Investasi

Sudah menjadi pengetahuan kita bersama bahwa kegiatan pembangunan merupakan hasil daripada kegiatan investasi. Kegiatan investasi itu sendiri pada hakekatnya adalah kegiatan pendayagunaan sumber daya yang tersedia baik sumber daya alam dan manusia maupun sumber modal dan teknologi. Oleh karena pertumbuhan ekonomi hanya dapat dicapai dengan cara mendayagunakan sumber daya alam, manusia, modal dan teknologi maka cepat atau lambatnya pertumbuhan ekonomi tergantung pada tinggi rendahnya kegiatan investasi.

Dalam upaya meningkatkan investasi di Indonesia dan agar keberadaan investasi itu dapat berlaku

efektif maka telah dikeluarkan dan diberlakukan undang-undang penanaman modal. Undang-undang pertama adalah Undang Undang No. 6 tahun 1968 Jo. Undang Undang No. 12 tahun 1970, tentang Penanaman Modal Dalam Negeri dan Undang Undang No. 1 tahun 1967 Jo. Undang Undang No. 11 1970 tentang Penanaman Modal Asing. Kedua Undang Undang ini menawarkan paket intensif (perangsang) berupa fiskal dan bea yang bertujuan untuk menarik investor. Kebijakan ini juga diikuti dengan berbagai penyederhanaan prosedur perizinan penanaman modal, kemudahan memperoleh kredit, penyederhanaan DSP (Daftar Skala Prioritas) yaitu sistem pajak dan pengurusan dokumen keluar masuknya barang di pelabuhan.

Untuk memajukan dan memperlancar proses investasi tersebut maka bulan juni 1973 pemerintah mendirikan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Untuk lebih mendayagunakan BKPM dalam menarik investasi pada tanggal 13 Maret 1985 dikeluarkan Keppres No. 35/1985 tentang fungsi dan susunan BKPM. Pada tanggal 1 April 1985 dikeluarkan Surat Keputusan Ketua BKPM No. 10/1985 tentang permohonan persetujuan dan fasilitas penanaman modal. Tahun berikutnya (1986) dikeluarkan peraturan tentang PMA (paket Mei 1986) yang intinya adalah pemilikan saham nasional

oleh PMA untuk sektor-sektor prioritas, pada tahap awal diizinkan sebesar 5 persen kemudian 20 persen setelah 6 tahun beroperasi, serta jangka waktu investasi adalah 30 tahun. Perusahaan PMA akan diberikan status PMDN jika 75 persen total sahamnya dimiliki orang Indonesia atau 51 persen saham nasional dan 20 persen diperdagangkan di bursa efek. Kebijakan ini disusul dengan Paket Oktober 1986 yang memberikan peluang perusahaan PMA untuk membeli perusahaan lokal dengan ketentuan 20 persen saham dimiliki perusahaan domestik, perusahaan PMA diperbolehkan untuk memperoleh kredit ekspor sama dengan investor dalam negeri serta kesempatan untuk menggunakan fasilitas SWAP serta memperoleh izin untuk bertindak sebagai pengatur pemasaran ekspor.

Ketentuan lain adalah Paket Desember 1987 yang intinya adalah kewajiban perusahaan PMA yang mengalihkan sebagian besar sahamnya ke tangan investor nasional dengan jangka waktu diperpanjang dari 10 tahun menjadi 15 tahun atau diperpanjang lagi dengan 5 tahun. Jika 100 persen produknya untuk ekspor, 95 persen perusahaan PMA diperbolehkan memiliki usaha perusahaan tanpa kewajiban untuk mengalihkan ke tangan investor nasional. Untuk melengkapi kebijakan PMA, telah dikeluarkan Instruksi Mendagri No. 20

tahun 1986 tentang penertiban pengaturan daerah dalam rangka meningkatkan ekspor non migas dan penanaman modal serta Instruksi Mendagri No. 21/1986 tentang upaya mendorong ekspor non migas dan memperlancar penanaman modal di daerah.

Kebijaksanaan PMA tersebut disempurnakan lagi dengan Keppres No. 21/1989 yang ditetapkan tanggal 5 Mei 1989 tentang DNI (Daftar Negatif Investasi) sebagai pengganti DSP (Daftar Skala Prioritas). DNI ini memuat 75 bidang usaha yang tertutup bagi investasi. Kemudian pelanggaran persyaratan minimum investasi bagi PMA dari US \$ 1 juta menjadi US \$ 25 ribu yang ditetapkan secara selektif, serta peluang bagi PMA untuk berinvestasi pada bidang usaha yang semula tertutup bagi PMA dengan ketentuan untuk mengikut sertakan koperasi sebagai penunjang saham minimal 5 persen dari keseluruhan modal perusahaan.

Kebijakan ini disusul dengan kebijakan 23 Oktober 1993 atau dikenal dengan Pakto 23 yang memberi wewenang lebih besar kepada PEMDA DATI II dalam masalah pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan izin melakukan usaha serta izin lokasi.

Sedangkan paket kebijakan yang baru dikeluarkan adalah Paket 19 Mei 1994 yang dikenal dengan sebutan PP No. 20/1994. Paket ini banyak ditentang karena

memperbolehkan investor asing memasuki bidang industri yang selama ini dianggap strategis dan menguasai kebutuhan rakyat banyak seperti telekomunikasi, penerbangan, air minum, kereta api dan media massa.

4.1.1.1. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)

Perkembangan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dari tahun 1984-1994 mengalami fluktuasi seperti yang terlihat pada tabel IV.1. Pada tahun 1984 jumlah PMDN yang telah disetujui sebanyak 145 proyek dengan nilai Rp 2.109,0 milyar, mengalami kenaikan pada tahun berikutnya menjadi 245 proyek dengan nilai Rp 3.736,2 milyar atau mengalami kenaikan sebesar 77 persen. Walaupun pada tahun 1985 ini terjadi kelesuan ekonomi di Indonesia dengan turunnya tingkat pertumbuhan ekonomi dari 7 persen menjadi 2,5 persen, namun hal tersebut tidak menurunkan minat investor lokal menanamkan modalnya.

Sementara itu pada tahun 1986 meskipun terjadi kenaikan dari segi jumlah dan nilai investasi tetapi dari segi pertumbuhan mengalami penurunan menjadi 18 persen.

Tabel 4.1 Perkembangan Persetujuan Penanaman Modal Dalam Negeri di Indonesia tahun 1984-1994.

TAHUN	PROYEK	NILAI (Rp MILYAR)	PERTUMBUHAN (%)
1984	145	2.109,0	-
1985	245	3.736,2	77
1986	315	4.411,5	18
1987	570	10.449,6	137
1988	843	14.201,8	36
1989	863	19.593,5	28
1990	1.324	56.510,5	188
1991	804	41.077,9	-27
1992	436	29.341,7	-29
1993	548	39.450,4	34
1994	823	53.289,4	35

Sumber : Statistik Ekonomi - Keuangan Indonesia, BI berbagai edisi, data diolah.

catatan :

1. Diluar sektor minyak dan gas, lembaga keuangan non bank, asuransi, dan sewa guna usaha.
2. Angka tahunan adalah jumlah proyek baru + alih status, sedang nilai investasi adalah investasi dari proyek baru + perluasan + alih status.
3. Angka diperbaiki.

Untuk meningkatkan iklim investasi yang lebih sehat lagi, pemerintah pada tanggal 6 Mei 1986 mengeluarkan paket kebijakan yang mengizinkan PMA memiliki saham nasional yang kemudian diikuti oleh paket kebijakan 24 Desember 1987 yang memberi kebebasan pada investasi tanpa dikenakan pajak.

Hasilnya, pada tahun 1987, PMDN meningkat secara drastis menjadi 570 proyek dengan nilai Rp 10.449,6 Milyar atau naik sebesar 137 persen. Sedangkan kegiatan investasi terbesar terjadi pada bidang industri. Untuk tahun 1987 mengalami kenaikan hampir 200 persen dari Rp 1.842,3 milyar menjadi Rp 5.518,1 milyar. Bagian terbesar dari bidang industri ini terjadi pada industri kimia dan farmasi yang bernilai Rp 2.084,1 milyar atau sekitar 38 persen dari nilai investasi pada sektor industri lihat tabel 4.2.

Jika dilihat dari penyebaran lokasi investasi PMDN yang terbanyak terjadi di Jawa dan Madura dengan nilai total Rp 5.723,3 milyar atau 56 persen, sedangkan sisanya tersebar di luar pulau Jawa dan Madura yakni Sumatera 19 persen, Kalimantan 10 persen, Sulawesi 5 persen dan 10 persen untuk daerah Nusa Tenggara, Bali, Maluku, dan Irian Jaya lihat tabel 4.3.

TABEL IV.2
 RENCANA PMDN YANG DISETUJUI PEMERINTAH
 MENURUT LAPANGAN USAHA / SEKTOR
 (MILYAR Rp.)

LAPANGAN USAHA	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991
Peranian, Kehutanan dan Perikanan	295,3	935,6	1900,1	3.525,5	3.184,4	3.667,6	9.403,9	3.774,4
- Peranian	232,6	725,2	1599,9	2.325,2	2.254,8	3.020,1	8.113,1	3.289,7
- Kehutanan	18,8	36,5	20,7	640,1	486,6	222,7	597,0	309,7
- Perikanan	43,9	173,9	279,5	560,2	443,0	424,8	697,8	178,0
Perumahan	7,8	37,6	89,1	289,7	110,5	94,4	147,1	182,0
Industri	1.436,5	1.632,2	184,3	5.518,1	9.746,9	12.933,7	40.863,5	27.623,0
- Makanan	91,8	91,3	215,5	456,5	1.720,3	548,5	1.137,7	1.341,0
- Tekstil	126,0	97,0	262,5	1.288,7	2.308,9	773,9	12.612,0	3.645,0
- Kayu	48,4	62,0	126,8	696,1	1.486,5	773,1	2.178,5	1.561,0
- Kertas	10,6	15,8	41,1	365,6	237,2	1.136,8	5.983,2	6.801,0
- Kimia dan Farmasi	273,9	957,7	813,5	2.084,1	3.057,4	4.051,1	12.667,8	8.521,0
- Mineral bukan logam	213,5	177,8	17,2	132,2	370,7	267,1	3.795,1	4.053,0
- Logam Dasar	562,5	25,1	221,1	74,3	180,9	2.038,7	982,4	858,3
- Barang-barang Logam	109,8	201,8	141,7	410,4	279,0	507,5	1.323,3	784,5
- Lain-lainnya	-	3,7	2,9	10,2	98,0	48,0	183,5	39,8
Konstruksi	67,1	270,1	74,4	49,6	31,4	146,1	86,5	27,0
- Perhotelan	214,1	311,5	17,0	138,8	537,0	1.265,3	4.661,7	3.895,0
- Pengangkutan	5,5	127,4	102,4	367,8	230,7	288,7	2.083,3	906,0
- Perumahan dan Perkantoran	49,5	267,0	160,5	173,9	846,1	930,2	2.101,3	3.502,0
- Lainnya	24,1	168,3	222,9	201,6	228,9	261,9	531,1	915,6
Jumlah	2.099,9	3.749,7	4.416,7	10.265,0	14.915,9	19.593,9	59.878,4	91.077,9

Sektor diperhitungkan proyek-proyek yang dibatalkan dan yang beralih statusnya dari PMDA ke PMDN
 Penjumlahan dari bulan Juli 1968 s.d Desember 1994
 Sumber BKPM

TABEL IV.3
PENYEBARAN RENCANA PIDN YANG DISETUJUI PEMI
MENURUT DATI I
(MILYAR Rp.)

DAERAH TINGKAT I	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	199
DKI Jakarta	476,2	604,2	511,5	776,7	1.031,4	1.419,6	3.272,3	3,60
Jawa Barat	1.275,0	947,8	121,9	3.853,7	5.640,4	9.275,0	27.353,4	13,50
Jawa Tengah	780,1	224,1	237,7	565,5	870,3	891,3	5.715,0	3,634
DI. Yogyakarta	7,2	33,8	40,1	28,3	167,1	51,6	420,3	334
Jawa Timur	579,6	416,5	332,1	499,1	1.025,7	2.821,5	2.424,6	3.908
Jawa dan Madura	3.118,2	2.286,5	2.340,5	5.723,3	8.734,9	14.459,0	39.165,6	25.005,
DI. Aceh	24,6	433,1	41,9	25,1	291,4	221,2	228,2	151,
Sumatera Utara	63,9	62,3	360,6	348,6	543,8	317,4	913,4	824,
Sumatera Barat	27,9	98,9	60,1	43,4	118,1	138,3	456,2	157,
Riau	174,3	184,5	255,0	642,2	1.198,8	1.307,9	5.821,8	3.225,
Arab	36,4	36,2	17,1	308,2	298,0	145,3	620,0	1.061,1
Sumatera Selatan	34,8	24,7	69,7	346,7	714,7	337,1	177,4	554,5
engkulu	11,9	36,3	11,3	82,2	34,1	78,2	79,4	20,2
ampung	41,2	41,9	24,8	152,7	466,7	489,4	891,3	426,2
Sumatera	405,3	918,1	840,6	1.949,1	3.665,6	3.034,8	10.781,7	6.451,8
Sumatera Barat	20,5	24,0	45,8	457,4	708,7	69,1	1.793,4	2.420,9
Sumatera Tengah	1,8	34,2	27,1	11,3	33,3	89,2	104,8	192,3
Sumatera Selatan	5,8	104,0	44,6	81,2	186,5	215,1	174,1	549,1
Sumatera Timur	1,2	452,5	323,6	436,8	425,0	256,4	3.149,0	1.228,2
Sumatera	140,1	546,5	441,0	986,7	67,7	829,8	5.221,3	43.902,2
Sumatera Utara	8,2	15,6	153,0	103,4	55,2	165,3	144,0	386,1
Sumatera Tengah	1,1	0,56	7,4	272,7	120,5	48,8	426,5	451,9
Sumatera Selatan	61,7	17,3	47,7	117,9	7,0	68,6	547,5	323,8
Sumatera Timur	1,5	3,7	-	16,0	7,0	49,8	127,0	52,2
Sumatera	72	37,3	208,1	510,0	250,4	332,5	1.245,0	1.214,0
Sumatera Barat	3,3	5	32,9	11,4	250,3	60,7	357,3	372,0
Sumatera Tengah	3,6	-	12,1	21,6	21,7	30,4	261,8	18,9
Sumatera Selatan	6,9	5	55,0	33,0	7,0	91,1	619,1	390,9
Sumatera Timur	11,6	12,8	36,3	107,1	214,4	460,2	1.844,2	1.331,3
Sumatera	-	-	-	-	1,1	-	22,6	-
Sumatera Barat	16,2	5,8	15,9	67,6	328,6	196,7	807,9	126,6
Sumatera Tengah	69,3	10,7	6,9	888,2	320,4	180,8	171,0	2.167,1
Sumatera Selatan	3.928,8	3.820,3	4.123,8	10.265,0	14.915,9	10.591,9	39.878,4	41.077,9
Sumatera Timur								



Untuk tahun 1988, investasi yang distujui naik cukup tinggi yakni naik sebesar 37 persen dengan nilai Rp 14.201,8 milyar (843 proyek). Dibanding tahun sebelumnya investasi terbesar terjadi pada bidang usaha industri yang mencapai Rp 12.933,7 milyar atau naik 33 persen. Bagian terbesar dari investasi bidang usaha industri tersebut terjadi pada industri kimia dan farmasi serta industri tekstil yang masing-masing mencapai Rp 3.057,4 milyar dan Rp 2.308,9 milyar. Sementara itu investasi yang disetujui pada bidang usaha perumahan dan perkantoran serta bidang usaha perhotelan meningkat cukup berarti mencapai Rp 846,1 milyar dan Rp 5.370,0 milyar dibandingkan masing-masing dengan Rp 173,9 milyar dan Rp 138,8 milyar dalam tahun 1987 lihat tabel 4.2.

Berdasarkan penyebaran tempat usaha, sebagian besar dari proyek dan nilai investasi terdapat di Jawa Barat, DKI Jakarta dan Jawa Timur dengan nilai masing-masing Rp 5.640,4 milyar, Rp 1.031,4 milyar dan Rp 1.025,7 milyar. Untuk daerah di luar Jawa investasi tersebar terjadi di Riau, Sumatera Utara, Kalimantan Timur dengan nilai masing-masing Rp 1.198,8 milyar, Rp 543,8 milyar, Rp 436,8 milyar lihat tabel 4.3.

Kenaikan investasi terbesar terjadi pada tahun 1990 dengan kenaikan 188 persen, sebanyak 1.324 proyek yang bernilai Rp 56.510,5 milyar dibanding tahun 1988 yang hanya bernilai Rp 19.593,5 milyar. Hal ini terjadi sebagai dampak dari semakin memanasnya kondisi perekonomian, investasi yang tinggi diiringi pula dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi yang berkisar 7,2 persen. Tetapi di sudut lain dari 5,9 persen tahun 1989 menjadi 9,97 persen pada tahun 1990 lihat tabel 4.7. Tingginya laju inflasi masa ini menyebabkan tingkat suku bunga kredit juga mengalami kenaikan dari 20,3 persen tahun 1989 menjadi 21,8 persen pada tahun 1990 lihat tabel 4.8.

Untuk meredakan situasi ekonomi yang overheating, pemerintah mengeluarkan Kebijakan Uang Ketat (Tight Money Policy) pertengahan tahun 1990. Sebagai implikasinya jumlah investasi turun drastis dari 1.324 proyek dengan nilai Rp 56.510,5 milyar menjadi 804 proyek dengan nilai Rp 41.077,9 milyar atau turun sebesar 27 persen pada tahun 1991. Selain itu turunnya investasi pada tahun 1991 juga sebagai dampak langsung dari tingkat suku bunga yang mengalami kenaikan menjadi 23,1 persen, yang menyebabkan para investor enggan untuk melakukan

investasi. Kondisi ini berlangsung terus hingga tahun berikutnya (1992), investasi turun 29 persen dengan jumlah 436 proyek yang bernilai Rp 29.341,7 milyar.

Penurunan investasi ini juga diikuti oleh penurutan tingkat inflasi menjadi 4,94 persen, dengan tingkat bunga menjadi 21,4 persen serta pertumbuhan ekonomi turun menjadi 6,5 persen.

Setelah melewati masa pemulihan ekonomi selama tahun 1992, pemerintah mengeluarkan Paket Mei 1993 yang bertujuan untuk menggairahkan perekonomian nasional yang mengalami kelesuan tahun sebelumnya.

Untuk tahun 1993, investasi kembali mengalami kenaikan menjadi 548 proyek dengan nilai Rp 39.450,4 milyar atau naik sekitar 34 persen dibanding tahun 1992. Naiknya investasi diiringi dengan naiknya pertumbuhan ekonomi menjadi 6,7 persen, tetapi tingkat inflasi juga mengalami kenaikan menjadi 9,97 persen. Namun di sudut lain tingkat bunga kredit malah mengalami penurunan yang besar sekali menjadi 17,9 persen. Penurunan suku bunga ini membawa angin segar bagi investor sehingga untuk tahun 1994 investasi kembali mengalami peningkatan menjadi 823 proyek dengan nilai

Rp 53.289,4 milyar atau naik sekitar 35 persen dibanding tahun 1993.

Sedangkan untuk investasi menurut bidang usaha, sektor industri masih tetap menjadi primadona yang memegang proporsi investasi sekitar 60 persen dan pulau Jawa tetap sebagai sasaran utama para investor. (lihat tabel 4.2 dan 4.3).

4.1.1.2. Penanaman Modal Asing (PMA)

Penanaman Modal Asing di Indonesia mempunyai kedudukan yang strategis dalam upaya tercapainya tujuan pembangunan nasional. Walaupun mempunyai peranan yang strategis, masih banyak masalah-masalah yang dihadapi oleh Penanaman Modal Asing ini, baik secara sektoral maupun secara regional.

Dari tabel 4.4, selama periode 1984-1994 terlihat bahwa perkembangan persetujuan PMA mengalami fluktuasi. Pada tahun 1984, PMA yang dilakukan berjumlah 23 proyek dengan nilai US\$ 1.096,9 juta. Pada tahun berikutnya terjadi penurunan sebesar 22 persen; meskipun dalam jumlah proyek terjadi kenaikan menjadi 45 proyek dengan nilai US\$ 893,2 juta. Hal ini sebagai akibat dari Paket Juni 1983 yang memberi kebebasan pada masing-masing bank dalam menentukan suku bunganya, yang dipandang sebagai salah satu penghalang bagi

Tabel 4.4 Perkembangan Penanaman Modal Asing di Indonesia tahun 1984-1994.

TAHLIN	PROYEK	NILAI (US\$ MILYAR)	PERTUMBUHAN (%)
1984	23	1.096,9	-
1985	45	853,2	-22
1986	93	847,6	-0,6
1987	130	1.520,3	79
1988	145	4.410,7	190
1989	294	4.713,5	6
1990	432	8.751,1	85
1991	376	8.778,0	0,3
1992	305	10.323,2	18
1993	329	8.144,2	-21
1994	449	23.724,3	191

Sumber : Statistik Ekonomi - Keuangan Indonesia, BI berbagai edisi, data diolah.

catatan :

1. Diluar sektor minyak dan gas, lembaga keuangan non bank, asuransi, dan sewa guna usaha.
2. Angka tahunan adalah jumlah proyek baru + alih status, sedang nilai investasi adalah investasi dari proyek baru + perluasan + alih status.
3. Angka diperbaiki.

investor asing untuk melakukan investasi. Penurunan berlanjut terus sampai tahun 1986 sebesar 0,6 persen dengan nilai US\$ 847 juta (93 proyek). Memang pada masa-masa ini tingkat pertumbuhan ekonomi relatif rendah yakni 2,5 persen tahun 1985 dan 5,9 persen tahun 1986 sebagai akibat jatuhnya harga minyak di pasaran internasional.

Untuk mengantisipasi hal tersebut maka pemerintah mengeluarkan Paket 6 Mei 1986 yang bertujuan meningkatkan PMA serta kebijaksanaan 24 Desember 1989 yang memberi kebebasan pajak pada investor. Sebagai hasilnya PMA pada tahun 1987 mengalami peningkatan menjadi US\$ 1.520,3 juta atau naik sebesar 79 persen.

Secara sektoral PMA yang banyak diminati adalah sektor industri, pengangkutan dan pertanian yakni masing-masing sebesar US\$ 852,3 juta, US\$ 213 juta dan US\$ 133,3 juta. Sedangkan untuk sektor industri, investasi terbesar terjadi pada industri kimia dan farmasi serta industri mineral bukan logam masing-masing sebesar US\$ 208,8 juta dan US\$ 251,3 juta. Tingginya minat investor asing pada sektor industri disebabkan struktur perekonomian Indonesia sudah mengarah industrialisasi, disamping banyaknya deregulasi yang dilakukan untuk menggiat-

TABEL IV.6
PENYEBARAN RENCANA PMA YANG DISETUJUI
MENURUT DATI I
(JUTA US\$)

DAERAH TINGKAT I	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990
DKI Jakarta	269,1	257,5	258,2	440,4	335,4	521,1	1,65
Jawa Barat	758,3	450,2	422,2	605,8	1.069,4	1.476,3	3,69
Jawa Tengah	-	-	-	32,3	25,1	1.702,7	105
D.I. Yogyakarta	-	-	-	-	-	-	6
Jawa Timur	57,2	69,6	9,5	208,3	236,9	330,5	972
Jawa dan Madura	1.084,6	777,3	747,1	1.286,8	1.666,8	4.030,7	6.432
D.I. Aceh	-	9,3	7,5	-	-	50,0	192
Sumatera Utara	-	5,1	50,0	109,1	55,0	177	360
Sumatera Barat	13,7	1,4	-	1,5	5,7	5,2	1
Riau	21,1	58,1	0,8	-	614,3	318,5	247
Jambi	1,2	-	-	-	-	56,7	44
Sumatera Selatan	-	-	1,1	2,1	919,9	41,1	26
Bengkulu	-	-	-	-	-	77,9	-
Lampung	-	3,6	2,3	2,0	-	-	-
Sumatera	8,6	77,5	61,7	114,7	1.594,9	367,1	871,1
Kalimantan Barat	-	-	-	-	24,3	5,7	6,1
Kalimantan Tengah	-	-	-	9,1	18,3	13,2	10,1
Kalimantan Selatan	-	0,2	2,4	8,1	2,0	13,2	122,1
Kalimantan Timur	-	-	12,2	1,0	39,0	-	560,1
Malimantan	-	0,2	14,6	18,2	87,0	18,9	700,3
ulawesi Utara	-	-	25,0	-	-	2,4	0,1
ulawesi Tengah	-	-	-	-	24,3	4,0	1,4
ulawesi Selatan	-	-	1,2	1,0	-	4,9	121,4
ulawesi Tenggara	-	-	-	-	19,5	-	3,0
ulawesi	-	-	26,2	1,0	43,8	11,3	134,4
ah	-	-	-	1,4	371,1	79,7	608,5
usa Tenggara Barat	-	-	-	-	3,0	1,6	6,8
usa Tenggara Timur	-	-	1,6	10,0	0,8	9,5	1,2
usa Tenggara Timur	-	-	1,6	10,0	3,8	11,1	1,2
Timor - Timur	-	-	-	-	-	-	1,2
Maluku	-	2,2	-	-	-	-	0,9
Maluku	13,9	1,8	-	-	670,5	-	1,2
Irian Jaya	1.107,1	859,0	869,2	1.457,1	4.434,5	4.718,8	8.730,1
							8.778,0
							10.323,2

1) Seolah-olah diperhitungkan pembatalan dan perubahan status dari PSA/ka dan PMS/ka

TABEL IV.7
RENCANA PMA YANG DISETUJUI PEMERINTAH
MENURUT NEGARA
(JUTA US\$)

NEGARA	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990
1. EROPAH	166,1	194,7	124,4	607,0	1.433,4	604,9	1.070,0
- Belanda	43,9	11,6	23,3	122,8	270,9	282,1	567,0
- Belanda	-	1,0	-	7,1	-	43,5	87,0
- Inggris	13,9	77,1	46,1	12,7	120,9	43,7	57,0
- Jerman Rep. Fed.	17,0	65,5	16,5	330,6	955,9	6,8	13,0
- Perancis	8,3	39,5	6,2	42,0	42,2	18,0	68,0
- Swis	83,0	-	12,5	-	1,2	11,5	14,0
- Lain-lain	-	-	19,8	91,8	42,3	198,6	261,0
AMERIKA	94,8	141,4	191,8	106,2	759,6	366,0	202,0
- Amerika Serikat	94,8	141,4	153,8	72,6	671,8	348,0	153,0
- Kanada	-	-	11,0	6,9	-	3,0	8,0
- Panama	-	-	27,0	26,7	87,8	15,6	40,0
ASIA	834,4	432,0	478,0	707,4	1.868,2	2.064,6	4.991,0
- Hongkong	706,1	53,4	9,6	134,9	231,4	406,8	993,0
- Jepang	112,1	127,1	320,9	531,8	247,0	768,7	2.240,8
- Korea Selatan	-	-	-	23,0	209,0	400,1	722,0
- Malaysia	-	-	2,5	1,0	20,2	22,7	7,0
- Philipina	-	2,8	2,3	2,8	-	-	-
- Singapura	16,2	-	101,5	6,0	240,2	166,1	-
- Thailand	-	-	4,0	-	10,2	17,0	-
- Taiwan	-	-	18,0	7,9	910,2	158,2	-
- Lain-lain	-	248,7	12,0	-	-	59,0	135,1
AUSTRALIA	2,7	36,1	13,9	2,5	53,2	42,5	186,5
AFRIKA	9,1	54,8	17,3	-	320,1	1.610,6	4.140,7
6. GABUNGAN NEGARA	1.107,1	859,0	826,3	1.452,1	4.424,3	4.218,8	9.260,1

persen, sebagai akibat besarnya investasi pada tahun sebelumnya yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi pada tahun berikutnya.

Kenaikan PMA juga terjadi pada tahun 1990 sebesar 85 persen dengan nilai US\$ 8.751,1 juta (432 proyek). Naiknya investasi diiringi dengan naiknya laju pertumbuhan ekonomi sebesar 7,2 persen. Memanasnya situasi ekonomi pada tahun ini juga diikuti dengan melonjaknya inflasi dari 5,56 persen pada tahun 1989 menjadi 9,97 persen pada tahun 1990 serta kenaikan tingkat suku bunga (tabel 4.8 dan tabel 4.9).

Dari tahun 1991-1992 terjadi penurunan dalam jumlah investasi meskipun dari segi nilai mengalami kenaikan bahkan pada tahun 1993 PMA turun sebesar 21 persen dengan nilai US\$ 8.144,2 juta. Hal ini sebagai dampak ditutupnya bidang-bidang usaha bagi investasi dengan dikeluarkannya Keppres No. 21/1989 tentang Daftar Negatif Investasi. Tapi pada tahun 1994 PMA kembali mengalami kenaikan secara tajam yakni sebesar 191 persen dengan nilai US\$ 23.724,3 juta dan jumlah proyek sebanyak 449 buah. Kenaikan ini juga berhubungan dengan Paket Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah yang memberikan keringanan pada investor asing untuk melakukan investasi

khususnya di Kawasan Timur Indonesia.

Selama periode 1984-1994 alokasi PMA secara sektoral yang mengalami kenaikan terbesar adalah sektor industri. Dari penjumlahan Juni 1967 sampai Desember 1994 investasi yang dilakukan bernilai US\$ 60.354,9 juta dengan banyak proyek 2057 buah atau 65 persen dari total investasi asing. Dari sektor industri tersebut yang diminati oleh investor asing adalah industri kimia dan farmasi, industri kertas, industri barang-barang logam, industri logam dasar dan industri tekstil masing-masing bernilai US\$ 22.163,8 juta, US\$ 9.510,9 juta, US\$ 8.352,6 juta, US\$ 6.654,0 juta dan US\$ 5.388,4 juta. Disamping itu sektor yang diminati investor asing adalah sektor perhotelan, pertambangan, dan perumahan dan perkantoran masing-masing dengan nilai US\$ 7.736,9 juta, US\$ 6.551,6 juta dan US\$ 4.816,9 juta (tabel 4.5).

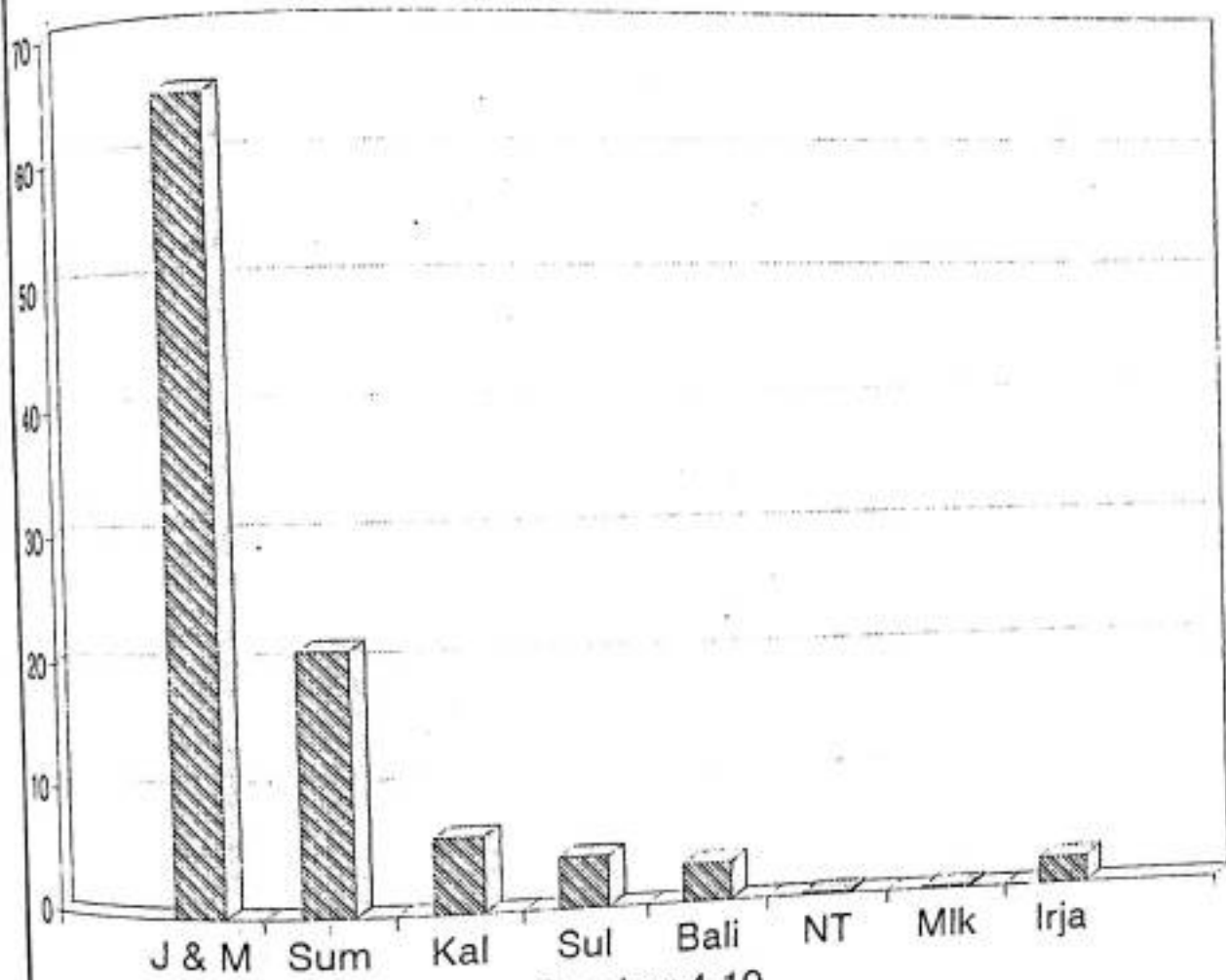
Selanjutnya kalau dilihat secara regional investasi yang diminati oleh investor asing adalah terutama terkonsentrasi di pulau Jawa dan Madura berjumlah 2430 proyek dengan nilai US\$ 59.625,7 juta atau sekitar 65 persen dari total investasi asing. Dan untuk daerah-daerah di luar Jawa dan Madura yakni Sumatera 377 proyek dengan nilai

US\$ 19.613,4 juta atau 21 persen, Kalimantan 129 proyek dengan nilai US\$ 5.248,7 juta atau 6 persen, Sulawesi 69 proyek dengan nilai US\$ 3.287,6 juta atau 4 persen, Bali 97 proyek dengan nilai US\$ 2.473,7 juta atau 3 persen, Nusa Tenggara 24 proyek dengan nilai US\$ 101 juta atau 0,1 persen, Maluku 11 proyek dengan nilai US\$ 116,6 juta atau 0,13 persen dan Irian Jaya 25 proyek dengan nilai US\$ 1.912,4 juta atau sekitar 2 persen (tabel 4.6 dan gambar 4-19).

Kalau dibandingkan porsi yang diterima antara Indonesia Barat dan Indonesia Timur maka investasi asing yang dilakukan di Barat sebanyak 2807 proyek dengan nilai US\$ 79.234,1 juta atau sekitar 85 persen total investasi asing dan untuk daerah Timur sebanyak 355 proyek dengan nilai US\$ 13.140 juta atau sekitar 15 persen (gambar 4-20).

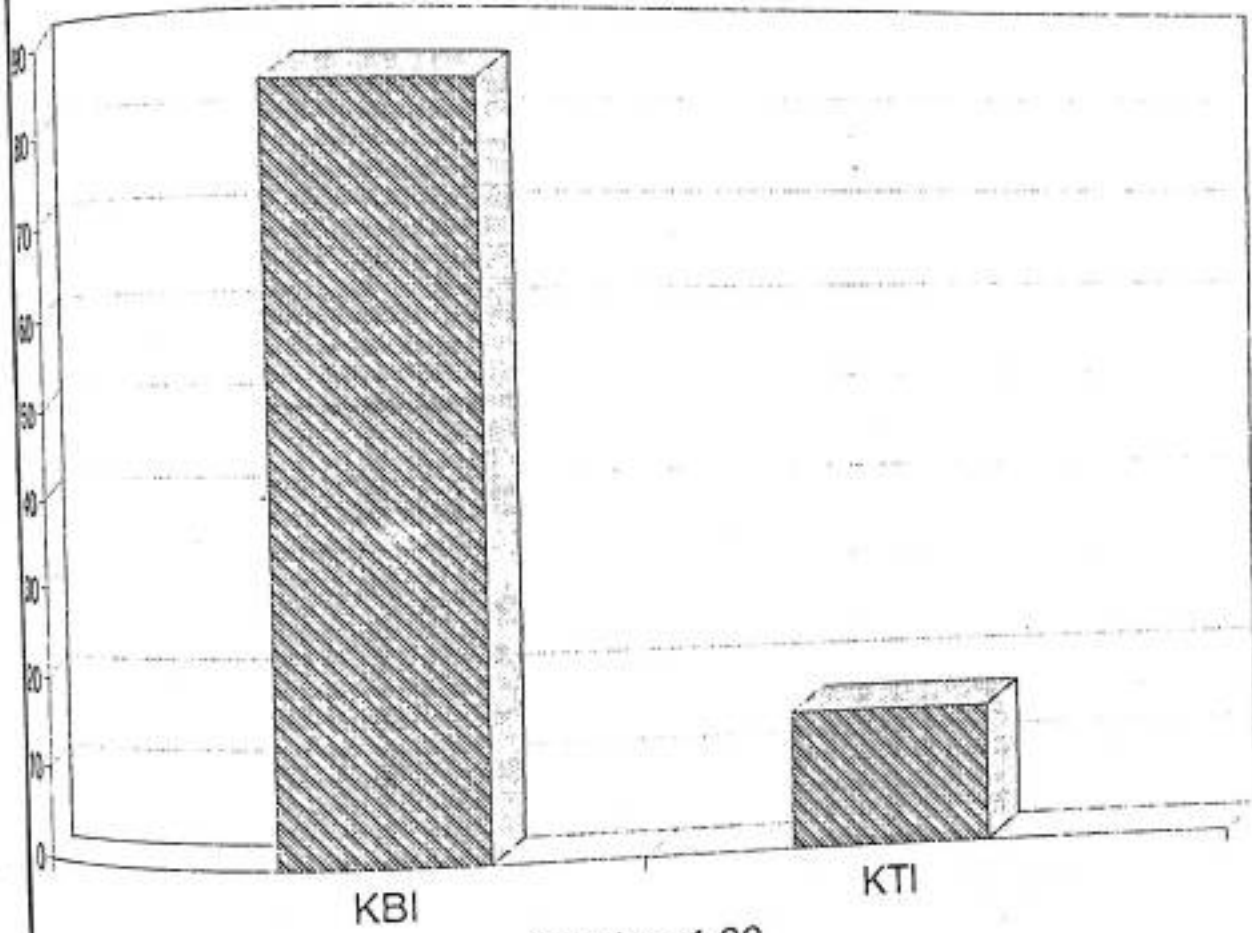
Tingginya minat investasi asing melakukan investasi di Kawasan Barat Indonesia disebabkan oleh beberapa hal yakni (1) Proses perizinan yang harus dilakukan di pusat pemerintah yang terletak di daerah Barat yang akan menghemat waktu investor dalam mempersiapkan investasinya, (2) Fasilitas penunjang prasarana dan sarana lebih lengkap dibandingkan di Kawasan Timur, (3) Data dan

DISTRIBUSI REGIONAL INVESTASI ASING



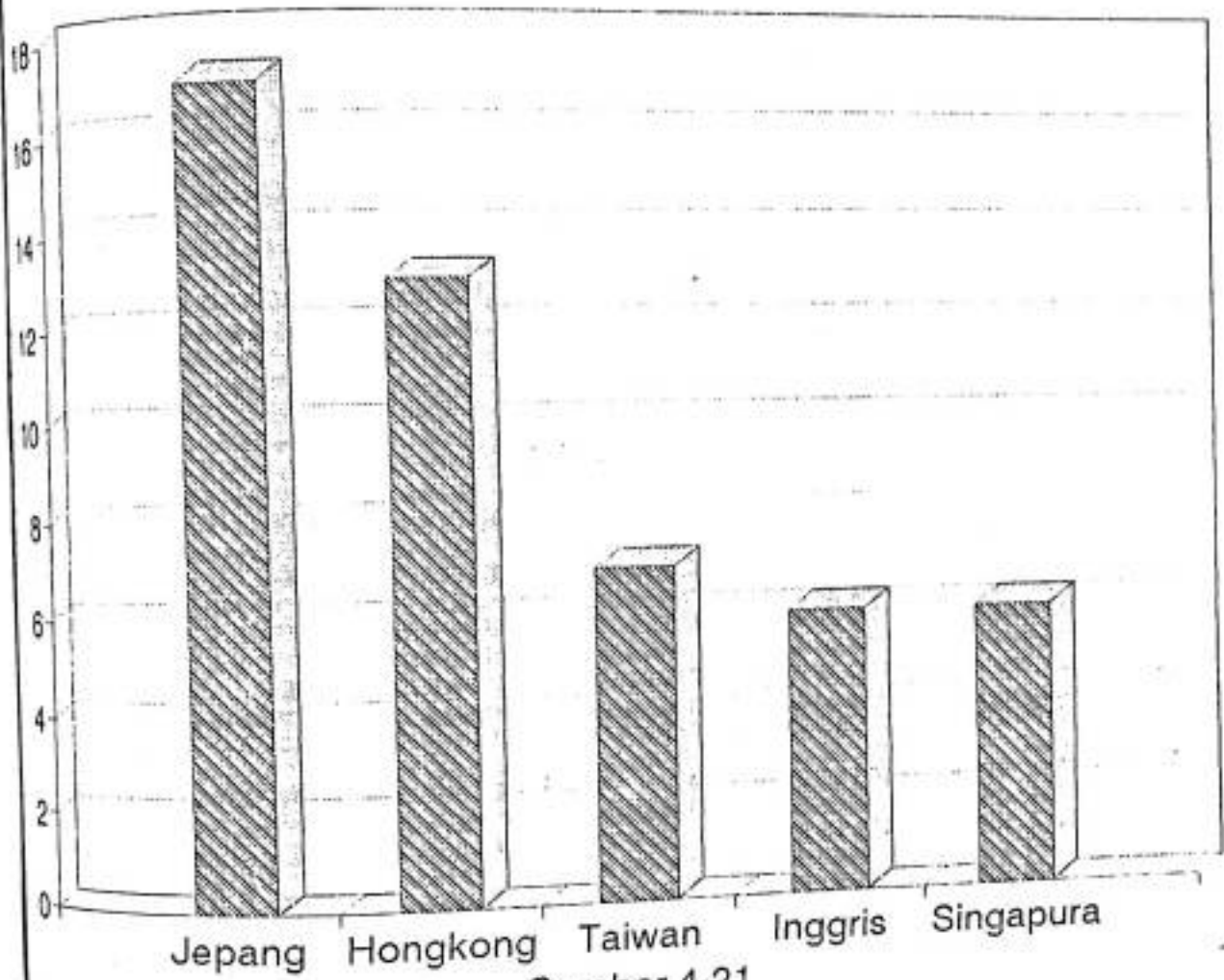
Gambar 4:19

PORSI INVESTASI ASING ANTARA KBI DAN KTI



Gambar 4-20

NEGARA ASAL INVESTASI



Gambar 4-21

informasi yang dimiliki lebih mudah diperoleh, dan (4) Peredaran uang di dalam masyarakat Indonesia terpusat di Kawasan Barat.

Sedangkan dari negara asal investasi maka negara yang banyak melakukan investasi adalah Jepang dengan nilai US\$ 15.665,5 juta (654 proyek) atau 17 persen, Hongkong dengan nilai US\$ 12.005,0 juta (292 proyek) atau 13 persen, Taiwan dengan nilai US\$ 5.570,4 juta (310 proyek) atau 7 persen, Inggris dengan nilai US\$ 5.644,0 juta (145 proyek) atau sekitar 6 persen, dan Singapura dengan nilai US\$ 5.568 juta (344 Proyek) atau sekitar 6 persen dari total investasi yang dilakukan dan sisanya dilakukan oleh negara-negara lainnya seperti yang terlihat pada tabel 4.7 dan gambar 4-21.

4.1.2. Perkembangan Tingkat Suku Bunga

Tingkat suku bunga sangat berhubungan sekali dengan investasi. Pada saat tingkat suku bunga tinggi, permintaan terhadap kredit turun. Inilah nanti yang akan mempengaruhi investasi karena para investor mengalami kekurangan dana untuk melaksanakan kegiatan investasinya.

Berdasarkan Tabel 4.8, perkembangan tingkat suku bunga kredit di Indonesia dari tahun 1984-1994, terlihat bahwa tingkat suku bunga kredit mengalami

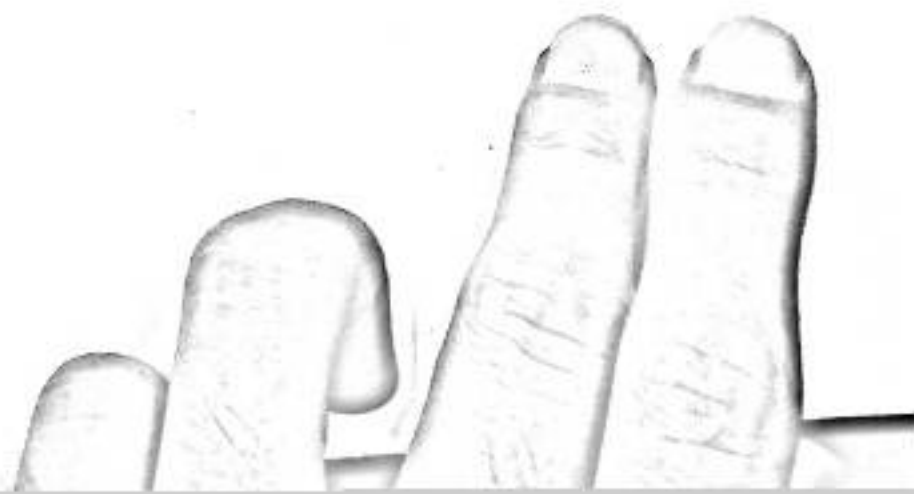
fluktuasi. Pada tahun 1984 tingkat suku bunga yang terjadi adalah 23,2 persen. Tingginya tingkat suku pada tahun ini sebagai reaksi dari deregulasi 1 Juni 1983 yang memberi kebebasan pada bank untuk menentukan tingkat suku bunganya sendiri. Namun pada tahun berikutnya 1985 tingkat suku bunga mengalami penurunan menjadi 21,6 persen. Ini sejalan dengan seruan Gubernur Bank Indonesia agar bank-bank menurunkan tingkat suku bunga mereka. Penurunan tingkat suku bunga terjadi sebelum Bank Indonesia menetapkan penurunan tingkat suku bunga pada SPBU dan SBI.

Dalam perekonomian, pengaruh kebijaksanaan fiskal dan moneter besar sekali terhadap rencana usaha di lingkungan masyarakat. Untuk mengatasi supaya tingkat suku bunga tidak mengalami kenaikan yang tajam setelah deregulasi 1 Juni 1983 tersebut. Maka tahun 1985 pemerintah melalui Bank Indonesia sebagai Bank Sentral, mengontrol langsung penentuan besarnya tingkat suku bunga melalui instrumen instrumen moneter. Meskipun tingkat suku bunga tahun 1987 mengalami kenaikan menjadi 23,0 persen namun pada 1 des. berikutnya kembali mengalami penurunan.

Tapi pada tahun 1990 dan 1991 tingkat suku bunga kembali mengalami kenaikan menjadi 24,8 persen dan 23,4 persen sebagai reaksi dari moneterisasi

perekonomian pada tahun ini, dengan laju inflasi yang cukup tinggi yakni sekitar 10 persen. Memasuki tahun 1992 tingkat suku bunga sudah dapat ditekan kembali menjadi 21,8 persen. Penurunan ini sebagai dampak dari kebijaksanaan Uang Ketat yang dilakukan pemerintah untuk menahbati laju inflasi yang tinggi.

Bahkan pada tahun 1994 tingkat suku bunga kredit sudah mencapai 15 persen, angka terendah sejak deregulasi 1 Juni 1983. Rendahnya tingkat suku bunga pada tahun 1994 dikhawatirkan akan menimbulkan kelangkaan dana pada bank-bank, untuk membiayai proyek-proyek investasi. Di sudut lain penurunan tingkat suku bunga juga menyebabkan berbagai usaha layak untuk diinvestasikan.



Tabel 4.8 Perkembangan Tingkat Suku Bunga Kredit di Indonesia tahun 1984-1994.

TAHUN	SUKU BUNGA (%)	PERSENTASE PERUBAHAN
1984	23,2	-
1985	22,6	- 2,5
1986	21,4	- 5,3
1987	22,0	2,8
1988	21,9	- 0,4
1989	20,3	- 7,3
1990	21,8	7,4
1991	23,1	6,0
1992	21,4	- 7,4
1993	17,9	-16,4
1994	15,0	-16,2

Sumber : Statistik Ekonomi - Keuangan Indonesia, BI berbagai edisi, data diolah.

4.1.3. Perkembangan Tingkat Inflasi

Salah satu variabel makro yang berpengaruh pada tinggi rendahnya investasi di Indonesia adalah inflasi. Dari segi penyebab, inflasi dapat dibedakan atas dua; pertama, inflasi permintaan yang disebabkan oleh adanya terikan permintaan terhadap barang-barang dan jasa yang mendorong harga untuk meningkat. Kedua, inflasi penawaran yang disebabkan oleh dorongan kenaikan upah yang diakibatkan kenaikan biaya produksi, terutama kenaikan biaya tenaga kerja atau upah buruh. Kenaikan upah akan mempertinggi biaya produksi yang otomatis ditanggung oleh para investor yang menanamkan modalnya.

Apabila kita melihat posisi inflasi pada perekonomian Indonesia 10 tahun terakhir (1984-1994) seperti yang disajikan tabel 4.9, tingkat inflasi relatif stabil walaupun tidak dapat dikatakan cukup baik yang rata-rata di bawah dua digit per tahun.

Pada tahun 1984 tingkat inflasi yang terjadi yakni 8,76 persen dengan jumlah uang beredar Rp 5,6 triliun atau sebesar 13,4 persen. Inflasi yang terjadi pada tahun 1984 termasuk tinggi karena ada pengaruh kenaikan harga minyak dan devaluasi yang terjadi. Tahun berikutnya inflasi sudah dapat ditekan menjadi 4,3 persen tapi jumlah uang beredar naik menjadi 17,7 persen.

Tabel 4.9 Perkembangan Tingkat Inflasi dan Uang Beredar (M_1) Indonesia tahun 1984-1994

TAHUN	INFLASI	UANG BEREDAR (Rp MILYAR)	PERSENTASE (%)
1984	8,76	5,6	13,4
1985	4,31	10,1	17,7
1986	8,83	11,7	15,6
1987	8,90	2,7	8,6
1988	5,47	14,4	13,5
1989	5,97	20,1	39,8
1990	9,97	23,8	18,4
1991	9,52	26,3	10,6
1992	4,94	28,8	9,6
1993	9,77	37,6	28,7
1994	9,24	46,5	25,5

Sumber : Departemen Keuangan, Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara tahun 1995/1996.

Dua tahun berikutnya 1986 dan 1987 inflasi kembali naik mencapai 8,83 persen dan 8,9 persen. Kenaikan ini sebagai akibat diberlakukannya devaluasi oleh pemerintah tahun 1986 dengan menurunkan nilai rupiah sebesar 31 persen.

Selanjutnya memasuki tahun 1990 dengan semakin membaiknya iklim usaha sebagai akibat berbagai kebijakan yang ditempuh pemerintah, perekonomian nasional menunjukkan aktivitas yang meningkat. Namun dengan semakin meningkatnya kegiatan ekonomi kemudian muncul permasalahan berupa memanasnya suhu perekonomian. Terlalu cepatnya laju pertumbuhan permintaan masyarakat tidak diimbangi dengan peningkatan yang memadai disisi penawaran, menimbulkan gangguan terhadap kestabilan harga dan neraca pembayaran. Laju inflasi pada tahun 1988 dapat dikendalikan pada tingkat yang rendah 5,47 persen terus meningkat 5,97 persen pada tahun 1989 dan 9,97 persen pada tahun 1990. Demikian pula defisit transaksi berjalan juga meningkat tajam, mencapai US\$ 3,2 milyar pada tahun 1990 sebagai akibat pesatnya pertumbuhan impor (lihat lampiran I).

Laju inflasi yang terlalu tinggi, tidak saja cenderung memperlemah daya saing hasil produksi, tetapi juga mengurangi kepercayaan terhadap nilai

rupiah maupun kestabilan ekonomi makro. Berbagai langkah telah ditempuh secara terpadu untuk memulihkan keseimbangan perekonomian makro. Kebijakan ekonomi makro yang berhati-hati dan konsisten terus diupayakan untuk menciptakan kestabilan guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan terlaksananya pemerataan. Sejak pertengahan 1990 kebijakan moneter yang lebih ketat diterapkan. Kebijakan ini terus ditempuh pada tahun 1991, yang didukung pula kebijakan fiskal yang kontraktif, seperti yang tercermin pada pembentukan cadangan anggaran pembangunan.

Upaya ini nampak menunjukkan hasilnya secara berarti pada tahun 1992, ketika permintaan dalam negeri yang berlebihan dan tekanan pada neraca pembayaran dapat dikurangi. Hal ini terlihat pada menurunnya pertumbuhan impor dan meningkatnya pertumbuhan ekspor non migas. Sementara itu laju inflasi dapat dikendalikan pada tingkat yang cukup rendah yakni 4,94 persen. Namun hal ini tidak berlangsung lama pada tahun berikutnya 1993, tingkat inflasi naik kembali mencapai 9,97 persen dan peredaran uang pun naik 28,7 persen. Dan untuk tahun 1994 tingkat inflasi hanya mengalami penurunan yang relatif kecil yakni menjadi 9,24 persen.

4.1.4. Perkembangan Tingkat Pertumbuhan Ekonomi

Pembangunan nasional sebagai proses untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat hingga kini telah memasuki tahun ke dua PELITA VI. Secara keseluruhan hasil-hasil pembangunan tercermin pada tingkat pertumbuhan ekonomi nasional yang diukur dari Produk Domestik Bruto (PDB) yang dihitung berdasarkan atas harga konstan.

Dalam penulisan ini Produk Domestik Bruto periode 1983-1993 dihitung atas dasar harga konstan tahun 1983 dan Produk Domestik Bruto tahun 1994 dihitung atas dasar harga konstan 1993.

Sejak PELITA I, pembangunan ekonomi Indonesia telah mengalami kemajuan pesat. Perkembangan dan kemajuan ini semakin meningkat pada tahapan-tahapan pembangunan selanjutnya yakni PELITA II, PELITA III, PELITA IV dan PELITA V. Dibandingkan negara-negara berkembang lainnya maka Indonesia tergolong sebagai negara yang telah mencapai pertumbuhan ekonomi yang mengembirakan. Dimana laju pertumbuhan ekonomi rata-rata mencapai sasaran yang telah ditargetkan. Khusus untuk PELITA V laju pertumbuhan ekonomi mencapai 6,8 persen tiap tahun, berarti di atas nilai yang telah ditargetkan untuk PELITA V sebesar 5 persen pertahun.

Laju pertumbuhan ekonomi dalam periode tahun 1984-1994 seperti yang diperlihatkan Tabel 4.10, nampak begitu berfluktuasi sejalan dengan semakin meningkatnya Produk Domestik Bruto setiap tahunnya. Pada tahun 1984 tingkat pertumbuhan ekonomi yang dicapai sekitar 6 persen dengan tingkat Produk Domestik Bruto sebesar Rp 89.885,1 milyar. Jatuhnya harga minyak dekade 1980-an, menyebabkan penerimaan minyak turun dengan drastis dimana sebelumnya penerimaan minyak memberi kontribusi lebih besar pada penerimaan domestik. Pertumbuhan ekonomi turun dengan tajam pada tahun 1985 yang hanya mencapai 2,5 persen.

Pada tahun 1986 pertumbuhan ekonomi kembali membaik yang mencapai 5,9 persen tapi pada tahun 1987 kembali mengalami penurunan menjadi 4,9 persen. Tahun berikutnya 1988 pertumbuhan ekonomi telah mencapai 5,8 persen seiring dengan makin membaiknya situasi perekonomian, Produk Domestik Bruto mengalami peningkatan dari Rp 124.816,9 milyar tahun 1987 menjadi Rp 142.104,8 milyar tahun 1988 dan terus mengalami peningkatan pada tahun berikutnya.

Memasuki tahun 1989-1990 pertumbuhan ekonomi Indonesia tumbuh dengan tajam yang mencapai 7,5 persen pada tahun 1989 dan 7,2 persen pada tahun 1990.

Tabel 4.10 Perkembangan Tingkat Pertumbuhan Ekonomi
Indonesia tahun 1984-1994

TAHUN	PDB (Rp MILYAR)	PERTUMBUHAN (%)
1984	89.885,1	6,0
1985	96.996,9	2,5
1986	102.682,6	5,9
1987	124.816,9	4,9
1988	142.104,8	5,8
1989	167.184,7	7,5
1990	195.597,2	7,2
1991	227.450,2	6,9
1992	259.884,5	6,5
1993	302.017,8	6,7
1994*	354.442,0	6,2

* PDB atas dasar harga konstan 1993 selainnya atas dasar harga konstan 1983.

Sumber : Statistik 50 tahun Indonesia Merdeka,
Departemen Keuangan.

Perkembangan ini sejalan dengan kecenderungan umum di Kawasan Asia Pasifik yang menunjukkan tingkat kegiatan ekonomi yang tinggi, baik di Asia Timur (Jepang, RRC, Korea Selatan, Taiwan dan Hongkong) maupun di Kawasan Asia Tenggara, khususnya negara-negara ASEAN.

Keadaan ini berbeda dengan yang dialami negara maju seperti Amerika dan Eropah yang hanya mengalami pertumbuhan ekonomi sekitar 2,2 persen per tahun. Sedang untuk negara Asia secara menyeluruh pertumbuhan ekonomi mencapai 5,5 persen per tahun.

Ekspansi kegiatan ekonomi selama tahun 1989-1991 ada sangkut pautnya dengan kebijaksanaan deregulasi pemerintah, yang sudah mulai dilaksanakan secara bertahap sejak tahun 1983, namun dampaknya baru terasa pada bagian akhir dasawarsa.

Laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 1991 kembali menunjukkan penurunan, kemudian berlanjut pada tahun 1992 menjadi 6,5 persen. Tetapi walaupun begitu pertumbuhan ini dianggap masih wajar dibanding negara-negara berkembang lainnya. Menurunnya pertumbuhan ekonomi pada tahun 1991 ada kaitannya dengan musim kemarau sehingga produksi pertanian menjadi sangat berkurang. Disamping itu dampak kebijaksanaan moneter yang ketat yang mulai dirasakan di sektor industri manufaktur dan sektor jasa.

Sedangkan pertumbuhan ekonomi pada tahun 1992 berhubungan erat dengan menurunnya penerimaan pada sektor migas serta kebijaksanaan uang ketat yang dirasakan betul pada tahun 1992 ini, disamping itu juga disebabkan ketidakpastian ekonomi internasional yang melanda negara-negara industri maju. Meskipun pada tahun 1992 tingkat inflasi mampu ditekan sampai 4,94 persen namun dampaknya terasa pada pertumbuhan ekonomi.

Untuk mencapai stabilitas perekonomian makro yang mantap serta untuk mendorong terciptanya iklim yang kondusif bagi pemulihan kegiatan ekonomi maka stabilitas moneter menurunkan tingkat suku bunga dan menyempurnakan ketentuan dalam prinsip kehati-hatian yang mendorong peningkatan kredit perbankan. Sebagai hasilnya, pertumbuhan ekonomi meningkat menjadi 6,7 persen pada tahun 1993, yang terutama didukung oleh menguatnya permintaan dalam negeri, baik untuk konsumsi maupun investasi.

Mantapnya faktor-faktor fundamental pada tahun 1993 terus berlanjut pada tahun 1994. Kegiatan investasi khususnya di sektor swasta terus menunjukkan peningkatan sejalan dengan makin membaiknya iklim investasi, khususnya PMA. Peningkatan kegiatan investasi ini tidak terlepas dari semakin kuatnya

kemampuan bank dalam memberikan kredit, di samping deregulasi yang ditempuh. Tetapi jika dibandingkan dengan tahun 1993, pertumbuhan ekonomi pada tahun 1994 relatif lebih rendah hanya mencapai target yang telah dicanangkan pada PELITA V sebesar 5 persen, yakni 6,2 persen.

2 Hasil-Hasil Perhitungan Empirik

2.1. Pengaruh Penanaman Modal Dalam Negeri tahun lalu, Penanaman Modal Asing tahun lalu, Tingkat Bunga dan Tingkat Inflasi Terhadap Tingkat Investasi.

Analisis regresi berganda pada tingkat investasi menggunakan variabel-variabel Penanaman Modal Dalam Negeri tahun lalu, Penanaman Modal Asing tahun lalu, Tingkat Bunga dan Tingkat Inflasi.

Penanaman Modal Dalam Negeri tahun lalu ($PMDN_{t-1}$), Penanaman Modal Asing tahun lalu (PMA_{t-1}), Tingkat bunga (i_t) dan tingkat inflasi (π_t) adalah variabel bebas dan tingkat investasi adalah variabel terikat seperti yang ditunjukkan oleh model (1). Hasil perhitungan regresinya adalah sebagai berikut :

$$\ln I_t = -0,2658 + 0,8064 \ln(PMDN_{t-1}) + 0,2329 \ln(PMA_{t-1})$$

(17,1810) (4,405)

$$- 0,2598 \ln(i_t) - 0,2658 \ln(\pi_t)$$

(-1,644) (-0,916)

$$\text{Uji } R^2 = 0,9985$$

$$\text{Uji } F = 990,940$$



TABEL 4.11 Hasil Perhitungan Regresi Model (1) Secara Keseluruhan terhadap Tingkat Investasi.

Variabel Terikat	Konstan	Variabel Bebas				R ²	F _{hit}
		PMDN _{t-1}	PMA _{t-1}	i _t	π _t		
I _t	-0,2658	0,8064 17,181	0,2329 4,405	-0,2598 -1,644	-0,2658 -0,916	0,9985	990,940

- Angka yang tercetak miring menunjukkan statistik Uji-t
- Semua variabel dalam bentuk Ln

Hasil perhitungan regresi secara keseluruhan di atas menunjukkan kesemua variabel bebas yaitu PMDN_{t-1}, PMA_{t-1}, i_t dan π_t signifikan terhadap tingkat investasi (I_t) dengan tingkat keyakinan 5% menunjukkan F hitung lebih besar dari F tabel dengan derajat bebas 3 dan 7 (F 990,940 > F 3,07). Koefisien determinasi (R²) = 0,9985 dalam perhitungan regresi keseluruhan memberi pengaruh yang besar terhadap tingkat investasi. Sedangkan koefisien determinasi (r²) secara parsial dalam perhitungan regresi secara keseluruhan memperlihatkan Penanaman Modal Dalam Negeri tahun lalu (PMDN_{t-1}), Penanaman Modal Asing tahun lalu (PMA_{t-1}), tingkat bunga (i_t), dan tingkat inflasi (π_t) mempunyai koefisien determinasi yaitu 0,9801; 0,7638; 0,3105; 0,1228. (lihat lampiran III)

Untuk mengetahui apakah antara masing-masing variabel bebas dengan variabel terikat terdapat hubungan yang erat maka uji-t dalam perhitungan regresi secara keseluruhan dengan tingkat keyakinan 5 % pada kedua sisi dengan derajat bebas (df) = 6 ternyata Penanaman Modal Dalam Negeri tahun lalu, dan Penanaman Modal Asing tahun lalu signifikan terhadap tingkat investasi dengan t hitung lebih besar dari t tabel ($t_{17,181} > 2,447$ dan $t_{4,405} > 2,447$) sedangkan tingkat bunga dan tingkat inflasi tidak signifikan terhadap tingkat investasi dengan t hitung lebih kecil dari t tabel yaitu $t_{-1,644} < t_{-2,447}$ dan $t_{-0,916} < t_{-2,447}$. (lihat tabel 4.11)

Untuk memperjelas pemahaman variabel-variabel tersebut di atas maka dicoba dihitung secara parsial seperti berikut :

$$a) \ln I_t = 0,2441 + 1,0097 \ln (\text{PMDN}_{t-1})$$

(31,638)

$$\text{Uji } r^2 = 0,9911$$

$$\text{Uji } r = 0,9955$$

$$b) \ln I_t = 1,0387 + 1,0863 \ln (\text{PMA}_{t-1})$$

(10,24)

$$\text{Uji } r^2 = 0,9207$$

$$\text{Uji } r = 0,9595$$

$$c) \ln I_t = 3,6010 - 3,9601 \ln (i_t) \\ (-1,553)$$

$$\text{Uji } r^2 = 0,2114$$

$$\text{Uji } r = 0,4598$$

$$d) \ln I_t = 12,4080 + 0,9994 \ln (\pi_t) \\ (0,864)$$

$$\text{Uji } r^2 = 0,766$$

$$\text{Uji } r = 0,2768$$

Tabel 4.12 Hasil Perhitungan Regresi Secara Parsial Terhadap Tingkat Investasi

a)

Variabel Terikat	Konstan	Variabel Bebas	r^2	r
		Penanaman Modal Dalam Negeri tahun lalu ($PMDN_{t-1}$)		
I_t	-0,2441	1,0097 31,638	0,9911	0,9955

b)

Variabel Terikat	Konstan	Variabel Bebas	r^2	r
		Penanaman Modal Asing tahun lalu (PMA_{t-1})		
I_t	-1,0387	1,0863 10,224	0,9207	0,9595

c)

Variabel Terikat	Konstan	Variabel Bebas	r^2	r
		Tingkat Bunga (i_t)		
I_t	3,6010	-1,9601 -1,553	0,2114	0,4598

d)

Variabel Terikat	Konstan	Variabel Bebas	r^2	r
		Tingkat Inflasi (π_t)		
I_t	12,4080	1,0097 0,864	0,766	0,2768

- Angka yang tercetak miring menunjukkan statistik Uji-t
- Semua variabel dalam bentuk Ln

Keempat variabel hasil perhitungan regresi secara parsial di atas menunjukkan hanya variabel bebas Penanaman Modal Dalam Negeri tahun lalu dan Penanaman Modal Asing tahun lalu melalui uji-t, dengan t hitung lebih besar dari t tabel (t 31,638 > t 2,447 dan t 10,224 > t 2,447) dengan tingkat keyakinan 5 % pada kedua sisi pada derajat bebas (df) = 9, sedangkan koefisien korelasi (r) masing-masing variabel bebas menunjukkan pengaruh yang kuat terhadap tingkat investasi (Tabel 4.12).

Untuk variabel bebas tingkat bunga (i_t) dan tingkat inflasi (π_t) tidak signifikan terhadap investasi dimana uji-t masing-masing lebih kecil dari t tabel (t -1,553 < t -2,447 dan t 0,864 < t 2,447)

dengan tingkat keyakinan 5 % pada kedua sisi pada derajat bebas (df) = 9 dengan koefisien korelasi (r) masing-masing variabel bebas menunjukkan pengaruh yang lemah terhadap tingkat investasi (Tabel 4.12).

Berdasarkan hasil perhitungan regresi secara keseluruhan tersebut dalam tingkat investasi hanya variabel bebas Penanaman Modal Dalam Negeri tahun lalu dan Penanaman Modal Asing tahun lalu terdapat saling keterkaitan antara variabel bebas, hal ini dapat dilihat pada matrik korelasi pada lampiran IV. Sedangkan variabel bebas tingkat bunga dan tingkat inflasi tidak terdapat saling keterkaitan di antara masing-masing variabel bebas. Maka data-data yang dipergunakan dalam penulisan ini layak untuk dipakai.

Dari perhitungan regresi secara keseluruhan yang telah disebutkan di atas, nampak bahwa koefisien investasi pada $\ln(\text{PMDN}_{t-1})$ sebesar 0,8064 ditaksir sebagai elastisitas investasi tahun berjalan jika dihubungkan dengan investasi domestik tahun lalu. Hal tersebut dikatakan bahwa jika investasi domestik tahun lalu naik 1 persen maka investasi domestik berjalan naik sebesar 0,8064 persen.

Nilai koefisien investasi pada $\ln(\text{PMA}_{t-1})$ sebesar 0,2329 ditaksir sebagai elastisitas investasi pada tahun berjalan dalam hubungannya dengan inves-

tasi asing tahun lalu. Hal tersebut dikatakan bahwa jika investasi asing naik 1 persen maka investasi tahun berjalan naik sebesar 0,2329 persen. Sebaliknya nilai koefisien tingkat bunga pada $\ln(i_t)$ sebesar -0,2598 menunjukkan bahwa perubahan investasi tidak elastis dalam hubungannya dengan tingkat bunga. Kenaikan 1 persen pada tingkat bunga akan menyebabkan penurunan pada tingkat investasi sebesar 0,2598 persen sedangkan nilai koefisien tingkat inflasi pada $\ln(\pi_t)$ sebesar -0,2658 menunjukkan bahwa perubahan tingkat investasi tidak elastis jika dihubungkan dengan tingkat inflasi. Kenaikan 1 persen tingkat inflasi akan menyebabkan penurunan pada tingkat investasi sebesar 0,2658 persen. Tetapi jika dibandingkan dengan hasil perhitungan regresi secara parsial seperti yang terlihat pada Tabel 4.12 nampak bahwa nilai koefisien investasi pada $\ln \text{PMDN}_{t-1}$ sebesar 1,0097 ditaksir sebagai elastisitas investasi pada tahun berjalan dalam hubungannya dengan investasi domestik tahun lalu. Hal tersebut dikatakan bahwa jika investasi domestik tahun lalu naik 1 Persen maka tingkat investasi tahun berjalan naik sebesar 1,0097 persen.

Selanjutnya nilai koefisien investasi pada $\ln(\text{PMA}_{t-1})$ sebesar 1,0863 ditaksir sebagai elasti-

sitas investasi pada tahun berjalan dalam hubungannya dengan investasi asing tahun lalu. Hal ini menunjukkan bahwa jika investasi asing tahun lalu naik 1 persen maka investasi tahun berjalan naik sebesar 1,0863 persen. Seterusnya nilai koefisien tingkat bunga pada $\ln(i_t)$ sebesar -3,9601 menunjukkan bahwa jika tingkat bunga naik 1 persen maka tingkat investasi turun sebesar 3,9601 persen.

Dari nilai koefisien tingkat inflasi pada $\ln(\pi_t)$ sebesar 0,9994 menunjukkan bahwa jika tingkat inflasi naik sebesar 1 persen maka tingkat investasi naik sebesar 0,9994 persen. Hal ini bertentangan nilai hasil yang dicapai pada perhitungan regresi secara keseluruhan dimana nilai koefisiennya sebesar -0,2658. Walaupun terjadi perbedaan nilai koefisien inflasi dalam perhitungan regresi, secara bersama-sama dengan variabel bebas lainnya inflasi tetap mempengaruhi tingkat investasi.

Dari uraian di atas, jika dilihat masing-masing variabel dengan asumsi variabel lainnya konstan, maka nilai koefisien investasi domestik tahun lalu besar, selebihnya boleh dikatakan kecil. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pengaruh variabel investasi domestik tahun lalu terhadap tingkat investasi tahun berjalan cukup besar sedangkan variabel investasi

asing tahun lalu, tingkat bunga dan tingkat inflasi relatif kecil.

Sedangkan koefisien determinasi (R^2) = 0,9985 berarti bahwa variasi naik turunnya tingkat investasi disebabkan oleh keempat variabel bebas tersebut sebesar 99,85 % sisanya sebesar 0,15 % dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak teridentifikasi. Dan koefisien korelasi berganda (R) sebesar 99,92 persen menunjukkan tingkat keeratan hubungan antara variabel bebas Penanaman Modal Dalam Negeri tahun lalu, Penanaman Modal Asing tahun lalu, tingkat bunga, dan tingkat inflasi dengan variabel terikat tingkat investasi tahun berjalan.

Selanjutnya untuk memperkuat dugaan maka dilakukan dengan uji F dimana nilai F hitung = 990,94 jauh lebih besar dari F tabel = 3,07 pada tingkat keyakinan 5 %. Hal ini menunjukkan bahwa semua variabel bebas yang digunakan secara keseluruhan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tingkat investasi.

Penanaman Modal Dalam Negeri tahun lalu dan Penanaman Modal Asing tahun lalu dengan koefisien regresi positif dan standar error masing-masing 0,0469 dan 0,0529 memberi gambaran seperti yang diprediksikan teori begitu juga dengan tingkat bunga



dan tingkat inflasi dengan koefisien negatif dan standar error masing-masing 0,1581 dan 0,0619 juga memberi gambaran seperti yang diprediksikan dalam teori (lihat lampiran III).

Variabel-variabel dominan lain yang dimaksud, selain $PMDN_{t-1}$, PMA_{t-1} , i_t , π_t , tingkat investasi juga dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah, stabilitas politik, infrastruktur yang tersedia, pajak serta variabel-variabel non ekonomi lainnya.

. Pengaruh Investasi Terhadap Tingkat Pertumbuhan Ekonomi

Analisa regresi berganda pada tingkat pertumbuhan ekonomi menggunakan variabel-variabel Penanaman Modal Dalam Negeri tahun lalu, Penanaman Modal Asing tahun lalu.

Penanaman Modal Dalam Negeri tahun lalu ($PMDN_{t-1}$) dan Penanaman Modal Asing tahun lalu (PMA_{t-1}) adalah variabel bebas dan tingkat pertumbuhan ekonomi (G_t) adalah variabel terikat seperti yang ditunjukkan oleh model (2). Hasil perhitungan regresinya adalah sebagai berikut :

$$\ln G_t = 8,3366 + 0,2979 \ln(PMDN_{t-1}) + 0,1091 \ln(PMA_{t-1})$$

(1,640) (0,540)

$$\text{Uji } R^2 = 0,8215$$

$$\text{Uji } F = 18,415$$

Tabel 4.13 Hasil Perhitungan Regresi Model (2) Secara Keseluruhan terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Variabel Terikat	Konstan	Variabel Bebas		R ²	F _{hit}
		PMDN _{t-1}	PMA _{t-1}		
G _t	8,3366	0,2979 1,640	0,1091 0,540	0,8215	18,415

- Angka yang tercetak miring menunjukkan statistik Uji-t
- Semua variabel dalam bentuk Ln

Hasil perhitungan regresi secara keseluruhan di atas menunjukkan kesemua variabel bebas yakni PMDN_{t-1}, dan PMA_{t-1} signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi (G_t) dengan tingkat keyakinan 5 % menunjukkan F hitung lebih besar dari F tabel dengan derajat bebas 1 dan 9 (F 18,415 > F 5,12). Koefisien determinasi (R²) = 0,8215 dalam perhitungan regresi secara keseluruhan memperlihatkan bahwa kedua variabel bebas tersebut memberi pengaruh yang besar terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi (G_t), sedangkan koefisien determinasi (r²) secara parsial dalam perhitungan regresi secara keseluruhan memperlihatkan 0,2517 untuk Penanaman Modal Dalam Negeri tahun lalu, dan 0,0352 untuk Penanaman Modal Asing tahun lalu. (lampiran X).

Untuk mengetahui apakah antara masing-masing variabel bebas dengan variabel terikat terdapat

hubungan yang erat maka uji-t dalam perhitungan regresi secara keseluruhan dengan tingkat keyakinan 5 % pada kedua sisi dengan derajat bebas (df) = 8, ternyata kedua variabel bebas tidak signifikan terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi dengan t hitung masing-masing lebih kecil dari t tabel yakni $t_{1,640} < t_{2,306}$ dan $t_{0,540} < t_{2,306}$.

Untuk memperjelas pemahaman variabel-variabel tersebut di atas maka dicoba untuk dihitung secara parsial seperti berikut :

$$a. \ln G_t = 8,3492 + 0,3897 \ln(\text{PMDN}_{t-1})$$

(6,297)

$$\text{Uji } r^2 = 0,8150$$

$$\text{Uji } r = 0,9028$$

$$b. \ln G_t = 8,6564 + 0,4187 \ln(\text{PMA}_{t-1})$$

(5,361)

$$\text{Uji } r^2 = 0,7615$$

$$\text{Uji } r = 0,8727$$

Tabel 4.14 Hasil Perhitungan Regresi Secara Parsial terhadap Tingkat Pertumbuhan Ekonomi

Variabel Terikat	Konstan	Variabel Bebas	r^2	r
		Penanaman Modal Dalam Negeri tahun lalu (PMDN_{t-1})		
G_t	8,3492	0,3897 6,297	0,8150	0,9028

Variabel	Konstan	Variabel Bebas	r^2	r
		Penanaman Modal Asing tahun lalu (PMA_{t-1})		
	8,6564	0,4187 5,361	0,7615	0,8727

angka yang tercetak miring menunjukkan statistik Uji-t semua variabel dalam bentuk Ln

Kedua hasil perhitungan regresi secara parsial di atas menunjukkan variabel bebas Penanaman Modal Dalam Negeri tahun lalu dan Penanaman Modal Asing tahun lalu signifikan terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi melalui uji t masing-masing dengan t hitung lebih besar dari t tabel ($t_{6,297} > t_{2,306}$ dan $t_{5,361} > t_{2,306}$) dengan tingkat keyakinan 5 % pada kedua sisi pada derajat bebas (df) = 9. Sedangkan koefisien korelasi (r) masing-masing variabel menunjukkan pengaruh yang kuat terhadap pertumbuhan ekonomi (lihat Tabel 4.14), maka dalam perhitungan ini terjadi keterkaitan di antara masing-masing variabel bebas seperti yang terlihat pada matrik korelasi pada lampiran XI.

Dari perhitungan regresi secara keseluruhan yang telah dijelaskan di atas nampak bahwa koefisien investasi pada Ln $PMDN_{t-1}$ sebesar 0,2979 ditaksir sebagai elastisitas pertumbuhan ekonomi tahun berjalan dalam hubungannya dengan investasi domestik

ahun lalu. Hal tersebut dikatakan bahwa jika investasi domestik tahun lalu naik sebesar 1 persen maka tingkat pertumbuhan ekonomi naik sebesar 0,2979 persen.

Nilai koefisien investasi pada $\ln PMA_{t-1}$ sebesar 0,1091 ditaksir sebagai elastisitas pertumbuhan ekonomi tahun berjalan dalam hubungannya dengan PMA_{t-1} ini berarti jika investasi asing tahun lalu naik sebesar 1 % maka pertumbuhan ekonomi naik 0,1091 persen sedangkan koefisien determinasi (R^2) = 0,8215 berarti bahwa variasi naik turunnya pertumbuhan ekonomi disebabkan oleh kedua variabel bebas tersebut sebesar 82,15 persen dan sisanya sebesar 17,85 persen dipengaruhi oleh variabel lain. Dan koefisien korelasi berganda (R) sebesar 0,9064 persen menunjukkan keeratan hubungan antara variabel bebas investasi domestik tahun lalu dan investasi asing tahun lalu dengan pertumbuhan ekonomi tahun berjalan.

Penanaman Modal Dalam Negeri tahun lalu dengan koefisien regresi positif dengan standar error 0,1816 memberi gambaran seperti yang diprediksikan oleh teori. Jika Penanaman Modal Dalam Negeri tahun lalu meningkat 1 persen maka pertumbuhan ekonomi naik sebesar 0,2979 persen. Walaupun penanaman Modal Dalam Negeri tahun lalu mempunyai pengaruh yang positif



terhadap pertumbuhan ekonomi namun pengaruhnya relatif kecil. Begitu pula dengan Penanaman Modal asing tahun lalu. Dengan koefisien regresi positif dan standar error 0,2019 memberi gambaran seperti yang diprediksikan oleh teori. Jika Penanaman Modal Asing tahun lalu meningkat 1 persen maka pertumbuhan ekonomi naik 0,2019 persen. Hal ini juga memperlihatkan bahwa, walaupun Penanaman Modal Asing tahun lalu mempunyai pengaruh yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi namun pengaruhnya relatif kecil (lihat lampiran X).

Relatif kecilnya pengaruh PMDN tahun lalu dan PMA tahun lalu terhadap pertumbuhan ekonomi dapat dilihat pada tabel 4-15. Dari lima variabel yang menentukan PDB seperti Konsumsi, Investasi, Pengeluaran pemerintah, Ekspor dan Impor, variabel investasilah yang memberi sumbangan terkecil. Dari tahun 1984-1994, proporsi PMDN tahun lalu dan PMA tahun lalu terhadap PDB rata-rata 11,4 % dan 3,9 % per tahun, dibandingkan dengan proporsi Konsumsi terhadap PDB yang rata-rata 65,2 % per tahun. Jadi dari analisa yang telah dijelaskan dapat dibuktikan, mengapa PMDN tahun lalu dan PMA tahun lalu mempunyai pengaruh yang relatif kecil terhadap pertumbuhan ekonomi.

IV. 15. AGREGATE DEMAND (Dalam Trilyun Rupiah)

JN	Y	C	I		G	X	M
			I _r	I _d			
4	89.9	55.2	2.4	2.1	19.4	22.4	19.3
		61.4	2.6	2.3			
15	97.0	68.1	1.1	3.7	22.8	19.4	17.9
		70.2	1.1	3.8			
36	102.7	75.7	1.0	4.4	21.9	15.6	16.4
		73.7	0.9	4.2			
37	124.8	83.8	1.5	10.4	27.0	18.2	17.0
		67.1	1.2	8.3			
88	142.1	93.8	2.5	12.2	33.0	20.6	18.5
		66.0	1.8	8.6			
89	167.2	104.5	7.6	19.6	38.2	24.0	21.8
		62.5	4.5	11.7			
90	195.6	123.3	8.5	56.5	49.5	28.2	27.6
		63.0	4.3	28.9			
91	227.5	146.1	16.6	41.0	52.0	31.9	31.5
		64.2	7.3	18.0			
92	260.8	162.1	17.5	29.3	58.2	37.3	34.5
		62.2	6.7	11.2			
93	293.0	187.0	21.7	39.5	62.7	38.9	34.0
		63.8	7.4	13.5			
94	342.8	216.5	17.2	53.3	74.9	41.3	37.2
		63.2	5.0	15.5			

ber : Departemen Keuangan, Data diolah sendiri
 : I_r : Investasi Asing Tahun Lalu
 : I_d : Investasi Domestik Tahun Lalu
 ka dalam arsiran menunjukkan persentase terhadap PDB

BAB V

P E N U T U P

simpulan

Dari uraian-uraian yang telah dikemukakan pada pembahasan terdahulu, maka penulis dapat menarik simpulan sebagai berikut :

Dengan melihat pada perhitungan hasil regresi model (1) pada tingkat investasi secara keseluruhan, terbukti bahwa semua variabel bebas yaitu $PMDN_{t-1}$, PMA_{t-1} , i_t dan π_t signifikan terhadap tingkat investasi (I_t) dimana F hitung lebih besar dari F tabel dengan tingkat keyakinan 5 % pada derajat bebas 3 dan 7. Dan koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,9985 berarti 99,85 persen tingkat investasi ditentukan oleh keempat variabel bebas di atas sisanya 0,15 persen ditentukan oleh variabel lain (lihat Tabel 4.11). Penanaman Modal Dalam Negeri tahun lalu dan Penanaman Modal Asing tahun lalu juga signifikan terhadap tingkat investasi karena t hitung lebih besar dari t tabel (lihat Tabel 4.11). Ini berarti hipotesis terbukti karena $PMDN_{t-1}$ dan PMA_{t-1} mempunyai pengaruh yang berarti terhadap tingkat investasi, sedangkan untuk tingkat bunga (i_t) dan tingkat inflasi (π_t) tidak mempunyai pengaruh yang berarti terhadap tingkat investasi.

Pada perhitungan hasil regresi model (2) secara keseluruhan menunjukkan bahwa semua variabel bebas $PMDN_{t-1}$ dan PMA_{t-1} signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi (G_t) dengan tingkat keyakinan 5 % menunjukkan F hitung lebih besar dari F tabel dengan derajat bebas 1 dan 9 (lihat Tabel 4.13). Koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,8215 berarti bahwa variasi naik turun pertumbuhan ekonomi (G_t) disebabkan oleh kedua variabel bebas $PMDN_{t-1}$ dan PMA_{t-1} sebesar 82,15 persen dan sisanya 17,85 persen ditentukan oleh variabel lain. Untuk Uji-t dalam perhitungan regresi secara keseluruhan dengan derajat bebas (df) = 8 serta tingkat keyakinan 5 % pada kedua sisi ternyata variabel bebas $PMDN_{t-1}$ dan PMA_{t-1} tidak signifikan terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi (G_t) dengan t hitung lebih kecil dari t tabel (lihat Tabel 4.13). Hal ini membuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi bukan ditentukan oleh variabel tersebut tetapi masih ada variabel lain di luar variabel tersebut.

c. Penanaman Modal Dalam Negeri tahun lalu dan Penanaman Modal Asing tahun lalu dengan koefisien regresi positif dengan standar error masing-masing 0,0469 dan 0,0529 memberikan gambaran seperti yang diprediksikan teori. Dari kedua variabel tersebut hanya variabel bebas $PMDN_{t-1}$ yang mempunyai pengaruh

kuat sedangkan PMA_{t-1} pengaruhnya relatif kecil terhadap tingkat investasi. Begitu pula dengan tingkat bunga (i_t) dan tingkat inflasi (π_t) dengan koefisien regresi negatif dan standar error masing-masing 0,1581 dan 0,0619 walaupun memberikan gambaran yang diprediksikan teori tetapi pengaruhnya relatif kecil. Begitu pula jika dihubungkan dengan pertumbuhan ekonomi (G_t), $PMDN_{t-1}$ dan PMA_{t-1} dengan koefisien regresi positif dengan standar error masing-masing 0,1816 dan 0,2019 juga memberikan gambaran seperti yang diprediksikan teori tetapi pengaruhnya relatif kecil.

2. Saran-saran

Untuk menggiatkan pelaksanaan investasi di Indonesia, Pemerintah sebaiknya perlu membuka iklim yang kondusif bagi investasi dengan mengeluarkan kebijakan yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku sehingga nantinya Penanaman Modal Dalam Negeri tahun lalu dan Penanaman Modal Asing tahun lalu berkembang beriringan. Dan kesenjangan kawasan dalam penyebaran investasi tidak terlalu besar serta pemerataan pembangunan antara Kawasan Barat Indonesia dengan Kawasan Timur Indonesia dapat diwujudkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Yurrahman, Ensiklopedia Ekonomi, Pembangunan dan Perdagangan, Jakarta, Pradaya Paramita, 1978.
- Stoiner dan C.H. Douglass, Teori Ekonomi 2, terjemahan Aminuddin, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1984.
- Faisal, Perekonomian Indonesia Menjelang Abad XXI, Jakarta, Erlangga, 1995.
- Indonesia Cabang Yogyakarta, Peluang Investasi di D.I. Yogyakarta Dalam Rangka Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Kerjasama dengan BP FE-UGM, 1994.
- Shono, Ekonomi Makro, Yogyakarta, BPFE, 1982.
- Imburch R dan Stanley F, Makro Ekonomi, terjemahan Rudi P. Sitompul, Jakarta, Erlangga, 1989.
- Shohadikusumo, Sumitro, Perkembangan Pemikiran Ekonomi, Dasar Teori Ekonomi Pertumbuhan dan Ekonomi Pembangunan, Jakarta, LP3ES, 1994.
- Sawan, Anton Hernanto, Anggaran Pemerintah dan Inflasi di Indonesia, Jakarta, PT. Gramedia, 1991.
- Harati, Damodar, Ekonometrika Dasar, terjemahan Sumarno Z, Jakarta, Erlangga, 1991.
- Handar, Pengaruh Investasi dan Tingkat Suku Bunga Terhadap Perkembangan PDB Di Indonesia, (Ujung Pandang, Skripsi tidak dipublikasikan), 1995.
- Har, Syamsuddin, Ekonomi Moneter, Teori Dasar, Kebijakan, Analisa dan Kriteria, Yogyakarta, Kota Kembang, 1993.
- Har, Zulkarnain, Perekonomian Indonesia, Jakarta, LP FE-UI, 1993.
- Har, M.L., Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan, terjemahan Guritno, Jakarta, Rajawali Pers, 1990.
- Har, Aluddin Rustian, Beberapa Aspek Pembangunan Nasional dan Pembangunan Daerah, Jakarta, LP FE-UI, 1987.

- Arudin, *Analisa Moneter dan Management*, Bandung, Alumni, 1975.
- _____, *Uang di Negara Sedang Berkembang*, Jakarta, Bumi Aksara, 1991.
- Chet, Dugley G, *Uang dan Bank*, terjemahan Paul C. Rosyadi, Jakarta, Erlangga, 1983.
- _____, *Ekonomi Moneter*, Ghlia Indonesia, Jakarta, 1983.
- _____, *Arvad Anwar, Faisal Basri dan M. Ikhsan, Prospek Ekonomi Indonesia dalam Jangka Pendek, Peluang dan Tantangan dalam Sektor riil dan Utilitas pada Dasawarsa 1990-an*, Jakarta, LP FE-UI dan Gramedia, 1993.
- _____, *Ekonomi Moneter*, Yogyakarta, BP FE UGM, 1988.
- _____, *A. Rahman, Ekonomi Makro 1, Ujung Pandang*, Lepas, 1988.
- _____, *Prasetiantono, A. Tony, Antologi Ekonomi Indonesia*, Yogyakarta, BP FE-UGM, 1990.
- _____, *Agenda Ekonomi Indonesia*, Jakarta, STIE Yogyakarta dan Gramedia, 1995.
- _____, *Samuelson, Paul A, Ekonomi, Jilid I dan II*, Jakarta, Erlangga, 1986.
- _____, *Pembangunan Ekonomi dalam Cita-Cita dan Realita*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1989.
- _____, *Catatan Ekonomi Indonesia*, Jakarta, PT. Adhiprint, 1995.
- _____, *Sutirno, Sadono, Pengantar Makro Ekonomi*, Jakarta, Rajawali Pers, 1994.
- _____, *Sabri, Ekonomi Makro I*, Yogyakarta, BP FE-UII, 1990.
- _____, *Soediyono R, Ekonomi Makro (analisa IS-LM dan Permintaan Penawaran Agregatif)*, Edisi ke-3, Penerbit Liberty Yogyakarta, 1985.
- _____, *Hasbi, Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia*, (Ujung Pandang, Skripsi tidak dipublikasikan), 1992.
- _____, *I.F. Denburg dan MC. Douglass, Ekonomi Makro*, Jakarta, Erlangga, Edisi VI, 1985.

lah-Makalah

Indiek J. Rachbini, Deregulasi dan Agenda Kebijakan Pelaksanaan Ekonomi, Jakarta, Infobank, 1994, disampaikan kembali dalam bentuk makalah pada SIMNAS HIMA ESP Unpad, Bandung, 1995.

Marzuki Usman, Industrialisasi Indonesia; Pasca GATT/AFTA/APEC, makalah pada Kongres Nasional V ISMEI di Banjarmasin, 1994.

HIMA ESP, Unsyiah, Penanaman Modal Asing dan Kaitannya dengan Transfer Teknologi dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, makalah pada SIMNAS HIMA ESP Unpad, Bandung, 1995.

Laporan-laporan

1. Bank Indonesia, Statistik Ekonomi - Keuangan Indonesia, Berbagai Edisi.

2. Departemen Keuangan, Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara, 1995/1996.

3. Statistik 50 tahun Indonesia Merdeka.